



**PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2025



www.labuhanbatukab.go.id



Jln. Sisingamangaraja No. 60, Rantauprapat

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Labuhanbatu agar semakin baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan manifestasi konkret dari salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mencerminkan komitmen terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat secara luas.

LKjIP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 memuat informasi komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan melalui program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menuju "Labuhanbatu Cerdas Bersinar". Keseluruhan arah kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029.

Tujuan utama penyajian dokumen ini adalah sebagai media akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menggambarkan

tingkat keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja utama yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang didanai APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen umpan balik yang strategis bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga mampu beroperasi secara lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap dinamika serta aspirasi masyarakat.

Dalam proses penyusunan laporan kinerja ini kami telah mencurahkan berbagai upaya secara optimal dengan penuh kesungguhan dan komitmen. Namun demikian kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai masukan dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini kami sampaikan, dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah pengabdian demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Amin.

Rantauprapat, 23 Maret 2026

Bupati Labuhanbatu,

Maya Hasmita



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan H. Idris Hasibuan No. 03, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422
Telp (0624) 325840 Faksimile (0624) 325840
Email : itkab_labuhanbatu62@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rantauprapat, 30 Maret 2026
Inspektur Daerah,



Ahlan Teruna Ritonga, SH., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197102152000031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangannya secara transparan, akuntabel, dan terukur kepada publik

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama seluruh Perangkat Daerah di lingkungannya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu yang diawali dari proses penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, hingga Pengukuran Kinerja dengan capaian yang secara umum menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu LKjIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan serta komprehensif bagi para pengambil keputusan sehingga dapat menginterpretasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan tersebut secara lebih luas, objektif, dan mendalam sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai, bahkan berada pada kategori sangat berhasil meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan maupun ketidakberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam menyikapi kondisi tersebut dilakukan langkah-langkah evaluasi secara periodik dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan kinerja sehingga pada tahun berikutnya diharapkan pencapaian kinerja dapat meningkat dan menjadi lebih optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagai tambahan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan inovasi dalam peningkatan kinerja ASN melalui pengembangan aplikasi presensi kehadiran dan pelaporan kinerja serta implementasi aplikasi e-SAKIP Kabupaten Labuhanbatu yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja sekaligus kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan	2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten	3
1.3.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis	3
1.3.2. Kondisi Demografis	7
1.4. Kondisi Perekonomian Daerah	9
1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita	10
1.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	11
1.4.4. Inflasi	12
1.5. Kondisi Sosial Budaya	14
1.5.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	14
1.5.2. Angka Usia Harapan Hidup	16
1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia	17
1.6. Kondisi Pemerintahan	19
1.6.1. Struktur Organisasi	19
1.6.2. Sumber Daya Aparatur	23
1.6.3. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang sedang Dihadapi Organisasi	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	31
2.1.1. Visi	32
2.1.2. Misi	33
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	34
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	37
2.2. Indikator Kinerja Utama	47
2.3. <i>Cascading</i> Kinerja, <i>Pohon Kinerja</i> , dan <i>Crosscutting</i> Program	48
2.4. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	49
2.5. Rencana Kinerja Tahunan	50
2.6. Perjanjian Kinerja 2024	55

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1. Pengukuran Kinerja	56
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	58
3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Digital	59
3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	67
3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial.....	76
3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif	85
3.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	95
3.2.6. Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	104
3.2.7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas.....	112
3.2.8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Tangguh Bencana	119
3.2.9. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	128
3.2.10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	135
3.2.11. Sasaran Strategis 11 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	145
3.2.12. Sasaran Strategis 12 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih	152
3.2.13. Sasaran Strategis 13 : Meningkatkan Kualitas Keluarga yang Harmonis dan Berbudaya.....	162
3.3. Pengukuran Kinerja	172
3.3.1. Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.....	172
3.3.2. Anggaran pada Perjanjian Kinerja	176
3.3.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	177
3.4. Banchmark Sasaran Capaian Kinerja.....	178
3.5. Pencapaian Kinerja Lainnya	180
3.5.1. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi	180
3.5.2. Inovasi dalam Manajemen Kinerja	182
3.5.3. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	185

3.6. SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 dan Pelayanan Publik Award.....	186
3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPan dan RB	187

BAB IV PENUTUP 195

Lampiran 1	Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
Lampiran 3	Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
Lampiran 4	Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
Lampiran 5	Standart Operational Procedure Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu
Lampiran 6	Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama Tahun 2025
Lampiran 7	Penandatanganan Bersama Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu	5
Tabel 1.2.	Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten ..	6
Tabel 1.3.	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025 .	8
Tabel 1.4.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah).....	9
Tabel 1.5.	Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025	10
Tabel 1.6.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	12
Tabel 1.7.	Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025 .	13
Tabel 1.8.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	14
Tabel 1.9.	Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	16
Tabel 1.10.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	17
Tabel 1.11.	Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	25
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029	47
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	50
Tabel 2.4.	Program-Program Prioritas Pendukung Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025..	52
Tabel 3.1.	Predikat Kinerja Organisasi	57
Tabel 3.2.	Interpretasi Predikat Kinerja Organisasi	57
Tabel 3.3.	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	58
Tabel 3.4.	Predikat Kinerja Organisasi Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	59
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	62
Tabel 3.6.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi	62
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	63

Tabel 3.8. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	66
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	68
Tabel 3.10. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia	68
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	69
Tabel 3.12. Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	71
Tabel 3.13. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	74
Tabel 3.14. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	75
Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	77
Tabel 3.16. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin	78
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	79
Tabel 3.18. Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	81
Tabel 3.19. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	83
Tabel 3.20. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	83
Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	86
Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun per Pilar 2021-2025.....	87
Tabel 3.23. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah.....	87
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	88

Tabel 3.25. Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	89
Tabel 3.26. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	93
Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	95
Tabel 3.28. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi	96
Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	97
Tabel 3.30. Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	98
Tabel 3.31. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025.....	101
Tabel 3.32. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025.....	102
Tabel 3.33. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	103
Tabel 3.34. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	105
Tabel 3.35. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan	106
Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	107
Tabel 3.37. Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah...	108
Tabel 3.38. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	111
Tabel 3.39. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Infrastruktur...	113
Tabel 3.40. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	115
Tabel 3.41. Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah...	116
Tabel 3.42. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	119

Tabel 3.43. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	120
Tabel 3.44. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana	121
Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	122
Tabel 3.46. Realisasi Kinerja Indeks Resiko Bencana Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah...	123
Tabel 3.47. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	128
Tabel 3.48. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	129
Tabel 3.49. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka	129
Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	130
Tabel 3.51. Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	132
Tabel 3.52. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	135
Tabel 3.53. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	137
Tabel 3.54. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun	138
Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	138
Tabel 3.56. Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah...	140
Tabel 3.57. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	144
Tabel 3.58. Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	145
Tabel 3.59. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama PDRB Perkapita	146
Tabel 3.60. Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	148
Tabel 3.61. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ...	151

Tabel 3.62. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	153
Tabel 3.63. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Pelayanan Publik	154
Tabel 3.64. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	155
Tabel 3.65. Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah ..	156
Tabel 3.66. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	159
Tabel 3.67. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	163
Tabel 3.68. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kerukunan Umat Beragama	164
Tabel 3.69. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	165
Tabel 3.70. Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	166
Tabel 3.71. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	170
Tabel 3.72. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	171
Tabel 3.73. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 (berdasarkan LRA Per 31 Desember 2025, <i>Unaudited</i>)	173
Tabel 3.74. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 (berdasarkan LRA Per 31 Desember 2025, <i>Unaudited</i>)	174
Tabel 3.75. Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 (berdasarkan LRA Per 31 Desember 2025, <i>Unaudited</i>)	176
Tabel 3.76. Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	178
Tabel 3.77. Benchmark Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.	179
Tabel 3.78. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	188
Tabel 4.1. Pencapaian Sasaran Kinerja Strategis Kabupaten Labuhanbatu 2025	196
Tabel 4.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu 2025	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu	5
Gambar 1.2.	Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten (%)	7
Gambar 1.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Labuhanbatu Tahun 2021-2025	8
Gambar 1.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025	10
Gambar 1.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025	11
Gambar 1.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	12
Gambar 1.7.	Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	13
Gambar 1.8.	Laju Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	15
Gambar 1.9.	Laju Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	16
Gambar 1.10.	Laju Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	18
Gambar 1.11.	Komparasi IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Pemerintah Daerah Sekitar.....	19
Gambar 1.12.	Statistik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	24
Gambar 3.1.	Trend Realisasi Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	64
Gambar 3.2.	Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	64
Gambar 3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	69
Gambar 3.4.	Trend Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025	70
Gambar 3.5.	Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	71
Gambar 3.6.	Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025.....	72
Gambar 3.7.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	78

Gambar 3.8.	Trend Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	80
Gambar 3.9.	Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	70
Gambar 3.10.	Perbandingan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025	81
Gambar 3.11.	Kerangka Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025	86
Gambar 3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 .	88
Gambar 3.13.	Trend Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	89
Gambar 3.14.	Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	90
Gambar 3.15.	Perbandingan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025	91
Gambar 3.16.	Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	96
Gambar 3.17.	Trend Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	97
Gambar 3.18.	Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	98
Gambar 3.19.	Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025	99
Gambar 3.20.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	106
Gambar 3.21.	Trend Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	107
Gambar 3.22.	Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	109
Gambar 3.23.	Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025	109
Gambar 3.24.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ..	114
Gambar 3.25.	Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024-2025.....	116
Gambar 3.26.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.....	122
Gambar 3.27.	Trend Realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	123
Gambar 3.28.	Realisasi Kinerja Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	124

Gambar 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	130
Gambar 3.30. Trend Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	131
Gambar 3.31. Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.....	132
Gambar 3.32. Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025.....	133
Gambar 3.33. Trend Realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024.....	139
Gambar 3.34. Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	140
Gambar 3.35. Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024	141
Gambar 3.36. Trend Realisasi PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	147
Gambar 3.37. Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	148
Gambar 3.38. Trend Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	155
Gambar 3.39. Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	157
Gambar 3.40. Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025.....	166
Gambar 3.41. Perbandingan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025.....	167
Gambar 3.42. Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Labuhanbatu https://e-sakip.labuhanbatukab.go.id/	183
Gambar 3.43. Workshop Internalisasi Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Labuhanbatu.....	184
Gambar 3.44. Aplikasi Absensi Online Kabupaten Labuhanbatu	184
Gambar 3.45. Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System Kabupaten Labuhanbatu.....	185
Gambar 3.46. Penganugerahan SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	186
Gambar 3.47. Penganugerahan Pelayanan Publik Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.....	187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan *good governance* dan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah menjalankan mandat publik secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui mekanisme pelaporan kinerja yang disusun secara sistematis, terukur, dan periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan kerangka regulatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu LKjIP. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun LKjIP dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur Sumatera Utara paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen kinerja nasional yang bertujuan memperkuat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

LKjIP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 memuat ikhtisar pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, khususnya RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2025–2029. Informasi yang disajikan mencakup capaian indikator sasaran, analisis deviasi antara target dan realisasi, serta penjelasan komprehensif mengenai faktor pendukung, hambatan, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Penyajian capaian tersebut dilengkapi dengan perbandingan terhadap target tahunan dan tren capaian tahun sebelumnya, sehingga memberikan gambaran longitudinal mengenai efektivitas intervensi kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, LKjIP ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja yang tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy making*).

Realisasi kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga RPJMD 2025–2029 sehingga laporan ini memiliki posisi strategis dalam menilai konsistensi arah pembangunan daerah, efektivitas implementasi kebijakan, serta tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah. Selain itu, LKjIP menjadi media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian penyusunan LKjIP tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme pengendalian internal dan eksternal yang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan nilai tambah (*value for money*) bagi masyarakat. LKjIP berfungsi sebagai alat ukur kinerja, sarana evaluasi kebijakan, dan instrumen akuntabilitas publik yang memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka *good governance*.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan perubahannya.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.s
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.
21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Gambaran Umum Kabupaten

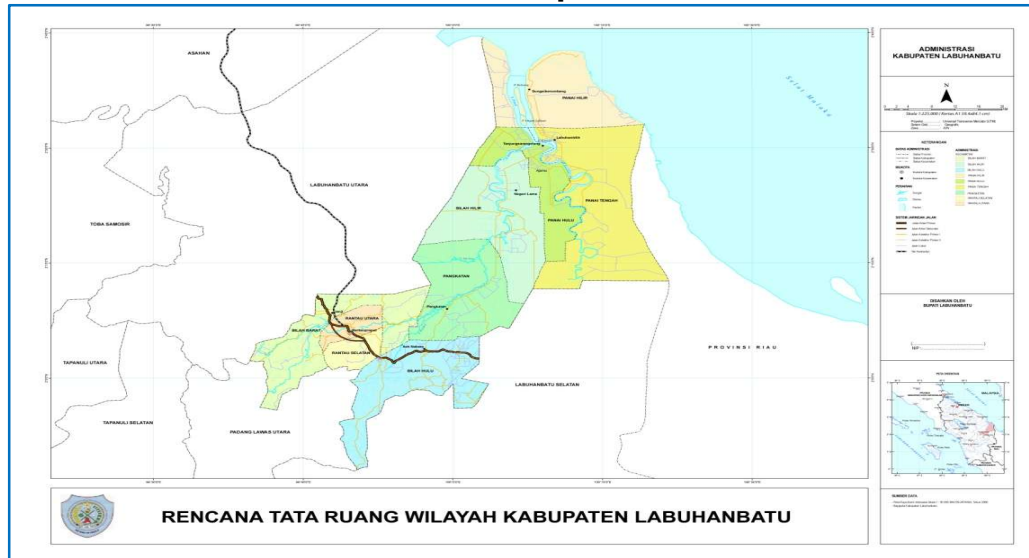
1.3.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu wilayah strategis di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang memiliki posisi geo-spasial penting dalam struktur ruang regional. Lokasinya berada pada koridor pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia—sehingga memberikan nilai strategis dalam konteks konektivitas ekonomi, mobilitas barang dan jasa, serta potensi pengembangan kawasan berbasis maritim.

Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu berada pada jalur lintas antarprovinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera bagian utara dan selatan. Posisi ini diperkuat oleh letaknya yang berada pada simpul pergerakan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga menjadikan Labuhanbatu sebagai *nodal point* penting dalam jaringan transportasi darat, distribusi logistik, dan integrasi wilayah. Konstelasi geografis tersebut menempatkan Kabupaten Labuhanbatu sebagai wilayah dengan potensi strategis untuk pengembangan ekonomi regional, peningkatan aksesibilitas, serta

penguatan peran sebagai pusat pelayanan dan perdagangan di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu



Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kordinat antara 1°41' - 2°44' LU (lintang utara) dan 99°33' - 100°22' BT (bujur timur) dan berada pada ketinggian 0-700 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 277.257 ha atau 2.772,57 km², berada pada posisi yang sangat menguntungkan dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi 9 kecamatan, 75 desa, 23 kelurahan, 215 lingkungan dan 526 dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingku- ngan	Dusun
1	Bilah Hulu	24	-	-	116
2	Pangkatan	7	-	-	57

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingku- ngan	Dusun
3	Bilah Barat	10	-	-	86
4	Bilah Hilir	11	2	16	93
5	Panai Hulu	7	-	-	61
6	Panai Tengah	9	1	7	86
7	Panai Hilir	7	1	8	41
8	Rantau Selatan	-	9	91	-
9	Rantau Utara	-	10	93	-
Jumlah		75	23	215	540

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah desa terbanyak berada di wilayah Kecamatan Bilah Hulu, yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) desa. Sementara itu jumlah kelurahan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi wilayah administrasi desa dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap kecamatan, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, perkembangan wilayah, serta dinamika pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.2.
Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten

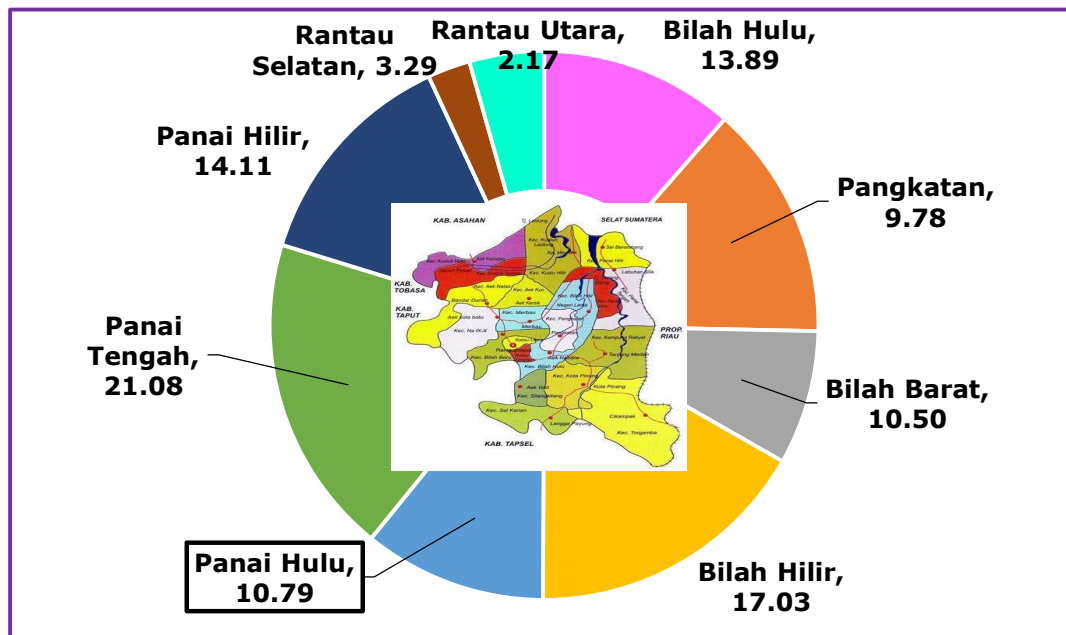
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Rasio (%)
1	Bilah Hulu	Aek Nabara	385,02	13,89
2	Pangkalan	Pangkalan	271,13	9,78
3	Bilah Barat	Janji	291,05	10,50
4	Bilah Hilir	Negeri Lama	472,26	17,03
5	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	225,98	8,15
6	Panai Tengah	Labuhanbilik	584,56	21,08
7	Panai Hilir	Sei Berombang	391,13	14,11
8	Rantau Selatan	Sioldengan	60,20	2,17
9	Rantau Utara	Rantauprapat	91,24	3,29
Jumlah			2.772,57	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencapai 2.772,57 km² atau sekitar 277.257 hektare. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemekaran yang mencapai 9.223,18 km² maka luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu saat ini sekitar 30,06 % dari luas wilayah sebelumnya.

Apabila dilihat dari rasio luas masing-masing kecamatan terhadap total luas wilayah kabupaten terdapat perbedaan distribusi luas wilayah yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Panai Tengah merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 584,56 km² atau sekitar 21,08 % dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Sementara itu Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu 60,20 km² atau sekitar 2,17 % dari total luas wilayah kabupaten.

Gambar 1.2.
Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten (%)



1.3.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk mencapai 527.043 jiwa naik dari tahun 2024 sebesar 520.545 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,38 %. Kepadatan penduduk sebesar 190,09 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 102.145 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.119,52 jiwa per km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 40.290 jiwa dengan kepadatan penduduk 148,60 jiwa per km².

Jumlah penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.344,67 jiwa per km² sedangkan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 75,89 jiwa

per Km². Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

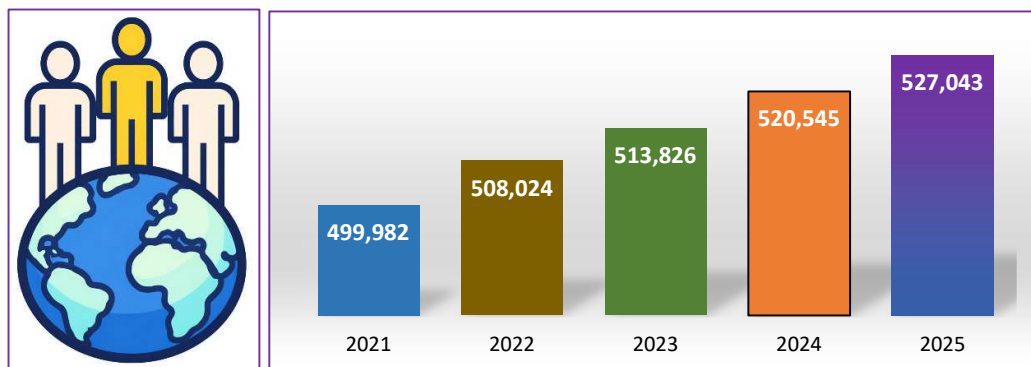
Tabel 1.3.
Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bilah Hulu	64.949	65.729	66.516	67.134	67.717
2	Pangkalan	38.229	38.841	39.285	39.796	40.290
3	Bilah Barat	40.442	41.049	41.521	42.041	42.542
4	Bilah Hilir	60.094	61.053	61.751	62.550	63.322
5	Panai Hulu	38.359	38.836	39.299	39.679	40.309
6	Panai Tengah	41.767	42.557	43.027	43.703	44.363
7	Panai Hilir	43.300	44.008	44.509	45.102	45.676
8	Rantau Selatan	75.395	77.126	77.936	79.452	80.949
9	Rantau Utara	97.467	98.825	99.982	101.088	102.145
Jumlah		499.982	508.024	513.826	520.545	527.043

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan tabel diatas selama lima tahun yaitu dari tahun 2021-2025 penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Rantau Utara. Pada tahun 2025 jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Rantau Utara sebesar 102.145 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penambahan sebesar 4.678 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil tahun 2025 berada di Kecamatan Panai Hulu yaitu sebesar 40.290 jiwa dengan penambahan sebesar 2.061 jiwa dalam periode yang sama. Pertumbuhan penduduk dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.3.
Laju Pertumbuhan Penduduk Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Pertumbuhan penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah yang berada di sekitar ibukota Kabupaten, yaitu Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk Kabupaten Labuhanbatu lebih memilih untuk tinggal dan menetap di kawasan perkotaan khususnya pada kedua kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang lebih lengkap seperti fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang lebih terpusat di wilayah perkotaan. Selain itu, keberadaan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas dan menetap di wilayah tersebut

1.4. Kondisi Perekonomian Daerah

1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat diukur dari perubahan nilai PDRB pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah, karena mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah:

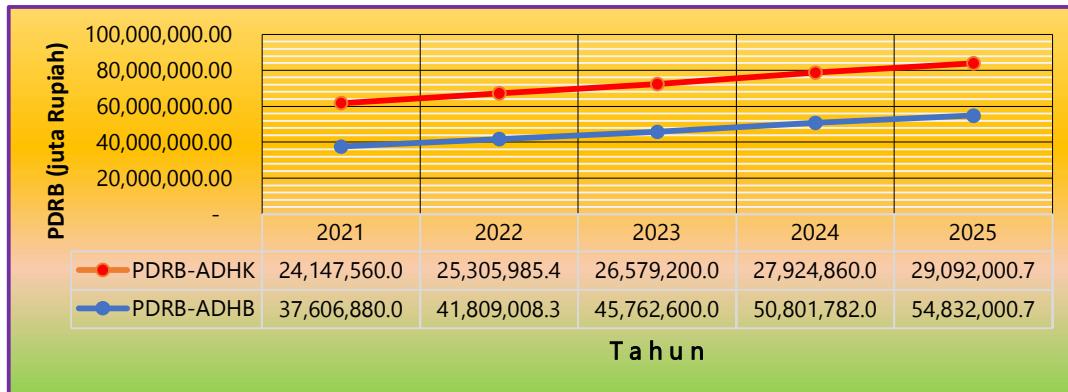
Tabel 1.4.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta)	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp Juta)
1	2021	37.606.880,00	24.147.560,00
2	2022	41.809.008,33	25.305.985,43
3	2023	45.762.600,00	26.579.280,00
4	2024	50.801.782,00	27.924.860,00
5	2025	54.832.000,77	29.092.000,77

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu mengalami perkembangan yang positif, yang ditandai dengan meningkatnya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

Gambar 1.4.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025



1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring pertumbuhan Produk PDRB yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB per kapita.

Tabel 1.5.
Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025

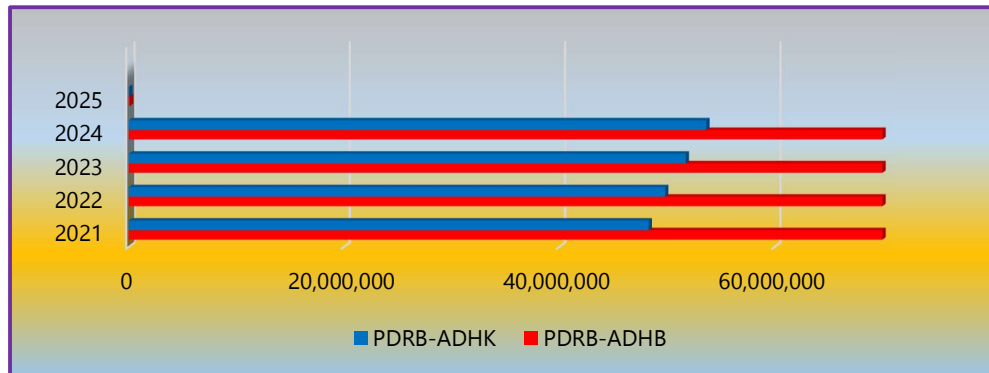
No	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp ribu)
1	2020	75.245,51	48.315,51
2	2021	82.480,12	49.923,23
3	2022	89.062,44	51.728,18
4	2023	97.593,45	53.645,43
5	2024	104.031,90	55.200,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per

penduduk di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Gambar 1.5.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025



1.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi ini dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu pada periode tahun 2021–2025 terlihat bahwa perekonomian daerah menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,85 persen, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 4,80 persen pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 5,03 persen serta tahun 2024 sebesar 5,06 persen yang menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah terus mengalami perbaikan dan perkembangan yang positif seiring dengan meningkatnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, meskipun pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan menjadi 4,18 persen namun secara keseluruhan kondisi tersebut masih mencerminkan bahwa perekonomian Kabupaten Labuhanbatu tetap berada dalam kondisi yang relatif stabil serta menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

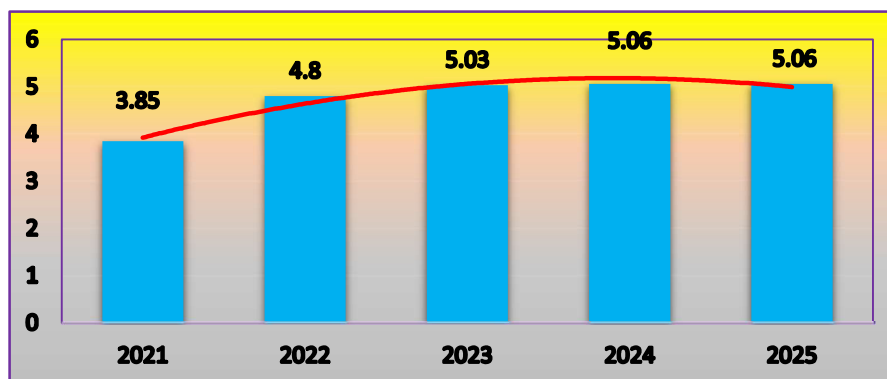
Tabel 1.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2021	3,85
2	2022	4,80
3	2023	5,03
4	2024	5,06
5	2025	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi adalah sektor Real Estat, Transportasi dan Pergudangan, dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Secara grafis pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

1.4.4. Inflasi

Selama beberapa tahun terakhir tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu terjadi perubahan secara fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada angka inflasi regional yang berpusat di Kota Pematang Siantar dan mulai tahun 2024 tingkat inflasi diukur oleh masing-masing BPS di setiap daerah. Berdasarkan data tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu pada periode tahun 2021–2025 terlihat bahwa perkembangan inflasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 tingkat inflasi tercatat sebesar 2,12 persen, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 6,16 persen yang menunjukkan adanya

tekanan kenaikan harga barang dan jasa pada periode tersebut, selanjutnya pada tahun 2023 inflasi kembali menurun menjadi 2,30 persen yang mengindikasikan kondisi harga yang relatif lebih stabil kemudian pada tahun 2024 inflasi kembali meningkat menjadi 3,36 persen dan pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,74 persen sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Labuhanbatu selama periode tersebut cenderung berfluktuasi namun masih berada pada tingkat yang relatif terkendali.

Tabel 1.7.
Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021-2025

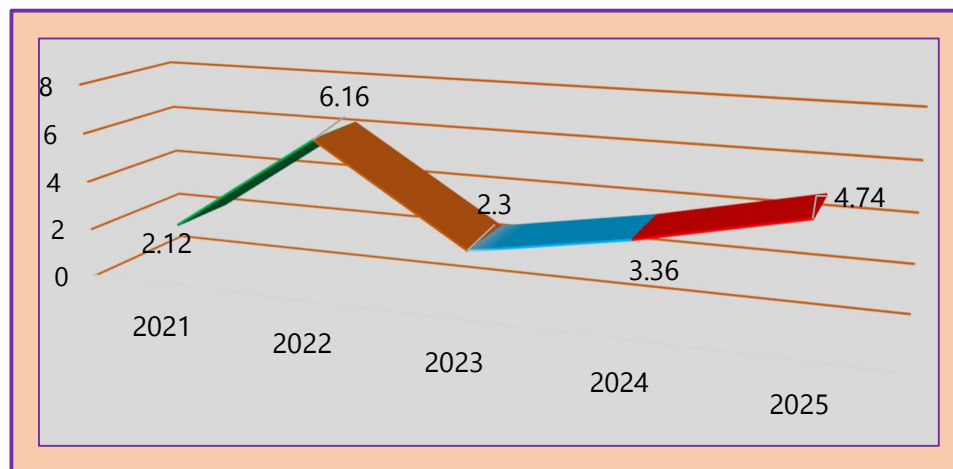
No	Tahun	Angka Inflasi (%)
1	2021	2,12 *
2	2022	6,16 *
3	2023	2,30 *
4	2024	3,36
5	2025	4,74

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Catatan *) : inflasi regional yang berpusat di Kota Pematang Siantar

Untuk melihat fluktuasi perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Labuhanbatu selama periode tahun 2021–2025 maka secara grafis perkembangan tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan tingkat inflasi dari tahun ke tahun.

Gambar 1.7.
Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Labuhanbatu cenderung tidak stabil namun masih dalam kondisi yang relatif terkendali, dimana perubahan inflasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan harga kebutuhan pokok, distribusi barang dan jasa, serta dinamika aktivitas perekonomian masyarakat dari tahun ke tahun.

1.5. Kondisi Sosial Budaya

1.5.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dalam menjalani proses pendidikan formal. Tahun efektif yang dimaksud adalah jumlah tahun standar yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, misalnya pendidikan dasar SD/MI selama 6 (enam) tahun, pendidikan menengah pertama SMP/MTs selama 9 (sembilan) tahun, dan jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku.

Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan lebih cepat atau lebih lama dari waktu standar yang telah ditetapkan. Indikator rata-rata lama sekolah ini merupakan salah satu indikator pendidikan yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 dan digunakan sebagai komponen penting dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada periode tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang bervariasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menggambarkan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

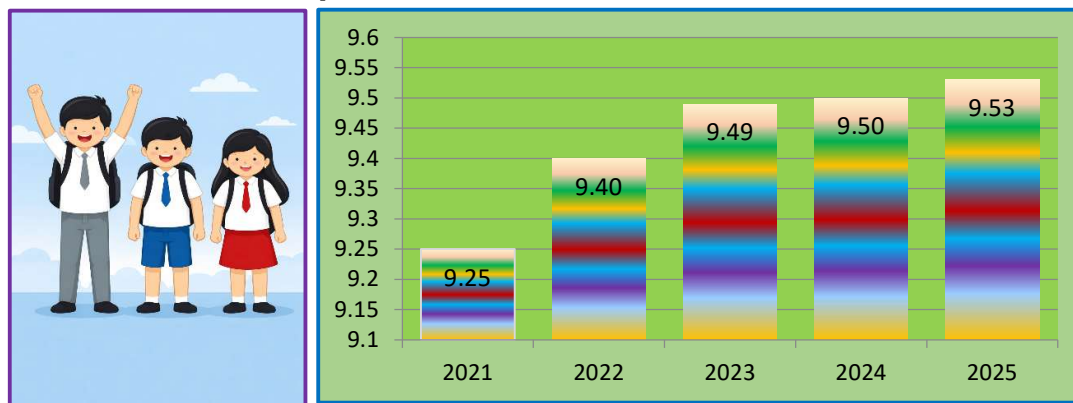
No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
1	2021	9,25
2	2022	9,40

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
3	2023	9,49
4	2024	9,50
5	2025	9,53

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021–2025 terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan tren peningkatan secara bertahap setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 9,25 tahun kemudian meningkat menjadi 9,40 tahun pada tahun 2022. Selanjutnya 9,49 tahun pada tahun 2023, 9,50 tahun pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 9,53 tahun pada tahun 2025 sehingga secara umum kondisi ini menggambarkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Gambar 1.8.
Laju Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu semakin membaik, sehingga rata-rata penduduk telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMP atau sederajat. Meskipun demikian jika dilihat dari nilainya yang masih berada pada kisaran 9 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk rata-rata baru menyelesaikan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah pertama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, sehingga rata-rata lama sekolah dapat terus meningkat dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu.

1.5.2. Angka Usia Harapan Hidup

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat, sehingga dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup penduduk. Selain itu meningkatnya taraf sosial ekonomi masyarakat juga memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk untuk memperoleh akses terhadap pelayanan dan perawatan kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat membantu memperpanjang usia harapan hidup masyarakat.

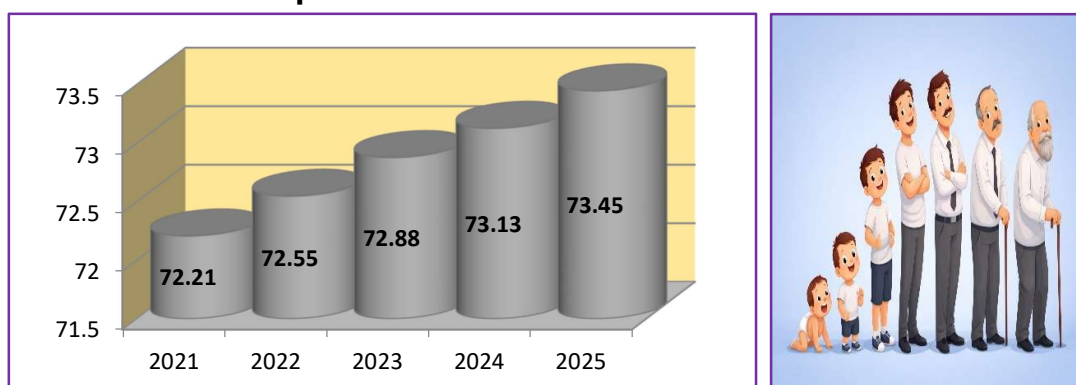
Tabel 1.9.
Angka Usia Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1	2021	72,21
2	2022	72,55
3	2023	72,88
4	2024	73,13
5	2025	73,45

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan data Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021–2025 terlihat bahwa angka harapan hidup mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka harapan hidup tercatat sebesar 72,21 tahun kemudian meningkat menjadi 72,55 tahun pada tahun 2022 selanjutnya 72,88 tahun pada tahun 2023, 73,13 tahun pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 73,45 tahun pada tahun 2025.

Gambar 1.9.
Laju Angka Usia Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu cenderung semakin membaik dari tahun ke tahun yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat serta adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara umum tren peningkatan angka harapan hidup ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu.

1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kualitas hidup manusia di suatu wilayah pada periode tertentu. IPM dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran atau konsumsi riil per kapita. Komponen-komponen tersebut kemudian dihitung dan dikombinasikan untuk menghasilkan nilai IPM yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

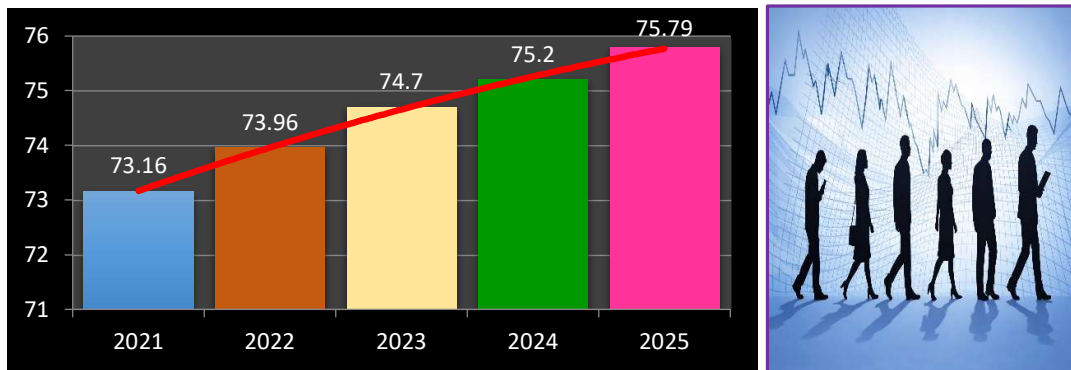
Tabel 1.10.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1	2021	73,16
2	2022	73,96
3	2023	74,70
4	2024	75,20
5	2025	75,79

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan data IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021–2025 terlihat bahwa nilai IPM mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilai IPM tercatat sebesar 73,1 kemudian meningkat menjadi 73,96 pada tahun 2022, selanjutnya 74,70 pada tahun 2023, 75,20 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 75,79 pada tahun 2025. Secara grafis pertumbuhan IPM penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.

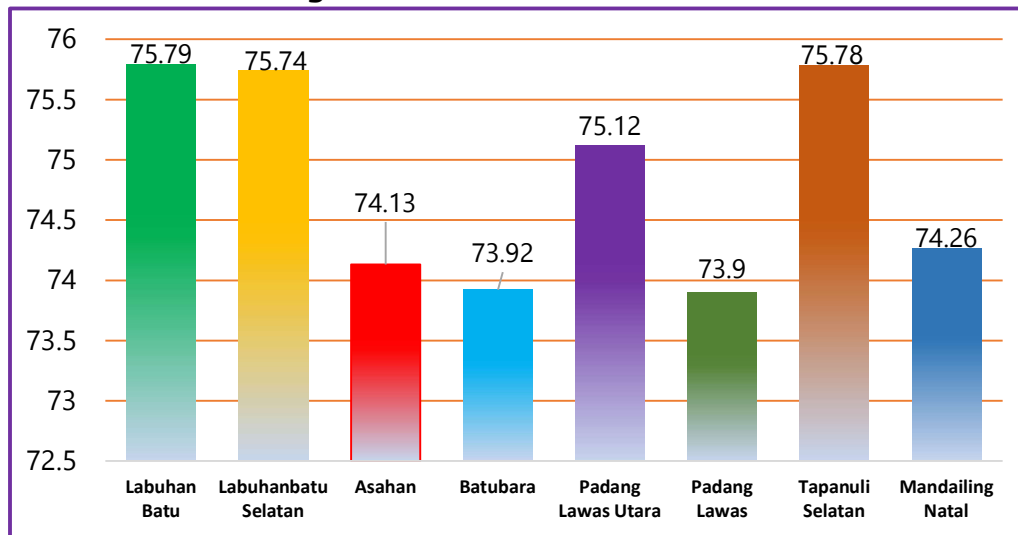
Gambar 1.10.
Laju Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Peningkatan nilai IPM tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami perbaikan baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak. Kenaikan ini juga mengindikasikan bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk. Secara umum tren peningkatan IPM ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu selama periode tersebut.

Secara sektoral nilai IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Labuhanbatu Selatan (75,74), Kabupaten Asahan (75,13), Kabupaten Batu Bara (73,92), Kabupaten Padang Lawas Utara (75,12), Kabupaten Padang Lawas (73,90), Kabupaten Tapanuli Selatan (75,78), dan Kabupaten Mandailing Natal (74,26). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga, yang mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Adapun perbandingan nilai IPM antar kabupaten tersebut dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 1.11.
Komparasi IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
dengan Pemerintah Daerah Sekitar



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara.

Secara umum capaian IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 menunjukkan posisi yang cukup baik dalam menggambarkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pembangunan yang dilakukan khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup masyarakat, telah memberikan hasil yang positif.

1.6. Kondisi Pemerintahan

1.6.1. Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, terutama melalui penerapan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) yang disesuaikan dengan beban kerja serta kondisi nyata pada masing-masing daerah. Kebijakan ini bertujuan agar struktur organisasi perangkat daerah dapat dibentuk secara lebih rasional, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih optimal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan

pemerintahan wajib selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan optimal.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan inspektorat tipe A;
4. Dinas Pendidikan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
5. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Dinas Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan;
11. Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Tenaga Kerja tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, pembinaan pedagang, sarana prasarana perdagangan dan perindustrian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. Dinas Pangan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
23. Dinas Pertanian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
24. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
25. Dinas Peternakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
26. Dinas Pertanahan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
27. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan

ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran;

Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana; dan
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Bilah Hulu dengan tipe A (terdiri atas 24 desa);
2. Kecamatan Bilah Barat dengan tipe A (terdiri atas 10 desa);
3. Kecamatan Bilah Hilir dengan tipe A (terdiri atas 11 desa dan 2 kelurahan);
4. Kecamatan Pangkatan dengan tipe A (terdiri atas 7 desa);
5. Kecamatan Panai Hulu dengan tipe A (terdiri atas 7 desa);
6. Kecamatan Panai Tengah dengan tipe A (terdiri atas 9 desa dan 1 kelurahan);
7. Kecamatan Panai Hilir dengan tipe A (terdiri atas 7 desa dan 1 kelurahan);
8. Kecamatan Rantau Utara dengan tipe A (terdiri atas 10 kelurahan);
9. Kecamatan Rantau Selatan dengan tipe A (terdiri atas 9 kelurahan).

Melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 telah dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Rantauprapat. UPTD bersifat khusus ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

1.6.2. Sumber Daya Aparatur

Keadaan aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2025 berjumlah 4.026 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur tersebut tersebar pada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah, termasuk 9 (sembilan) kecamatan yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangan serta bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaran aparatur ini menjadi salah satu modal penting dalam memastikan terlaksananya roda pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan berkesinambungan.

Secara statistik, komposisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh perempuan sebanyak 2.681 orang (66,59%), sedangkan laki-laki berjumlah 1.345 orang (33,41%). Dari sisi jabatan, struktur kepegawaian secara umum didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 2.685 orang (66,69%), dengan populasi terbesar berada pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang mencerminkan besarnya kebutuhan tenaga profesional pada sektor pelayanan dasar. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas PNS merupakan lulusan Strata 1 (S-1) dengan jumlah 2.579 orang (64,06%), sedangkan jumlah paling sedikit berasal dari lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 12 orang (0,30%). Komposisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur secara umum telah didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi, yang diharapkan mampu mendukung peningkatan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik.

Komposisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang didominasi oleh perempuan menunjukkan adanya pergeseran peran gender dalam birokrasi di mana perempuan semakin mengambil bagian strategis dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja formal tetapi juga menunjukkan bahwa sektor pemerintahan telah menjadi ruang yang inklusif dan memberikan kesempatan yang relatif setara. Kondisi ini berpotensi memberikan nilai tambah, khususnya dalam pendekatan pelayanan yang lebih responsif, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Gambar 1.12.
Statistik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

STATISTIK PNS KABUPATEN LABUHANBATU

4.026

**JUMLAH PNS
PER 31 DESEMBER 2025**



Golongan	Pria	Wanita	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan IV	261	484	745	18.50
Golongan III	862	2.045	2.907	72.21
Golongan II	211	152	363	9.02
Golongan I	11	0	11	0.27
Jumlah	1.345	2.681	4.026	100.00

Eselon	Pria	Wanita	Jumlah	Proporsi (%)	Pendi-dikan	Pria	Wanita	Jumlah	Proporsi (%)
II/a	1	0	1	0.02	S-2	195	224	419	10.41
II/b	34	4	38	0.94	S-1	738	1841	2.579	64.06
III/a	40	15	55	1.37	D-4	23	30	53	1.32
III/b	49	41	90	2.24	D-3	92	394	486	12.07
IV/a	68	50	118	2.93	D-2	11	10	21	0.52
IV/b	33	34	67	1.66	D-1	1	10	11	0.27
Fungsional	569	2.116	2.685	66.69	SLTA	265	167	432	10.73
Pelaksana	551	421	972	24.14	SLTP	10	3	13	0.32
Jumlah	1.345	2.681	4.026	100.00	SD	10	2	12	0.30
Jumlah						1.345	2.681	4.026	100.00

Sumber : BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat teknis dan profesional, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengalokasikan PNS dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang tersebar di hampir seluruh perangkat daerah. Keberadaan jabatan fungsional tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun sebaran jabatan fungsional tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.11.
Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Nama Jabatan Fungsional	Fungsional (orang)		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Perencana	10	9	19
2	Analisis Kebijakan	19	18	37
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	5	6
4	Penyuluh Hukum	0	0	0
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8	0	8
6	Auditor	15	13	28
7	P2UPD	6	7	13
8	Guru	256	1.019	1.275
9	Pamong Pelajar	0	1	1
10	Pengawas Sekolah	8	4	12
11	Penilik	2	0	2
12	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	0	0	0
13	Dokter Spesialis	15	13	28
14	Dokter Umum	11	48	59
15	Dokter Gigi	2	10	12
16	Bidan	0	376	376
17	Perawat	76	276	352
18	Perawat Gigi	1	9	10
19	Apoteker	3	18	21
20	Asisten Apoteker	0	13	13
21	Fisioterapi	3	4	7
22	Nutrisi	0	15	15
23	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	15	60	75
24	Perekam Medis	3	8	11
25	Pranata Laboratorium Kesehatan	3	24	27
26	Radiografer	3	7	10
27	Sanitarian	0	7	7
28	Pembimbing Kesehatan Kerja	1	1	2
29	Epidemiolog Kesehatan	1	0	1
30	Administrator Kesehatan	2	4	6
31	Refraksionis Optisien	0	1	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Fungsional (orang)		
		Pria	Wanita	Jumlah
32	Psikolog Klinis	0	1	1
33	Pengelola Sumber Daya Air	9	0	9
34	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	2	3	5
35	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	0	0	0
36	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	1	0	1
37	Pembina Jasa Konstruksi	5	1	6
38	Penata Ruang	2	3	5
39	Polisi Pamong Praja	7	3	10
40	Penggerak Swadaya Masyarakat	1	7	8
41	Penyuluh Sosial	0	5	5
42	Instruktur	1	1	2
43	Pengantar Kerja	1	0	1
44	Mediator Hubungan Industrial	0	2	2
45	Pengendali Dampak Lingkungan	2	4	6
46	Pengawas Lingkungan Hidup	0	1	1
47	Penyuluh Lingkungan Hidu	0	1	1
48	Administrator Database Kependudukan	3	5	8
49	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	7	7
50	Penguji Kendaraan Bermotor	4		4
51	Pranata Komputer	10	8	18
52	Pranata Hubungan Masyarakat	2	2	4
53	Asisten Statistisi	2	1	3
54	Sandiman	1	3	4
55	Pengawas Koperasi	1	4	5
56	Pamong Budaya	1	3	4
57	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	5	6
58	Pustakawan	2	1	3
59	Arsiparis	0	1	1
60	Penyuluh Pertanian	20	29	49
61	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1	1	2
62	Analisis Ketahanan Pangan	1	2	3
63	Pengawas Perikanan	1	0	1
64	Analisis Pasar Hasil Perikanan	1	2	3

No	Nama Jabatan Fungsional	Fungsional (orang)		
		Pria	Wanita	Jumlah
65	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	0	2	2
66	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	1	0	1
67	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	0	1	1
68	Pengawas Mutu Pakan	0	1	1
69	Pengawas Benih Tanaman	0	1	1
70	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	1	2
71	Analisis Pasar Hasil Pertanian	0	4	4
72	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	0	1	1
73	Pengawas Kemetorologian	0	1	1
74	Pengawas Perdagangan	0	0	0
75	Asesor Manajemen Mutu Industri	0	0	0
76	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	5	10
77	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	1	2	3
78	Analisis Pemanfaatan IPTEK	1	3	4
79	Peneliti	2	3	5
80	Penata Penanggulangan Bencana	1	4	5
81	Analisis Hukum	0	1	1
82	Pengawas Penyelenggaraan Urusan	5	8	13
83	Pemerintahan di Daerah	1	0	1
84	Teknik Jalan dan Jembatan	1	0	1
85	Teknik Pengairan	2	1	3
86	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	2	1	3
Jumlah		569	2.116	2.685

Sumber : BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu beberapa ASN juga telah diangkat menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan regulasi penyetaraan jabatan yang berlaku secara nasional. Penyetaraan tersebut dilakukan terhadap jabatan struktural eselon IV dan khusus eselon III yang terdapat pada seluruh bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PMPTSP) sebagai bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

1.6.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang Dihadapi Organisasi

Beberapa permasalahan/isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 diantaranya adalah :

- Belum optimalnya pengembangan aparatur yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan antara lain melalui restrukturisasi kelembagaan, penataan kewenangan, penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan publik.
- Kompetensi sumber daya manusia aparatur masih belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan organisasi khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta tuntutan profesionalisme birokrasi.
- Fungsi pengawasan internal pemerintah daerah masih perlu diperkuat, baik dari aspek sistem pengendalian internal, kapasitas aparatur pengawasan, maupun efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- Kemampuan fiskal daerah yang relatif terbatas sehingga berdampak pada keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan yang bersifat prioritas dan strategis.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.

- Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berbagai isu strategis tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.s



Pelaksanaan upacara penaikan bendera pada HUT RI ke-80 Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan yang disusun secara cermat dan berorientasi strategis menjadi prasyarat bagi instansi pemerintah untuk merespons secara adaptif dinamika lingkungan strategis, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global, sekaligus memastikan seluruh proses pembangunan tetap berada dalam koridor sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang terarah, terpadu, dan sinergis, instansi pemerintah mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi daerah, peluang pembangunan, serta berbagai tantangan yang dihadapi, sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam implementasi SAKIP, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu secara konsisten menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan sebagai landasan pencapaian kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 menjadi pijakan strategis yang secara komprehensif memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented) yang hendak dicapai dalam periode tertentu, dengan mempertimbangkan secara komprehensif potensi yang dimiliki daerah, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta berbagai kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi. Perencanaan kinerja dimaknai sebagai rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah, yang selanjutnya diimplementasikan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah secara terukur, sistematis, dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026 disusun secara sistematis dengan menempatkan isu-isu strategis lokal sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Isu-isu tersebut diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan RPJMD dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu pada setiap tahun anggaran.

Sebagai landasan hukum dan komitmen penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Berkenaan dengan hal tersebut, berikut disajikan secara ringkas pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten

Labuhanbatu Tahun 2025–2029 sebagai acuan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum yang menggambarkan kondisi ideal dan arah masa depan daerah yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam dokumen RPJMD, visi mencerminkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyusunan visi Kepala Daerah berorientasi pada keselarasan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mencerminkan kondisi masa depan Kabupaten Labuhanbatu yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu periode 2025–2029.

Visi tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan arah, tetapi juga sebagai landasan strategis untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang memerlukan penanganan dalam jangka menengah. Oleh karena itu, visi dirumuskan secara komprehensif dan berkesinambungan, serta diselaraskan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan terpadu dan berorientasi pada hasil.

Visi Kabupaten Labuhanbatu untuk periode perencanaan tahun 2025–2029 dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

LABUHANBATU CERDAS BERSINAR

Pernyataan visi tersebut diatas adalah merupakan satu kalimat yang utuh dan berkesinambungan, yang berarti :

Cerdas	Merupakan singkatan dari Cepat Elegan Responsif Demokratis Adaptif, Sinergis. Kabupaten Labuhanbatu sangat responsif dalam menghadapi perubahan yang ada
---------------	--

	serta mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat serta menerima segala aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh rakyat dan bertindak cepat dalam memajukan daerah
Bersinar	Berarti terbit/muncul setelah redup cahaya yang menerangi Labuhanbatu secara spontan dan mampu memberi energi bagi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan dari yang seharusnya dapat dicapai

2.1.2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, disusun misi sebagai rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dimaksud. Misi merupakan penjabaran dari visi yang menggambarkan arah tindakan serta tahapan utama yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perumusan misi dimaksudkan untuk memberikan kerangka yang jelas bagi penetapan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menentukan strategi dan jalur pencapaian visi secara terencana dan terukur. Misi disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik faktor internal maupun eksternal, serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan demikian, misi berfungsi sebagai pedoman operasional yang memperjelas langkah-langkah pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan dalam mewujudkan visi Kabupaten Labuhanbatu. Adapun misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

PERTAMA	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua
KEDUA	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan
KETIGA	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

KEEMPAT	Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya
KELIMA	Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik
KEENAM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana
KETUJUH	Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Tujuan menjadi penjabaran lebih lanjut dari misi serta berfungsi sebagai arah pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh selama periode perencanaan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja sasaran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perumusan sasaran dilakukan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu (*specific, measurable, Achievable, realistic, dan time-bound*) sesuai dengan prinsip SMART, sehingga tingkat pencapaiannya dapat diukur secara periodik, baik tahunan maupun kumulatif dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan tujuh misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua	
Tujuan :	Sasaran :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
	2. Meningkatkan literasi masyarakat
	3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing

Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Misi II: Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan

Tujuan :	Sasaran :
Meningkatkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Misi III : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan :	Sasaran :
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital 2. Terwujudnya profesionalitas ASN 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Misi IV : Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya

Tujuan :	Sasaran :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	1. Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal) 2. Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal
2. Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	1. Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal) 2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat 3. Terwujudnya keluarga yang berkualitas 4. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak 5. Terwujudnya berkebudayaan maju

Misi V : Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik

Tujuan :	Sasaran :
Meningkatkan desa mandiri	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan petani 2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan
Menurunkan luas kawasan kumuh	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Misi VI: Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana

Tujuan :	Sasaran :
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 2. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau 3. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup 4. Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan 5. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana

Misi VII: Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata

Tujuan :	Sasaran :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian 2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya daya saing industri 4. Meningkatnya nilai tambah perdagangan
Meningkatkan daya saing daerah	1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif 2. Meningkatnya kapasitas inovasi daerah 3. Meningkatnya literasi digital masyarakat

	4. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
--	--

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi merupakan komponen kunci dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah karena berfungsi sebagai rujukan utama dalam *strategy-focused management*. Rumusan strategi pada dasarnya adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai melalui pendekatan yang terarah, terukur, dan konsisten, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam serangkaian arah kebijakan sebagai pedoman operasionalnya. Dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah, strategi diposisikan dalam dua tingkatan, yaitu perencanaan strategis yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta perencanaan operasional yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada setiap urusan pemerintahan. Melalui struktur tersebut, perencanaan berfungsi menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang bersifat *actionable* dan dapat diukur. Setiap kebijakan, program, atau kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dikategorikan sebagai unsur strategis.

Selain strategi, penetapan arah kebijakan merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa strategi yang dipilih memiliki fokus, konsistensi, dan relevansi terhadap tujuan pembangunan dalam rentang lima tahun. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan implementasi strategi agar tetap berada dalam koridor prioritas pembangunan serta selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan membentuk satu kesatuan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengupayakan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan target kinerja RPJMD secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu serta penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara, dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tema pembangunan tahunan

yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun anggaran.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dirumuskan secara lebih teknokratis yang menegaskan orientasi prioritas pembangunan setiap tahun anggaran. Tema pembangunan tahunan tersebut berfungsi sebagai kristalisasi fokus strategis pemerintah daerah dalam mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan berjalan secara konsisten, terarah, dan responsif terhadap dinamika isu strategis daerah. Melalui tema pembangunan tahunan inilah arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu memperoleh penekanan yang lebih operasional, progresif, dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Tema Pembangunan/arah kebijakan perencanaan pembangunan per tahun Kabupaten Labuhanbatu dapat dijabarkan dengan tema-tema per tahun sebagai berikut :

1. Tahap I Tahun 2026
Kolaborasi dan Inovasi membangun desa menata kota menuju Labuhanbatu Cerdas Bersinar.
2. Tahap II Tahun 2027
Peningkatan SDM berkualitas dan inovasi daerah menuju pembangunan berdaya saing.
3. Tahap III Tahun 2028
Pengoptimalan tata kelola pemerintahan dan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat.
4. Tahap IV Tahun 2029
Akselerasi pembangunan menuju Labuhanbatu Cerdas Bersinar.
5. Tahap V Tahun 2030
Penguatan pembangunan dalam mengoptimalkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar dan transisi kepemimpinan daerah yang berkelanjutan.

Perencanaan strategik pada bagian ini dijabarkan secara lebih terstruktur ke dalam Misi I sampai dengan Misi VII yang masing-masing dirumuskan berdasarkan keterkaitan logis antara strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penjabaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap misi memiliki landasan strategis yang jelas, konsisten dengan tujuan dan sasaran RPJMD, serta mampu mengarahkan

perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang relevan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Melalui pendekatan tersebut keseluruhan strategi dan arah kebijakan dapat diterjemahkan secara sistematis ke dalam kerangka operasional pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Penguatan kompetensi guru bersertifikat di seluruh Kabupaten
		Pemberian insentif berbasis kinerja dan insentif bagi guru yang mau bekerja membangun di wilayah terpencil
		Penguatan peran keluarga dalam mendukung pembelajaran anak di luar sekolah
Meningkatkan literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Peningkatan akses literasi masyarakat melalui pojok baca di berbagai wilayah strategis
		Penguatan literasi digital dan aset buku digital daerah untuk mempermudah perolehan informasi dan meningkatkan minat baca
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Memperkuat kualitas dan akses layanan primer kepada seluruh masyarakat	Pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh tingkatan masyarakat tidak perlu jauh untuk berobat
		Perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat dan gratis
	Membangun perilaku preventif terhadap penyakit	Peningkatan cakupan imunisasi dan gizi cukup khususnya ibu dan anak

		Penguatan perilaku hidup bersih dan sehat
Tujuan 2 : Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing		
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Mendorong perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Industri, UMKM dan wirausaha melalui akses permodalan dan kemudahan berusaha
		Penguatan balai latihan kerja yang inklusif kepada seluruh masyarakat termasuk disabilitas
		Penguatan sektor padat karya berbasis keunggulan lokal

Misi II : Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat		
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Memperkuat ketersediaan pangan masyarakat yang stabil dan terjangkau serta terdiversifikasi	Peningkatan produktivitas pertanian pangan utama
		Penguatan pemahaman masyarakat melalui diversifikasi pangan utama
		Peningkatan distribusi dan penyimpanan pangan untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan

Misi III : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat		
Terwujudnya tataelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dalam layanan publik	Penerapan penuh SPBE terintegrasi pada seluruh organisasi perangkat daerah
		Pengembangan platform terpadu untuk digitalisasi pelayanan

		publik dan administrasi pemerintahan
		Penguatan kapasitas digital SDM di lingkungan birokrasi
Terwujudnya profesionalitas ASN	Mendorong integritas dan akuntabilitas ASN disertai dengan pengendalian internal	Penerapan SPIP secara menyeluruh dan terkendali
		Perwujudan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan pemerintahan
		Pengoptimalan peran APIP dalam audit kinerja
	Mengoptimalkan transformasi manajemen ASN berbasis meritokrasi yang disertai dengan pengembangan kompetensi	Penguatan budaya kerja produktif, inovatif yang berorientasi pada pelayanan Penguatan sistem rekrutmen sampai penilaian kerja berbasis merit
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Memperkuat sistem perencanaan berbasis data	Penguatan perencanaan terintegrasi pada setiap dokumen perencanaan
		Peningkatan kualitas dan basis data untuk pembangunan daerah
	Memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti	Penguatan perencanaan melalui integrasi partisipatif dan kemampuan daerah
		Penguatan perencanaan daerah melalui kolaborasi lintas stakeholder

Misi IV : Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial		
Meningkatnya kesejahteraan	Meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja terutama pada	Penyediaan insentif untuk perlindungan pekerja sektor informal

pekerja rentan (sektor informal)	sektor informal dengan melibatkan dunia usaha	Pemberian fasilitas kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal
		Pengedukasian pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh komunitas pekerja informal
Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Memperkuat inklusivitas dan pemberdayaan ekonomi bagi para penyandang disabilitas	Pemberian pelatihan keterampilan vokasional siap kerja yang sesuai dengan penyandang disabilitas
		Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang memberikan fasilitas layanan disabilitas menyeluruh
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya		
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Memperkuat ketahanan keluarga hingga masyakat melalui konseling	Penguatan kembali peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
		Pemberian fasilitas layanan konseling keluarga dan masyarakat
		Pengembangan pendidikan berkarakter serta kesehatan tingkat keluarga
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Memperkuat norma dan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Penyelenggaraan forum-forum kemasyarakatan lintas agama dan budaya
		Penguatan peran sikamling dalam keamanan lingkungan
		Pengoptimalan penerangan jalan di seluruh daerah kabupaten
Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Memperkuat keluarga melalui edukasi berkala	Penguatan penyelenggaraan bina keluarga sehat melalui layanan pra dan pasca nikah

		Pelayanan terpadu bagi kesehatan keluarga melalui KB
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Memperkuat pelayanan berkesetaraan gender dan memberikan perlindungan anak dalam pelayanan publik	Pengembangan Kabupaten Layan Anak
		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan politik
		Perlindungan inklusif kepada anak
Terwujudnya berkebudayaan maju	Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam ekonomi dan pembangunan	Pendataan dan perlindungan warisan budaya lokal
		Pemberdayaan komunitas budaya lokal agar lebih produktif dalam pembangunan
		Penguatan festival budaya daerah
		Pengintegrasian budaya berkarakter dalam kurikulum sekolah

Misi V : Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan desa mandiri		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Memperkuat kapasitas desa dalam tata kelola dan pembangunan berbasis potensi desa	Penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes
		Penguatan ketahanan sosial dan budaya melalui nilai-nilai gotong royong
		Penguatan tata kelola serta kelembagaan desa
Tujuan 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat		
Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta akses pasar bagi petani	Penguatan sistem pertanian terintegrasi di daerah
		Penguatan hilirisasi serta akses pasar yang lebih baik bagi petani
		Peningkatan kapasitas kelompok tani dan

		koperasi tani dalam mengelola lahan pertanian
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta akses pasar bagi nelayan	Penguatan dukungan sarana dan prasarana perikanan modern yang lebih modern dan terintegrasi dalam rantai pasokan
		Penguatan nilai tambah melalui produk olahan ikan bersama UMKM
Tujuan 3 : Menurunkan luas kawasan kumuh		
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Menyediakan layanan dan kualitas infrastruktur yang inklusif bersama pemerintah dan masyarakat	Penataan permukiman berbasis kawasan yang memenuhi infrastruktur dasar
		Pengembangan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Misi VI : Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatkan kualitas dan ketercakupn infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan	Perawatan dan pembangunan jalan yang membangun konektivitas seluruh desa
		Pemerataan akses sanitasi dan air bersih kepada seluruh masyarakat
		Penguatan ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi yang menyeluruh
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan sistem transportasi publik aman dan ramah lingkungan	Pengintegrasian sistem transportasi wilayah menuju stasiun kereta api
		Pengoptimalan tertib lalu lintas kota

		Pengembangan halte (bus stop) untuk mengoptimalkan layanan transportasi
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Memperkuat sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan persampahan terpadu
		Pengoptimalan kawasan ruang terbuka hijau fungsional
		Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah)
Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Memperkuat pemanfaatan EBT dalam aktivitas strategis daerah	Penguatan peran masyarakat dan UMKM dalam menggunakan EBT di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu
		Pengembangan PLTS untuk kebutuhan energi masyarakat dan publik
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Memperkuat pengembangan infrastruktur daerah berketahanan lingkungan dan tangguh bencana	Penguatan infrastruktur daerah peringatan dini bencana
		Pengembangan peta risiko bencana daerah

Misi VII : Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM	Penguatan keterampilan digitalisasi UMKM menuju pasar yang lebih luas
		Pengintegrasian UMKM dalam rantai pasokan industri dan kepariwisataan daerah
		Pengembangan pusat promosi UMKM dengan kolaborasi lintas sektor
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi wisata unggulan

	berbasis keunggulan lokal	Penguatan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat ramah wisata
		Penguatan kebudayaan melalui museum budaya dengan potensi ekonomi kreatif
Meningkatnya daya saing industri	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri berkeunggulan lokal	Penguatan sistem logistik dan distribusi bahan baku untuk industri
		Pengembangan IKM berbasis kawasan dan keunggulan daerah
Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Mengembangkan sistem perdagangan daerah yang efisien, inovatif dan berorientasi ekspor	Penguatan sistem informasi harga dan distribusi untuk stabilitas dan efisiensi pasar
		Penguatan kerjasama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing daerah		
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di daerah	Promosi potensi investasi melalui katalog investasi daerah
		Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor terutama yang memberdayakan sektor unggulan dan tenaga kerja lokal
Meningkatnya kapasitas inovasi daerah	Memperkuat kapasitas dan ekosistem inovasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemberian insentif dan penghargaan bagi perangkat daerah yang menghasilkan inovasi unggul
		Pengembangan pusat inovasi daerah untuk membangun kolaborasi kreatif bersama dunia usaha, komunitas dan akademisi
Meningkatnya literasi digital masyarakat	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital	Pengembangan pusat belajar digital berbasis komunitas mulai tingkat desa

		Pengintegrasian layanan publik digital yang mudah diakses masyarakat
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Memberdayakan pemuda sebagai pembawa perubahan serta prestasi pemuda	Pemberian kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda
		Penguatan fasilitas olahraga serta kelompok olahraga untuk memperkuat prestasi daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan indikator kinerja menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan pengukuran kinerja instansi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria berupa target kinerja yang telah ditetapkan, yang mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan 13 (tiga belas) IKU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029. Setiap IKU memiliki target kinerja tahunan, dan pada tahun terakhir periode RPJMD ditetapkan sebagai target akhir yang harus dicapai serta menjadi ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia
3	"Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan	Persentase Penduduk Miskin
4	perlindungan sosial"	Indeks Daya Saing Daerah
5	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Pertumbuhan Ekonomi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
6	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Ketahanan Pangan
7	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Infrastruktur
8	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Risiko Bencana
9	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Tingkat Pengangguran Terbuka
10	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Indeks Desa Membangun
11	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	PDRB Perkapita
12	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik
13	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Kerukunan Umat Beragama

2.3. *Cascading Kinerja, Pohon Kinerja, dan Crosscutting Program*

Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, diperlukan penjabaran arah pembangunan ke dalam bagan alir kinerja (*cascading*) yang disusun secara berjenjang dan selaras, dengan memperhatikan hubungan kausalitas dan alignment antar tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja utama daerah dapat terukur, sistematis, dan tepat sasaran.

Dengan diterapkannya *cascading kinerja*, dapat ditetapkan prioritas program pembangunan daerah beserta sasaran yang ingin dicapai serta strategi yang cepat dan efektif dalam mewujudkan kinerja lintas instansi dan lintas fungsi, yang selanjutnya digambarkan melalui pola rencana kinerja Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana tercantum dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah.

Selain *cascading kinerja*, dikenal pula istilah *pohon kinerja*. *Pohon kinerja* mengadaptasi konsep analisis pohon masalah (*problem tree analysis*) atau *tree diagram*, yaitu suatu metode analisis yang digunakan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan atau isu. Melalui analisis pohon masalah, organisasi dapat menentukan prioritas permasalahan secara lebih sistematis. Dalam konteks *pohon kinerja*, proses

perincian atau spesifikasi penyebab masalah dialihkan menjadi rumusan kinerja. Sejalan dengan proses cascading, tahapan awal dalam penyusunan pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawab kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Kepala Daerah (Bupati) pada tahun yang sama. Selanjutnya dilakukan identifikasi indikator kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang pejabat administrator (eselon III), pejabat pengawas (eselon IV), serta pejabat fungsional dan pelaksana sehingga terbentuk keterkaitan kinerja yang berjenjang dan selaras dalam pencapaian kinerja organisasi.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui optimalisasi anggaran, dilakukan berbagai upaya antara lain penyempurnaan *cascading* kinerja hingga tingkat individu, pencapaian target kinerja pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah (*crosscutting program*), pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sehingga berdasarkan hal tersebut disusun crosscutting program sebagai instrumen pencapaian target efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Peta proses bisnis merupakan representasi visual yang menggambarkan keterkaitan, alur, dan hubungan kerja yang efektif serta efisien antar unit organisasi dalam menghasilkan kinerja yang selaras dengan tujuan pendirian organisasi, sehingga mampu menciptakan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Keberadaan peta proses bisnis menjadi instrumen strategis dalam memahami keseluruhan rantai proses organisasi, mengidentifikasi potensi permasalahan, tumpang tindih kewenangan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan proses kerja, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan solusi penyempurnaan proses secara terarah, terstandar, dan berkelanjutan. Selain itu, peta proses bisnis berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan yang konsisten, meningkatkan keterkendalian proses, serta memudahkan pengendalian mutu dan evaluasi kinerja organisasi secara sistematis dan akuntabel.

2.5. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang selanjutnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan secara simultan dengan proses perumusan kebijakan anggaran dan menjadi bentuk komitmen kinerja instansi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode satu tahun anggaran. Dalam rencana kinerja tersebut ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun berjalan, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang memuat target capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Satuan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	63.79	poin
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75.28	poin
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan	Persentase Penduduk Miskin	6.00	persen
4	perlindungan sosial"	Indeks Daya Saing Daerah	3.50	poin
5	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Pertumbuhan Ekonomi	5.46	persen
6	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Ketahanan Pangan	78.50	poin
7	Meningkatkan ketersediaan dan	Indeks Infrastruktur	67.09	poin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Satuan
	cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau			
8	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Risiko Bencana	121.05	poin
9	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.50	persen
10	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Indeks Desa Membangun	0.7188	poin
11	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	PDRB Perkapita	100.65	Juta Rupiah
12	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	3.92	poin
13	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Kerukunan Umat Beragama	82.21	poin

Mengacu pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan tema "Percepatan Peningkatan Kualitas Pembangunan berkelanjutan" telah ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur serta percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.
5. Peningkatan pelayanan publik dan perlindungan sosial.

Mengacu pada prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah program-program prioritas sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian rencana pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 yang disusun secara sistematis dan terukur guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Program-Program Prioritas Pendukung Rencana Kinerja Tahunan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025

No	Program-Program Prioritas
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
12	Program Pengembangan Permukiman
13	Program Penataan Bangunan Gedung
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
15	Program Penyelenggaraan Jalan
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
18	Program Pengembangan Perumahan
19	Program Kawasan Permukiman
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22	Program Penanggulangan Bencana
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
24	Program Pemberdayaan Sosial
25	Program Rehabilitasi Sosial
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
27	Program Penanganan Bencana
28	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
29	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
30	Program Penempatan Tenaga Kerja
31	Program Hubungan Industrial
32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
33	Program Perlindungan Perempuan
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
36	Program Perlindungan Khusus Anak
37	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

No	Program-Program Prioritas
38	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
39	Program Penanganan Kerawanan Pangan
40	Program Pengawasan Keamanan Pangan
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
42	Program Penatagunaan Tanah
43	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
44	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
45	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
46	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
47	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48	Program Pengelolaan Persampahan
49	Program Pendaftaran Penduduk
50	Program Pencatatan Sipil
51	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
52	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
53	Program Administrasi Pemerintahan Desa
54	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
55	Program Pengendalian Penduduk
56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
57	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
59	Program Pengelolaan Pelayaran
60	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
61	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
62	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
63	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
64	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
65	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
66	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)
67	Program Promosi Penanaman Modal
68	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
71	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
72	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
73	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
74	Program Pengembangan Kebudayaan
75	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
76	Program Pembinaan Perpustakaan

No	Program-Program Prioritas
77	Program Pengelolaan Arsip
78	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
79	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
80	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
81	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
82	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
83	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
84	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
85	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
87	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
88	Program Penyuluhan Pertanian
89	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
91	Program Pengembangan Ekspor
92	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
93	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
94	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
95	Program Pengendalian Izin Usaha
96	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
98	Program Perekonomian dan Pembangunan
99	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
105	Program Kepegawaian Daerah
106	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
107	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
112	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
113	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
115	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
116	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

No	Program-Program Prioritas
117	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
118	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program-program prioritas yang mendukung rencana kinerja tahunan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam RKPD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya setelah dokumen anggaran tersebut ditetapkan dan diundangkan akan disusun naskah Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2.6. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, dan dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu beserta perubahannya maka telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025. Dokumen tersebut merupakan bentuk komitmen kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan target pembangunan daerah dan telah ditandatangani oleh Bupati Labuhanbatu sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, melainkan sebagai proses strategis yang diarahkan untuk menghadirkan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, program, kegiatan, serta sumber daya anggaran ditempatkan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang secara sistematis dimobilisasi untuk mewujudkan rumusan perubahan pada tingkat keluaran, hasil, hingga dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas menjadi pilar fundamental yang merefleksikan sejauh mana instansi pemerintah mampu menunaikan tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang efektif dan berdampak langsung. Oleh karena itu, pengendalian pelaksanaan serta pertanggungjawaban program dan kegiatan merupakan prasyarat esensial untuk memastikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak hanya dilaporkan secara administratif, tetapi juga terbukti secara substantif di hadapan publik.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai pengemban amanah masyarakat menyelenggarakan kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara transparan dan terukur. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu merupakan wujud komitmen tersebut, yang disajikan secara sistematis sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Nilai kinerja organisasi

merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

Hasil nilai kinerja organisasi dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian berikut :

Tabel 3.1.
Predikat Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi	Predikat Kinerja Organisasi
$X > 100$	Istimewa
$80 \% < X \leq 100 \%$	Baik
$60 \% < X \leq 80 \%$	Butuh Perbaikan
$20 \% < X \leq 60 \%$	Kurang
$0 \% < X \leq 20 \%$	Sangat Kurang

Sumber : KemenPANRB.

Selanjutnya, setiap predikat kinerja organisasi memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Interpretasi Predikat Kinerja Organisasi

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
Istimewa 	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
Baik 	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
Butuh Perbaikan 	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
Kurang 	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
Sangat Kurang 	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh, dengan hasil pengukuran atas seluruh indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja instansi.

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	1	Belum dirilis	-
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1	100,68	Istimewa
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	1	81,41	Baik
4	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	1	99,14	Baik
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	76,56	Butuh perbaikan

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian (%)	Predikat Kinerja
6	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1	98,54	Baik
7	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1	84,78	Baik
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	1	69,10	Butuh perbaikan
9	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1	99,46	Baik
10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	1	Belum dirilis	-
11	Meningkatkan pendapatan masyarakat	1	103,36	Istimewa
12	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	1	96,68	Baik
13	Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	1	100,00	Baik
Jumlah		13		

Pencapaian kinerja dimaksud selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori capaian kinerja sebagai dasar analisis tingkat keberhasilan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Predikat Kinerja Organisasi Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Predikat Kinerja	Jumlah IKU	Kategori Capaian (%)
1	Istimewa	2	15,38
2	Baik	7	53,85
3	Butuh Perbaikan	2	15,38
4	Kurang	-	-
5	Sangat Kurang	-	-
6	Hasilnya belum diketahui	2	15,38
Jumlah		13	100,00

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Digital

Hasil pengukuran sasaran strategis 1 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital pada tahun 2025 dengan capaian kinerja belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI yang direncanakan akan diterbitkan pada awal tahun 2026. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan, evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pendekatan general dan tematik diposisikan sebagai dua poros penilaian yang tidak terpisahkan, melainkan saling menguatkan dalam membangun gambaran utuh tingkat kemajuan reformasi birokrasi. Pendekatan general menegaskan derajat kematangan tata kelola melalui pengukuran sistemik atas delapan area perubahan sebagai fondasi kelembagaan, sementara pendekatan tematik mengartikulasikan dimensi hasil dengan menilai efektivitas implementasi kebijakan prioritas yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi. Interelasi keduanya menghadirkan konstruksi evaluatif yang tidak semata-mata menilai kepatuhan prosedural, tetapi juga menimbang relevansi, konsistensi, dan daya ungkit kebijakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan birokrasi. Dengan demikian, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperoleh makna strategis sebagai instrumen reflektif sekaligus arah kebijakan dalam memperkuat integritas tata kelola, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan keberlanjutan transformasi birokrasi yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Mulai tahun 2023 pengukuran Indeks RB telah berubah dengan menggunakan instrumen Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penekanan mendasar dari perubahan tersebut adalah penekanan pada reformasi reformasi berdampak dan kolaboratif. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan RB dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya kerja birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Pada evaluasi ini terdapat 2 (dua) komponen pengukuran yaitu RB General dan RB Tematik. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi sedangkan RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. RB General dievaluasi oleh Evaluator Meso yang merupakan kementerian/lembaga yang memiliki

peran, tugas, dan fungsi untuk mengukur dan menilai perkembangan aspek-aspek terkait reformasi birokrasi dan merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi. Adapun indikator pada RB General adalah Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (oleh Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian Dalam Negeri), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana), Transformasi Layanan Digital (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik), Tingkat Maturitas SPIP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan), Nilai SAKIP (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan), Indeks Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/BAPPENAS), Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian/Lembaga teknis terkait), Tingkat Digitalisasi Arsip (Arsip Nasional RI), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Kementerian Keuangan), Indeks Pengelolaan Aset (Kementerian Keuangan), Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik), Indeks Kualitas Kebijakan (Lembaga Administrasi Negara), Indeks Reformasi Hukum (Kementerian Hukum dan HAM), Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Badan Pusat Statistik), Indeks Tata Kelola Pengadaan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Indeks Sistem Merit (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara), Indeks Pelayanan Publik (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik), Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombudsman RI), Indeks SPBE (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana), Survei Penilaian Integritas (Komisi Pemberantasan Korupsi), Survei Kepuasan Masyarakat (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik), dan Indeks BerAKHLAK (Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur).

Pada tahun 2025 RB Tematik dengan tema secara langsung mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan transformasi layanan dasar (pendidikan dan kesehatan).

Tingkat pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan derajat kemajuan transformasi tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Uraian komprehensif atas capaian dimaksud disajikan pada tabel berikut sebagai dasar penilaian kinerja dan arah perbaikan kebijakan.

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Kinerja (indeks)	n/a	50,50 ("CC")	52,50 ("CC")	55,00 ("CC")	63,79 ("B")
2	Realisasi Kinerja (indeks)	48,56 ("C")	49,80 ("C")	56,33 ("CC")	61,81 ("B")	Belum dirilis oleh Kemen PANRB
3	Capaian kinerja (%)	-	98,61	107,30	112,38	112,38

Sumber : KemenPAN dan RB.

Analisis capaian kinerja dimaksud mencakup perbandingan antara target dan realisasi, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, evaluasi tren capaian dibandingkan periode sebelumnya, serta penilaian atas kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan visi organisasi. Dengan demikian, penyajian ini tidak semata bersifat informatif, tetapi juga reflektif dan korektif sebagai dasar perumusan langkah perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI dengan target tahunan 63,79.

Tabel 3.6.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	Indeks	63,79 ("B")
2	Realisasi Kinerja	Indeks	Belum dirilis oleh KemenPAN dan RB
3	Capaian kinerja	Persen	-

Sumber : KemenPANRB.

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun 2025 telah ditetapkan Target Kinerja sebesar 63,79 dengan kategori “B”. Target ini mencerminkan komitmen organisasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja sesuai standar evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian hingga dokumen ini disusun, realisasi kinerja tahun 2025 masih belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB, sehingga nilai capaian kinerja belum dapat dihitung maupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berdampak yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil.

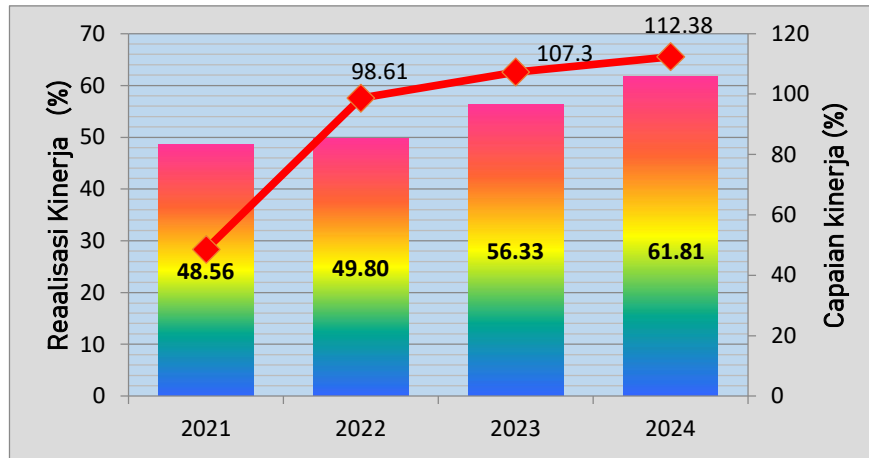
Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	48,56	49,80	56,30	61,81	63,79	Belum dirilis	-

Sumber : KemenPAN dan RB.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren positif yang ditandai dengan perbaikan serta penguatan tata kelola manajemen pemerintahan secara lebih optimal di berbagai sektor. Upaya penguatan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh perangkat daerah agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerja, sehingga tercipta birokrasi yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

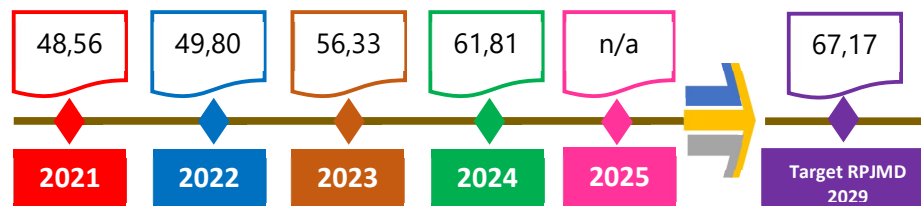
Gambar 3.1.
Trend Realisasi Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Indeks Reformasi Birokrasi yang direncanakan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2025-2029 ditetapkan sebesar 67,17 sebagai representasi komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.2.
Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian tingkat provinsi dan nasional belum dapat disajikan, mengingat angka resmi hasil evaluasi masih belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga analisis komparatif secara kuantitatif akan dilakukan setelah data penilaian tersebut diumumkan secara resmi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan maupun kegagalan, termasuk faktor yang memengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja, belum dapat diuraikan secara komprehensif karena hasil evaluasi resmi masih menunggu rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; namun demikian, langkah antisipatif tetap telah dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas pemenuhan eviden pada setiap area perubahan, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi internal sebagai alternatif solusi guna memastikan perbaikan kinerja yang berkelanjutan setelah hasil penilaian diterbitkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ditujukan untuk menakar sejauh mana setiap rupiah anggaran, setiap potensi sumber daya manusia, serta setiap dukungan sarana dan prasarana benar-benar dikonversi menjadi capaian kinerja yang terukur dan bernilai tambah, sehingga relasi antara input dan output tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mencerminkan produktivitas organisasi yang sesungguhnya; kendati hasil evaluasi akhir masih menanti rilis resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berbagai langkah pengendalian tetap diintensifkan melalui penajaman prioritas program, pengetatan mekanisme monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi transformasi digital guna memastikan bahwa setiap sumber daya yang digerakkan berkontribusi secara efektif, efisien, dan akuntabel terhadap peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyadari bahwa tantangan utama mereka terletak pada perbaikan rencana aksi dan strategi reformasi birokrasi yang masih perlu penyempurnaan. Karena itu sedang berupaya memperbaiki capaian reformasi birokrasi dengan

cara meningkatkan kolaborasi antar instansi dan merampingkan proses pengambilan keputusan melalui evaluasi yang lebih baik.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, sejumlah program pembangunan daerah yang dirancang sebagai instrumen pengungkit pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 diarahkan secara sinergis untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, menyederhanakan proses perizinan dan pelayanan publik, meningkatkan kepastian regulasi, serta mendorong iklim investasi yang kondusif, sehingga Reformasi Birokrasi tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap akselerasi pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 3.8.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2	Program Penatagunaan Tanah
3	Program Pendaftaran Penduduk
4	Program Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa
7	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
8	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
9	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
10	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
11	Program Pembinaan Perpustakaan
12	Program Pengelolaan Arsip
13	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
14	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
16	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Program Kepegawaian Daerah
18	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
19	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
20	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Program Pembangunan Daerah
22	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
23	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
24	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
25	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
26	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
27	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Kegiatan penguatan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil pengukuran terhadap sasaran strategis 2 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2025, menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,68% dengan predikat kinerja "istimewa", yang merefleksikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam melampaui target yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit yang merepresentasikan capaian pembangunan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sehingga keberhasilannya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk

berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir IPM di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut disajikan target dan realisasi capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Kinerja (indeks)	73,58	73,35	74,00	74,20	75,28
2	Realisasi Kinerja (indeks)	73,16	73,96	74,70	75,20	75,79
3	Capaian kinerja (%)	99,43	100,83	100,95	101,35	100,68

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin. Perkembangan tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif linier dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan pada kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 tercatat sebesar 75,79, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,28 pada periode yang sama sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,68 %, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah berjalan efektif dan mampu melampaui ekspektasi perencanaan yang telah ditetapkan.

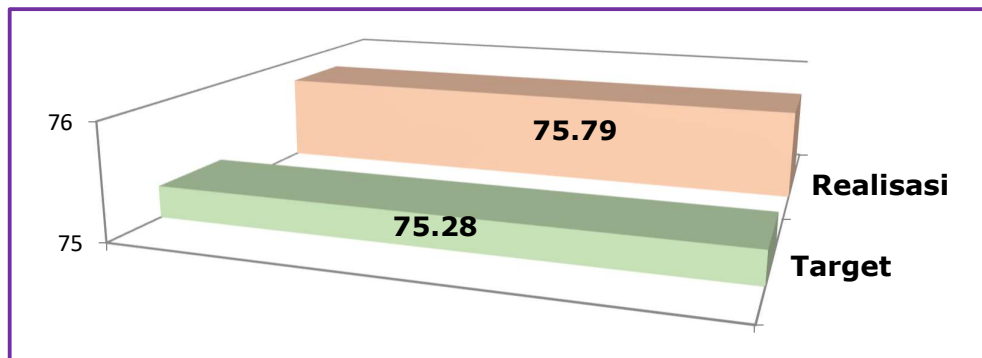
Tabel 3.10.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada
Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	Indeks	75,28
2	Realisasi Kinerja	Indeks	75,79
3	Capaian kinerja	Persen	100,68

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis, realisasi pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dapat divisualisasikan pada gambar berikut, yang memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi serta tren peningkatannya dalam kurun waktu pengamatan.

Gambar 3.3.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi utama, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran (standar hidup layak), sehingga setiap kenaikan IPM secara inheren merefleksikan peningkatan kinerja pada ketiga komponen tersebut. Pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang konsisten dan positif, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta daya beli atau kemampuan ekonomi penduduk. Kondisi ini terjadi karena seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan secara simultan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mendorong akselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

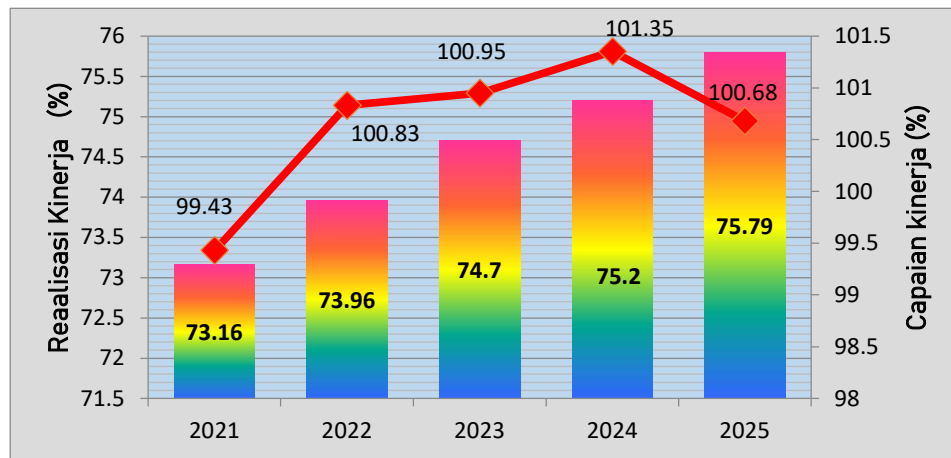
Tabel 3.11.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,16	73,96	74,70	75,20	75,28	75,79	100,68

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Peningkatan IPM tersebut terjadi sebagai konsekuensi logis dari membaiknya dimensi-dimensi pembentuknya yakni meningkatnya usia harapan hidup sebagai refleksi dari derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, meluasnya kesempatan dan akses terhadap pendidikan yang mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah serta bertambahnya pengeluaran riil per kapita sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang memperkuat daya beli dan menghadirkan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Gambar 3.4.
Trend Realisasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Apabila realisasi IPM tahun 2025 sebesar 75,79 poin dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah sebesar 75,77 poin, maka tingkat kemajuan pencapaiannya mencapai 100,03 % yang mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak hanya memenuhi, tetapi juga sedikit melampaui target yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah daerah, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan manusia serta konsistensi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat secara berkelanjutan.

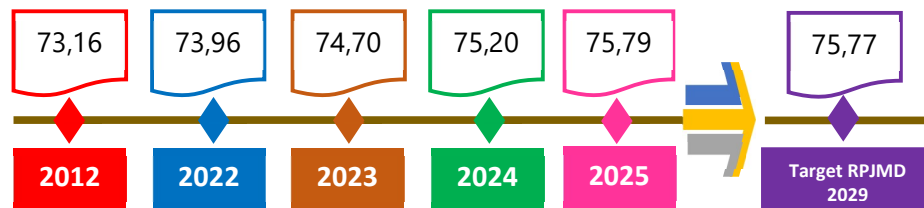
Tabel 3.12.
Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	75,79	75,77	100,03

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target pertumbuhan IPM yang direncanakan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2025-2029 ditetapkan sebesar 75,77; namun apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun terakhir, target akhir periode tersebut sesungguhnya telah terlampaui lebih awal, bahkan pada Tahun 2025 nilai yang ditetapkan sebagai sasaran akhir telah berhasil dicapai, dengan tren yang terus menunjukkan peningkatan secara konsisten, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu berada pada jalur yang progresif dan berkelanjutan.

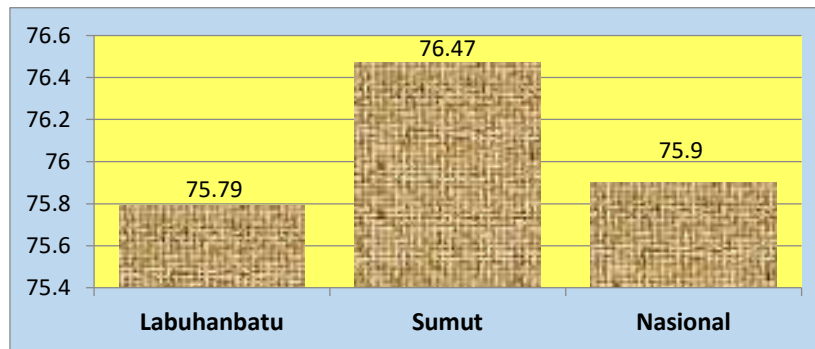
Gambar 3.5.
Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Selama tahun 2025 capaian IPM Kabupaten Labuhanbatu tercatat sebesar 75,20 poin, berada di bawah rata-rata Sumatera Utara yang mencapai 76,47 poin dan rata-rata nasional sebesar 75,90 poin sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Meskipun demikian apabila dibandingkan dalam lingkup regional, IPM Kabupaten Labuhanbatu tetap menunjukkan posisi yang relatif lebih unggul dibandingkan beberapa kabupaten/kota di sekitarnya, sebagaimana telah diuraikan pada Bab I sehingga mencerminkan daya saing pembangunan manusia yang cukup kompetitif di kawasan tersebut.

Gambar 3.6.
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2025



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan kinerja IPM Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa capaian positif tersebut dipengaruhi oleh membaiknya indikator kesehatan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, meningkatnya partisipasi serta rata-rata lama sekolah pada sektor pendidikan, serta pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin produktif; namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan antarwilayah, keterbatasan kualitas infrastruktur layanan publik, dan dinamika ekonomi makro yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Sebagai alternatif solusi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan penguatan intervensi lintas sektor melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan preventif dan promotif, perluasan akses pendidikan yang inklusif, pengendalian inflasi daerah, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, sehingga keberlanjutan peningkatan IPM dapat terjaga secara konsisten dan berdampak merata.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pembangunan manusia dimaknai sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*), yakni upaya strategis untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menentukan kualitas hidupnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut adalah IPM, yang menilai kualitas taraf hidup masyarakat di

suatu daerah melalui dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM pada hakikatnya menggambarkan sejauh mana penduduk mampu mengakses hasil-hasil pembangunan, seperti memperoleh penghasilan yang layak, menikmati layanan kesehatan yang memadai serta mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, IPM tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemeringkatan tingkat pembangunan antar daerah, tetapi juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan fiskal, termasuk dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam kerangka IPM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2025, Kabupaten Labuhanbatu berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 1,24 tahun, dari 72,21 tahun pada Tahun 2021 menjadi 73,45 tahun pada Tahun 2025. Secara rata-rata, dalam kurun waktu tersebut UHH tumbuh sebesar 0,43 % per tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam derajat kesehatan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta semakin efektifnya intervensi pembangunan di bidang kesehatan yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

b. Dimensi pengetahuan.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Data tahun 2021–2025 Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 12,73 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,30 tahun pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 0,57 tahun selama periode tersebut. Peningkatan ini mencerminkan semakin terbukanya peluang bagi penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, serta menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan.

Berdasarkan perkembangan data tahun 2021–2025, Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 9,25 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,53 tahun pada tahun

2025 atau meningkat sebesar 0,28 tahun selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah berjalan ke arah yang positif meskipun laju peningkatannya relatif moderat pada beberapa tahun terakhir.

Peningkatan pada kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu khususnya pada aspek pendidikan terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Kondisi ini menjadi modal dasar yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

c. Dimensi standar hidup layak.

Dimensi terakhir yang merepresentasikan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang tercermin dari pengeluaran per kapita. Pada tahun 2025 pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu tercatat sebesar 14,798 juta rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 11,212 juta rupiah. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 terjadi kenaikan sebesar 3,586 juta rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,73 % per tahun yang menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pembangunan manusia.

Tabel 3.13.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Komponen	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Umur harapan hidup saat lahir (tahun)	72,21	72,55	72,88	73,13	73,45
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,73	12,74	13,25	13,26	13,30
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,25	9,4	9,49	9,50	9,53
4	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	11.212	11.474	14.555	15.042	14.798
	IPM	73,16	73,96	74,70	75,20	75,79
	Pertumbuhan IPM	-	0,80	0,74	0,50	0,59

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja IPM, berbagai program pembangunan daerah penunjang target pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 telah dialokasikan pada sejumlah perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Melalui perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan penganggaran yang terarah dan berbasis kinerja, diharapkan intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk. Program-program yang telah dialokasikan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Makanan Minuman
7	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
8	Program Perlindungan Perempuan
9	Program Pemenuhan Hak anak
10	Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak
11	Program Perlindungan Khusus anak
12	Program Pengendalian Penduduk
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
15	Program Informasi dan Komunikasi Publik
16	Program Aplikasi Informatika
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
20	Program Pembinaan Perpustakaan
21	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
22	Program Pengelolaan sumber daya manusia
23	Program Perekonomian dan Pembangunan
25	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan
25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No	Program Pembangunan Daerah
26	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
27	Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan
28	Program Pemberdayaan UMKM

Program yang mendukung pencapaian target kinerja IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan secara operasional ke dalam berbagai kegiatan yang dilengkapi dengan indikator program, indikator kegiatan, serta dukungan alokasi anggaran pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga setiap intervensi pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat dapat terukur kontribusinya serta terjamin akuntabilitas pelaksanaannya.



Peningkatan SDM dengan penguatan di bidang pendidikan dan kesehatan

3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

Pada sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial, pengukuran kinerja dilaksanakan melalui IKU berupa Persentase Penduduk Miskin sebagai tolok ukur keberhasilan intervensi penanggulangan kemiskinan daerah. Rata-rata capaian IKU tersebut pada Tahun 2025 mencapai 81,41 % dengan predikat kinerja "baik" yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana diuraikan pada matriks berikut.

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Persentase penduduk miskin beserta perbandingan antara target dan realisasi capaiannya dapat diuraikan pada tabel berikut ini sebagai gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.15.
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin
Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Kinerja (%)	9,02	8,60	8,50	8,40	6,00
2	Realisasi Kinerja (%)	8,74	8,26	7,99	7,84	7,37
3	Capaian kinerja (%)	103,20	104,12	106,38	107,14	81,41

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Trend persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai dengan kecenderungan penurunan angka kemiskinan secara bertahap sebagai refleksi efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan intervensi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2024 tercatat sebesar 7,37%, atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,00%. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus menunjukkan komitmen dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai langkah strategis dan terintegrasi. Upaya yang telah ditempuh antara lain pemutakhiran (updating) data penduduk secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran intervensi, integrasi dan sinkronisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat guna, serta pengelolaan APBD secara cermat dan akuntabel sebagai instrumen stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

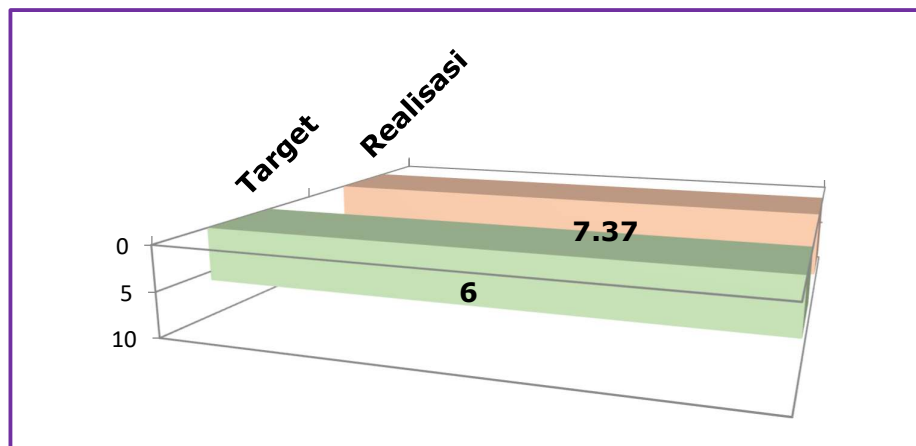
Tabel 3.16.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	Persen	6,00
2	Realisasi Kinerja	Persen	7,37
3	Capaian kinerja	Persen	81,41

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis, realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut yang menggambarkan perbandingan antara target dan capaian aktual serta dinamika pergerakannya dibandingkan tahun sebelumnya. Visualisasi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi capaian tahun berjalan sekaligus menjadi dasar analisis terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu..

Gambar 3.7.
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum, tren angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu Tahun 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang positif dan bergerak ke arah perbaikan yang berkelanjutan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan tercatat sebesar 8,74% kemudian menurun menjadi 8,26% pada Tahun 2022.

Penurunan tersebut berlanjut pada Tahun 2023 menjadi 7,99% selanjutnya pada Tahun 2024 sebesar 7,84%, dan pada Tahun 2025 kembali membaik menjadi 7,37%.

Konsistensi penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai intervensi kebijakan yang telah dilaksanakan, baik melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun optimalisasi belanja daerah yang produktif. Penguatan tren pada periode terakhir juga mengindikasikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 semakin dapat diatasi, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, membaiknya daya beli masyarakat, serta pulihnya sektor-sektor usaha yang sebelumnya terdampak signifikan. Dengan demikian meskipun target tahunan tertentu belum sepenuhnya tercapai, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu berada pada jalur yang progresif dan menunjukkan fondasi pemulihan ekonomi yang semakin kuat.

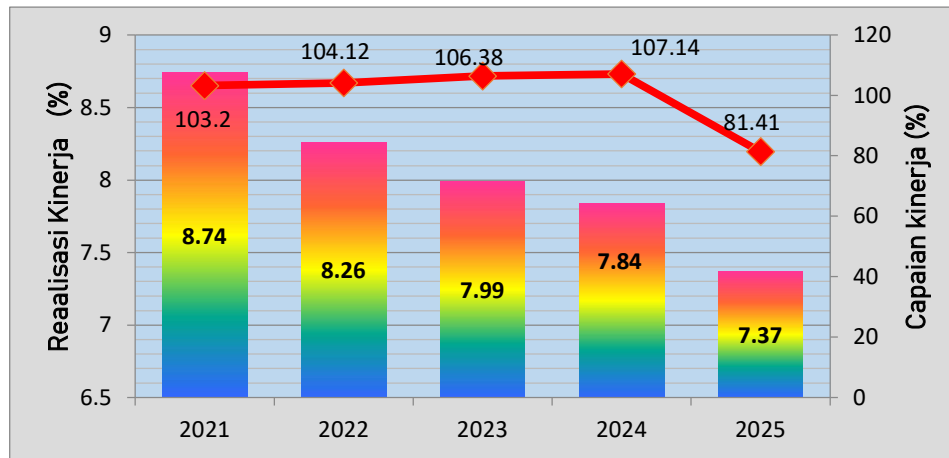
Tabel 3.17.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penduduk Miskin	8,74	8,26	7,99	7,84	6,00	7,37	81,41

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya penduduk miskin dan hampir miskin yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya hingga melampaui garis kemiskinan. Perbaikan kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, akses terhadap kesempatan kerja, serta efektivitas intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang pada akhirnya turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Gambar 3.8.
Trend Realisasi Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Secara rata-rata terjadi peningkatan capaian penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya yang menunjukkan kecenderungan tren yang konsisten dan progresif, sehingga apabila pola perkembangan tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan kebijakan yang adaptif, integratif, dan berkelanjutan, maka target persentase penduduk miskin sebesar 5,00 % pada akhir periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 tidak hanya berpotensi tercapai, tetapi juga dimungkinkan untuk terlampaui secara terukur dan akuntabel.

Tabel 3.18.
Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan
Target Kinerja Jangka Menengah

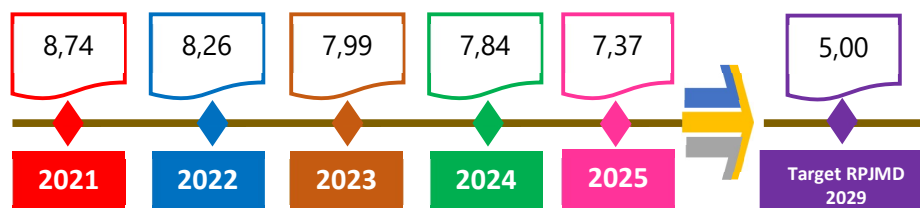
IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Kemiskinan (%)	7,37	5,00	67,84

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Realisasi pencapaian Tingkat Kemiskinan tahun 2025 sebesar 7,37% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 5,00% yang telah mencapai tingkat kemajuan 67,84% menunjukkan

bahwa kinerja penurunan kemiskinan berada pada jalur yang progresif namun tetap memerlukan akselerasi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar sisa kesenjangan target dapat dicapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

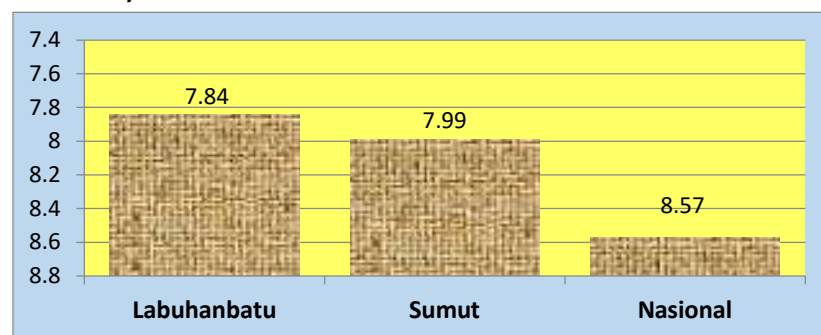
Gambar 3.9.
Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025 sebesar 7,37 % secara komparatif berada sedikit di atas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,24 %, namun masih lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25 % berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sehingga posisi ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan daerah relatif kompetitif di tingkat nasional meskipun tetap memerlukan penguatan strategi agar mampu melampaui capaian provinsi; perbandingan dimaksud dapat dilihat pada infografis berikut.

Gambar 3.10.
Perbandingan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian penurunan angka kemiskinan hingga 7,37 % pada tahun 2025 pada hakikatnya merefleksikan adanya efektivitas

kebijakan yang telah kami jalankan secara sistematis dan terintegrasi —mulai dari pemutakhiran basis data terpadu, harmonisasi penyaluran bantuan sosial, hingga optimalisasi belanja daerah yang diarahkan sebagai stimulus ekonomi produktif— namun di sisi lain belum sepenuhnya tercapainya target yang ditetapkan menegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan kesempatan kerja yang stabil, dinamika inflasi komoditas kebutuhan dasar, serta tingginya kerentanan kelompok hampir miskin terhadap guncangan sosial-ekonomi; oleh karena itu sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, kami terus memperkuat pendekatan pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan UMKM, memperluas akses pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja, mengembangkan skema perlindungan sosial yang adaptif dan responsif, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata bersifat karitatif, melainkan transformatif, inklusif, dan berdaya ungkit jangka panjang.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran telah diarahkan secara lebih selektif dan berbasis kinerja dengan menitikberatkan pada program-program yang memiliki daya ungkit langsung terhadap peningkatan pendapatan dan perlindungan kelompok rentan, disertai dengan rasionalisasi belanja operasional guna menjaga proporsionalitas antara belanja administrasi dan belanja publik yang produktif, penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah untuk mencegah duplikasi serta fragmentasi kegiatan, optimalisasi pemanfaatan basis data terpadu sebagai instrumen presisi sasaran untuk meminimalisasi kesalahan inklusi dan eksklusi, serta pengendalian dan monitoring berkala terhadap realisasi fisik dan keuangan agar setiap rupiah anggaran mampu dikonversi menjadi output dan outcome yang terukur; melalui pendekatan tersebut, keterbatasan kapasitas fiskal daerah tetap dapat dimanfaatkan secara efektif dan relatif efisien dalam mendorong penurunan angka kemiskinan.

Meskipun secara simultan masih diperlukan penguatan perencanaan berbasis evidence, pendalaman analisis *cost-effectiveness* dan *cost-benefit*, peningkatan kualitas evaluasi berbasis dampak, serta pengembangan mekanisme pengawasan internal yang adaptif agar keterkaitan antara input, proses, output, outcome, dan dampak kebijakan dapat dipastikan semakin optimal, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka menengah maupun panjang.

Tabel 3.19.
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2021	457.021	45.030	8,74
2022	489.503	43.270	8,26
2023	524.240	42.580	7,99
2024	556.900	42.450	7,84
2025	575.408	40.490	7,37

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian target penurunan persentase angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, program penunjang yang dilaksanakan meliputi penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, serta optimalisasi belanja daerah yang produktif dan padat karya guna mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel 3.20.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5	Program Pengembangan Perumahan

No	Program Pembangunan Daerah
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8	Program Pengelolaan Pelayaran
9	Program Penelolan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
12	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
14	Program Kawasan Permukiman
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
16	Program Rehabilitasi Sosial
17	Program Penanggulangan Bencana
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
19	Program Pencatatan Sipil
20	Program Penanganan Bencana
21	Program Hubungan Industri
22	Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan
23	Program Perlindungan Perempuan
24	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
25	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
26	Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
27	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
28	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
29	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
30	Program Penyuluhan Pertanian
31	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
32	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
33	Program Pengelolaan System Data Gender dan Anak
34	Program Penempatan Tenaga Kerja

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.

3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), IDSD bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif, yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Pengukuran IDSD mengacu pada kerangka konseptual Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF), disertai dengan penyesuaian pada level indikator serta metode pengukuran agar selaras dengan karakteristik daerah di Indonesia dan ketersediaan data nasional. Sejumlah indikator serta tata cara penghitungan skor diperbarui untuk meningkatkan akurasi representasi kondisi daya saing daerah. Pada tingkat nasional, skor rata-rata IDSD yang dihitung dari seluruh provinsi berada pada angka 3,50 dari skala 5.

IDSD 2025 disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Struktur kerangka ini secara umum masih mempertahankan pendekatan yang digunakan pada IDSD 2024. Setiap pilar daya saing diukur melalui serangkaian indikator yang berfungsi sebagai pembentuk indeks. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam sejumlah dimensi yang bersifat konseptual semata dan tidak digunakan secara langsung dalam proses penghitungan indeks, namun berperan penting dalam memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk memahami keterkaitan antar indikator serta memudahkan proses interpretasi hasil pengukuran daya saing secara lebih sistematis dan mendalam sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berbasis bukti dalam upaya peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Gambar 3.11.
Kerangka Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025



Untuk tetap menjaga objektivitas pengukuran, seluruh data pada IDSD 2025 masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Hasil pengukuran sasaran strategis 4 : mewujudkan iklim investasi yang kompetitif pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja sebesar 99,14 % dengan predikat kinerja "Baik". Capaian tersebut menggambarkan bahwa kondisi kelembagaan, efisiensi pasar, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan berusaha yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap tingkat daya saing daerah.

Tabel 3.21.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Kinerja (indeks)	n/a	3,40	4,00	5,50	3,50
2	Realisasi Kinerja (indeks)	2,743	2,68	3,00	3,43	3,47
3	Capaian kinerja (%)	-	78,82	75,00	76,22	99,14

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dengan capaian kinerja yang mendekati target, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang lebih efektif, serta penguatan faktor-faktor pendukung daya saing daerah telah memberikan hasil yang positif. Ke depan upaya tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penguatan pelayanan investasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3.22.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun per Pilar 2021-2025

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	3,37	1,49	3,17	2,99	3,85	3,22	1,88	2,58	1,76	1,58	5,00	1,28	2,68
2023	3,78	2,26	4,46	2,81	3,87	3,52	2,04	2,91	1,03	4,52	2,99	1,84	3,00
2024	4,22	3,49	4,68	3,68	3,82	3,82	2,42	2,79	2,42	2,79	3,75	1,74	3,43
2024	4,12	3,49	4,87	3,50	3,83	4,03	2,45	2,68	2,43	4,56	3,22	2,44	3,47

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) capaian IKU IDSD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 3,50 poin sedangkan realisasi kinerja yang dicapai sebesar 3,47 poin.

Tabel 3.23.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada
Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah

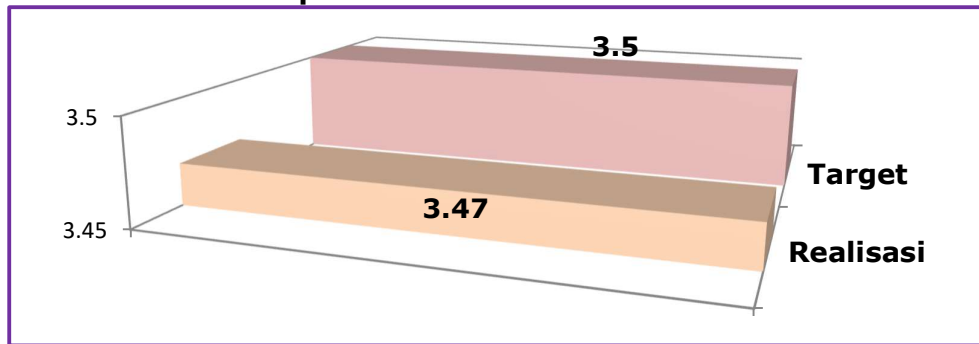
No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	Indeks	3,50
2	Realisasi Kinerja	Indeks	3,47
3	Capaian kinerja	Persen	99,14

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dengan demikian tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut mencapai 99,14 % yang menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih capaian yang relatif kecil

menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah telah berjalan secara efektif.

Gambar 3.12.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif positif dan stabil. Pada tahun 2025 realisasi kinerja mencapai 3,47 poin dari target yang ditetapkan sebesar 3,50 poin, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,14 % dengan predikat kinerja baik. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai IDSD menunjukkan adanya upaya perbaikan secara bertahap yang mencerminkan peningkatan kualitas berbagai faktor pendukung daya saing daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan inovasi daerah.

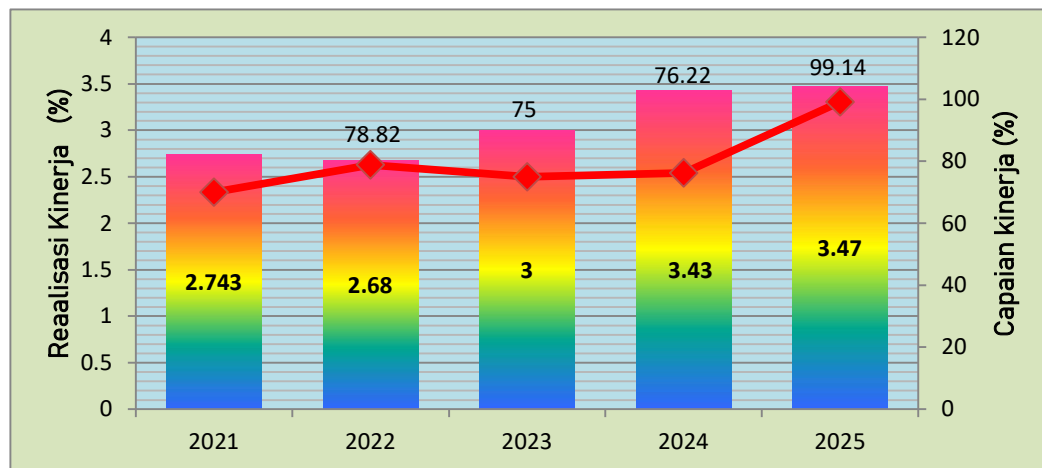
Tabel 3.24.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Daya Saing Daerah (poin)	2,743	2,68	3,00	3,43	3,50	3,47	99,14

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Capaian kinerja tahun 2025 yang mendekati target menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kompetitif telah berjalan dengan cukup efektif. Kondisi ini juga mencerminkan semakin membaiknya lingkungan usaha dan investasi di Kabupaten Labuhanbatu yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 3.13.
Trend Realisasi Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Secara umum tren capaian IDSD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif meskipun masih terdapat ruang perbaikan agar nilai indeks dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan pada periode perencanaan berikutnya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan investasi, serta optimalisasi berbagai faktor pendukung daya saing daerah.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, realisasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,47 poin. Sementara itu target akhir kinerja jangka menengah yang ditetapkan hingga tahun 2029 adalah sebesar 4,09 poin. Dengan capaian tersebut, tingkat kemajuan terhadap target akhir jangka menengah telah mencapai 84,84 5. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Labuhanbatu telah berada pada arah yang positif dan menunjukkan progres yang cukup

signifikan menuju target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah.

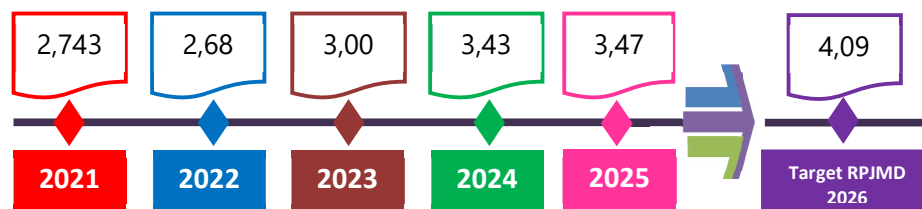
Tabel 3.25.
Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,47	4,09	84,84

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Capaian ini mencerminkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat faktor-faktor pendukung daya saing daerah telah mulai memberikan hasil, antara lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah, kemudahan perizinan berusaha, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap inovasi dan kegiatan ekonomi daerah. Meskipun demikian, masih terdapat selisih sebesar 0,62 poin untuk mencapai target akhir jangka menengah pada tahun 2029. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih optimal dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan peningkatan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal, serta pengembangan potensi ekonomi daerah agar target IDSD dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Gambar 3.14.
Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

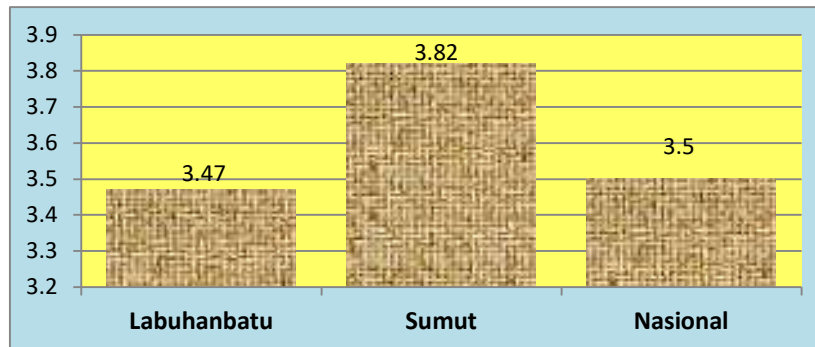


- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Berdasarkan hasil IDSD tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional capaian IDSD Kabupaten Labuhanbatu tercatat sebesar 3,47 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat daya saing daerah Kabupaten Labuhanbatu telah berada pada kondisi yang cukup

baik dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 3,82 poin, nilai IDSD Kabupaten Labuhanbatu masih berada di bawah capaian provinsi. Sementara itu jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 3,50 poin capaian Kabupaten Labuhanbatu juga sedikit lebih rendah, meskipun selisihnya relatif kecil.

Gambar 3.15.
Perbandingan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2025



Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Labuhanbatu telah berada pada kategori daya saing tinggi, masih diperlukan berbagai upaya peningkatan pada beberapa aspek pembentuk daya saing daerah seperti penguatan kualitas infrastruktur, peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan penguatan pada berbagai aspek tersebut, diharapkan nilai IDSD Kabupaten Labuhanbatu dapat terus meningkat dan mampu mendekati bahkan melampaui capaian provinsi maupun rata-rata nasional pada tahun-tahun mendatang

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 3,47 poin dengan tingkat capaian 99,14 % dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa kinerja peningkatan daya saing daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat selisih kecil dari target yang telah ditentukan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang

kondusif serta memperkuat faktor-faktor pendukung daya saing daerah telah memberikan hasil yang cukup positif.

Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan investasi, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung kegiatan ekonomi, serta upaya peningkatan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses administrasi dan pelayanan publik. Selain itu pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi serta pengembangan potensi sektor unggulan daerah juga turut berkontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan nilai IDSD Kabupaten Labuhanbatu dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian IDSD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 3,47 poin dengan tingkat capaian kinerja 99,14 persen menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam upaya peningkatan daya saing daerah telah dilaksanakan secara cukup efisien dan efektif. Dengan sumber daya yang tersedia, pemerintah daerah mampu mendekati target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penguatan iklim investasi dan pengembangan ekonomi daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan sektor-sektor

ekonomi unggulan daerah. Selain itu, pemanfaatan berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Di samping itu sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui kerja sama tersebut, berbagai potensi daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah. Dengan demikian, capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung peningkatan IDSD telah dilakukan secara relatif efisien. Ke depan, efisiensi tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan program yang lebih terarah, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung investasi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya saing Kabupaten Labuhanbatu secara berkelanjutan.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Beberapa program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian IDSD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan pada penguatan faktor-faktor utama pembentuk daya saing daerah. Program-program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan iklim investasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi daerah.

Tabel 3.26.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Program Pembangunan Daerah
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	Program Perlindungan Perempuan
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	Program Perlindungan Khusus Anak
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14	Program Pengendalian Penduduk
15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
17	Program Informasi dan Komunikasi Publik
18	Program Aplikasi Informatika
19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
22	Program Pembinaan Perpustakaan
23	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
24	Program Perekonomian dan Pembangunan
25	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja IDSD di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Indeks Daya Saing Daerah mendorong peningkatan kinerja pembangunan serta kualitas sumber daya manusia.

3.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hasil pengukuran sasaran strategis 5 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 76,56% dengan predikat kinerja "butuh perbaikan", yang mengindikasikan perlunya penguatan strategi dan akselerasi intervensi kebijakan; sasaran strategis ini diukur melalui IKU Pertumbuhan Ekonomi, yang target dan realisasi capaiannya dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27.
Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target (%)	6,38	4,78	5,00	5,20	5,46
2	Realisasi (%)	3,85	4,80	5,03	5,06	4,18
3	Capaian kinerja (%)	60,34	100,42	100,60	97,31	76,56

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Perekonomian Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,18 %, atau mengalami penurunan sebesar -0,88 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi daerah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain melemahnya kinerja sektor unggulan seperti perkebunan dan perdagangan akibat fluktuasi harga komoditas, terbatasnya ekspansi investasi baru, serta dinamika daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih; selain itu, kontribusi lapangan usaha yang sebelumnya menjadi penopang utama pertumbuhan kemungkinan mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang lebih rendah, sehingga berdampak pada agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi IKU pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari target sebesar 5,46 % terealisasi sebesar 4,18 %, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 76,56 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi

ekspektasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dengan selisih sebesar 1,28 poin persentase dari target.

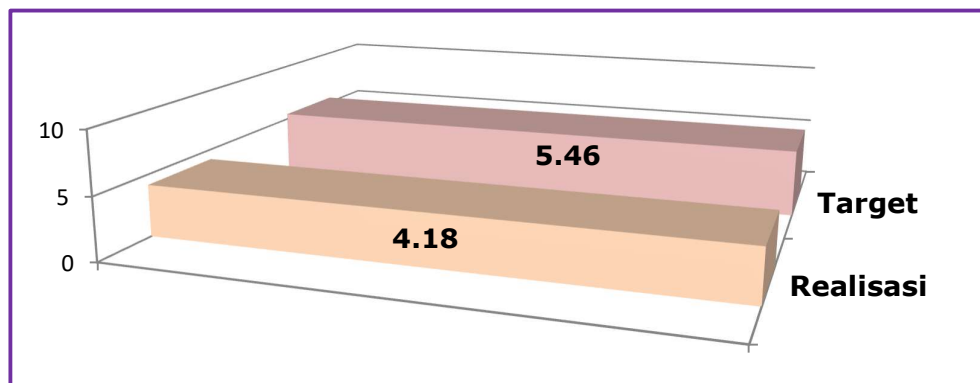
Tabel 3.28.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	Persen	5,46
2	Realisasi Kinerja	Persen	4,18
3	Capaian kinerja	Persen	76,56

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis, realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut, yang menggambarkan perbandingan antara target dan capaian aktual serta dinamika pergerakannya sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan kinerja pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 3.16.
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2025–2029 menunjukkan kecenderungan meningkat (positif), yang antara lain didorong oleh menguatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai refleksi meningkatnya daya beli dan pendapatan dengan asumsi stabilitas makro ekonomi tetap terjaga serta dampak pasca pandemi semakin terkendali, diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat terus mengalami akselerasi secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

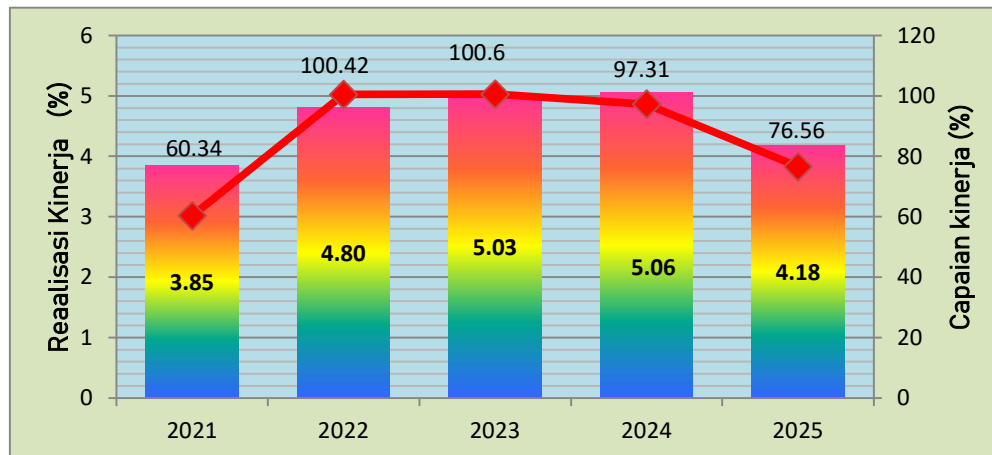
Tabel 3.29.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,85	4,80	5,03	5,06	5,46	4,18	76,56

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ilustrasi berikut menunjukkan dinamika perkembangan yang mencerminkan fluktuasi sekaligus kecenderungan pemulihan dan penguatan struktur ekonomi daerah dari waktu ke waktu.

Gambar 3.17.
Trend Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Realisasi IKU pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,18 % dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2029 sebesar 7,41 % menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 56,41%, yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja masih berada pada tahap moderat dan memerlukan akselerasi signifikan dalam sisa periode perencanaan. Selisih sebesar 3,23 poin persentase mencerminkan

adanya tantangan struktural maupun siklikal dalam perekonomian daerah sehingga diperlukan penguatan strategi peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas, perluasan kesempatan kerja produktif, serta optimalisasi belanja daerah yang berdaya ungkit tinggi agar pertumbuhan ekonomi dapat terdorong lebih cepat dan mampu mendekati target yang telah ditetapkan pada akhir periode jangka menengah.

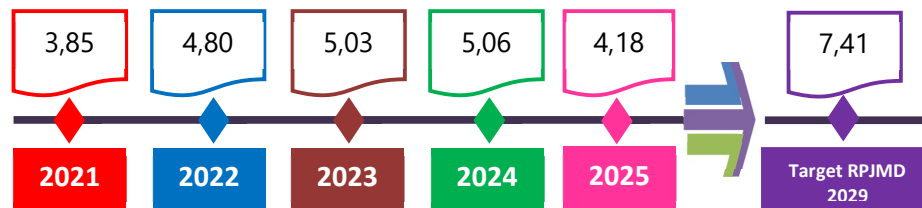
Tabel 3.30.
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,18	7,41	56,41

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu capaian sebesar 56,41 % tersebut juga mengisyaratkan perlunya penguatan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program agar intervensi yang dilakukan benar-benar terfokus pada sektor-sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Upaya percepatan dapat ditempuh melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, simplifikasi perizinan, peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung distribusi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan.

Gambar 3.18.
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

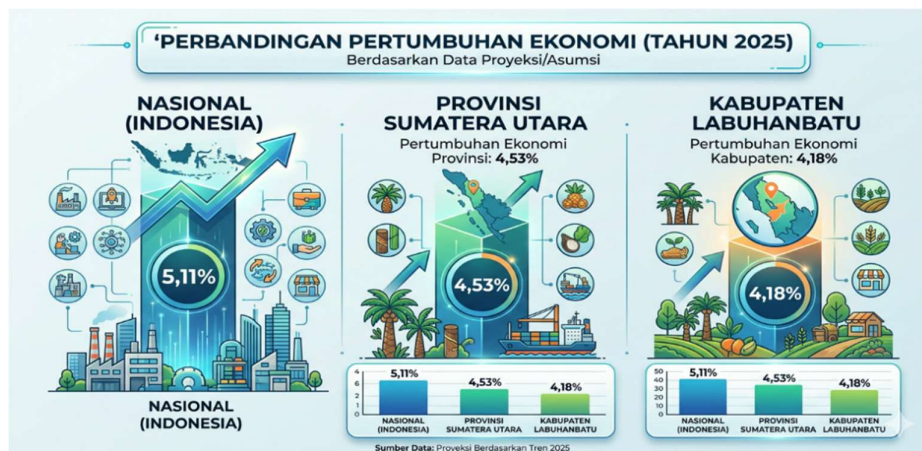


- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca pandemi COVID-19, namun pada tahun 2025 masih tercatat sebesar 4,18 %, yang berada di bawah capaian

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,53 % serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 %, sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun arah pemulihan sudah positif, laju ekspansi ekonomi daerah relatif lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, dan karenanya memerlukan penguatan daya ungkit sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi kebijakan fiskal daerah agar konvergensi pertumbuhan dapat dicapai secara lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Gambar 3.19.
Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2025



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berada di bawah target mencerminkan bahwa meskipun proses pemulihan pasca pandemi telah berjalan dan aktivitas ekonomi menunjukkan tren positif, kinerja belum sepenuhnya optimal akibat adanya keterbatasan ekspansi investasi, fluktuasi harga komoditas unggulan, dinamika daya beli masyarakat, serta kontribusi sektor-sektor tertentu yang belum tumbuh secara maksimal. Namun demikian keberhasilan menjaga pertumbuhan tetap berada pada zona positif menunjukkan adanya fondasi ekonomi yang cukup resilien sehingga alternatif solusi yang telah dan terus dilakukan meliputi penguatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal dan hilirisasi komoditas, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, serta optimalisasi belanja daerah yang diarahkan pada kegiatan produktif guna

mendorong akselerasi pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan realokasi dan recofusing anggaran sebagai stimulus perbaikan perekonomian diantaranya seperti bantuan sembako dan bantuan sosial tunai.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Evaluasi komprehensif terhadap tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana telah diupayakan secara terencana, terarah, dan proporsional dengan menitikberatkan pada prioritas program yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target kinerja, melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pengendalian realisasi belanja secara berkala, rasionalisasi biaya operasional, serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah guna meminimalisasi duplikasi kegiatan dan memastikan setiap input yang digunakan dapat dikonversi secara optimal menjadi output dan outcome yang terukur, akuntabel, serta memberikan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Perekonomian Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perlambatan hingga berada pada angka 4,18 %, yang mengindikasikan bahwa meskipun masih tumbuh positif, laju ekspansi ekonomi tidak sekuat periode sebelumnya. Berdasarkan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, sebagian lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan negatif yang turut menekan agregat kinerja ekonomi daerah, meskipun terdapat sektor-sektor yang menunjukkan akselerasi signifikan, seperti real estate yang tumbuh sebesar 11,02 %, diikuti sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,78 %, serta pengadaan air sebesar 9,19 %, sementara lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi terdalam sebesar -6,93%, sehingga struktur pertumbuhan tahun berjalan mencerminkan ketidakseimbangan kontribusi antar sektor yang memerlukan penguatan diversifikasi dan

stabilisasi kinerja sektor-sektor strategis agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 3.31.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,30	7,31	4,70	4,27	2,4
2	Pertambangan dan Penggalian	8,99	6,04	3,29	4,02	3,86
3	Industri Pengolahan	3,21	3,31	4,54	2,99	4,97
4	Pengadaan Listrik, Gas	3,09	5,81	3,60	4,55	4,91
5	Pengadaan Air	2,26	5,62	6,75	3,31	9,19
6	Konstruksi	2,99	0,60	6,21	6,11	-0,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,28	5,07	6,85	9,03	7,32
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,97	8,66	5,70	4,05	9,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,16	7,59	5,47	5,41	8,07
10	Informasi dan Komunikasi	4,46	6,87	4,07	4,52	7,69
11	Jasa Keuangan	2,56	3,65	3,89	3,24	5,3
12	Real Estate	0,25	5,21	3,08	6,36	11,02
13	Jasa Perusahaan	-0,62	4,99	3,85	3,66	6,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,39	-0,09	3,89	9,43	-6,93
15	Jasa Pendidikan	1,29	3,91	3,42	8,48	4,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,30	2,70	4,85	6,23	6,12
17	Jasa lainnya	3,33	7,04	5,37	6,58	5,97
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku, struktur perekonomian tahun 2025 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan sebesar 32,68%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,75%, serta perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,19%, sehingga secara kumulatif ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 80,62% terhadap total PDRB yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas perdagangan, serta menegaskan pentingnya

strategi hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan diversifikasi ekonomi guna memperkuat ketahanan serta keberlanjutan pertumbuhan di masa mendatang.

Tabel 3.32.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2025	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,86	26,99	27,96	29,48	29,75
2	Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,68	0,68	0,64	0,62
3	Industri Pengolahan	34,70	34,24	33,76	32,53	32,68
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	8,32	8,05	8,17	7,85	7,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,50	17,59	17,57	17,96	18,19
8	Transportasi dan Pergudangan	1,68	1,7	1,73	1,69	1,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,32	1,31	1,28	1,24	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	0,69	0,68	0,65	0,61	0,6
11	Jasa Keuangan	1,12	1,11	1,08	1,03	1,02
12	Real Estate	2,67	2,55	2,38	2,26	2,4
13	Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0,17	0,15	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,68	2,46	2,47	2,18
15	Jasa Pendidikan	1,71	1,63	1,54	1,53	1,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39
17	Jasa lainnya	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi, beberapa program penunjang yang diarahkan untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 meliputi penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas daerah, pemberdayaan serta peningkatan kapasitas UMKM, pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas dan

distribusi, perluasan kesempatan kerja melalui program pelatihan dan penempatan tenaga kerja, serta optimalisasi belanja daerah yang berorientasi pada kegiatan produktif dan berdaya ungkit tinggi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi.

Tabel 3.33.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Program Pengendalian Hama Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
8	Program Penyelenggaraan Jalan
9	Program Penyelenggaraan Jembatan
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
11	Program Penempatan Tenaga Kerja
12	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
13	Program Promosi Penanaman Modal
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Kegiatan perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3.2.6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Indeks Ketahanan Pangan adalah nilai komposit yang mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah yang berdasarkan pada empat pilar utama yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, pemanfaatan pangan dan stabilitas pasokan. Indikator mencakup Skor Pola Harapan (PPH), persentase pengeluaran pangan rumah tangga, rasio konsumsi terhadap ketersediaan bersih dan penurunan daerah rentan rawan pangan. Kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan program ketahanan pangan serta meminimalkan resiko rawan pangan.

Selain itu Indeks Ketahanan Pangan juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memantau perkembangan kondisi pangan secara berkelanjutan. Melalui pengukuran indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan distribusi pangan, daya beli masyarakat terhadap pangan, serta kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Dengan demikian hasil pengukuran Indeks Ketahanan Pangan tidak hanya menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu daerah tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan yang lebih terarah guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, merata, aman, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 ditetapkan target Indeks Ketahanan Pangan sebesar 78,50 poin dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 77,35 poin. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 98,54 persen dengan predikat kinerja "baik". Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas telah berjalan secara cukup optimal. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan dinamika yang mencerminkan berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan. Perkembangan nilai indeks tersebut menjadi gambaran mengenai kondisi ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, serta stabilitas pasokan pangan

yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan masyarakat di daerah.

Tabel 3.34.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Kinerja (poin)	72,42	74,62	75,89	76,94	78,50
2	Realisasi Kinerja (poin)	71,24	73,55	74,70	75,77	77,35
3	Capaian kinerja (%)	98,37	98,57	98,43	98,48	98,54

Sumber : Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan data capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu selama periode tahun 2021–2025 terlihat bahwa baik target maupun realisasi kinerja menunjukkan kecenderungan peningkatan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun dimana realisasi kinerja tercatat sebesar 71,24 poin pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,55 poin pada tahun 2022 kemudian 74,70 poin pada tahun 2023, 75,77 poin pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 77,35 poin pada tahun 2025 dengan tingkat capaian kinerja yang secara umum stabil pada kisaran 98 persen setiap tahunnya sehingga kondisi tersebut mencerminkan bahwa berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka memperkuat ketersediaan pangan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, serta menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan telah berjalan secara cukup efektif dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif optimal dalam mendukung sasaran strategis peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data yang tersedia target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 78,50 poin sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 77,35 poin. Dari

perbandingan antara target dan realisasi tersebut diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 98,54 persen.

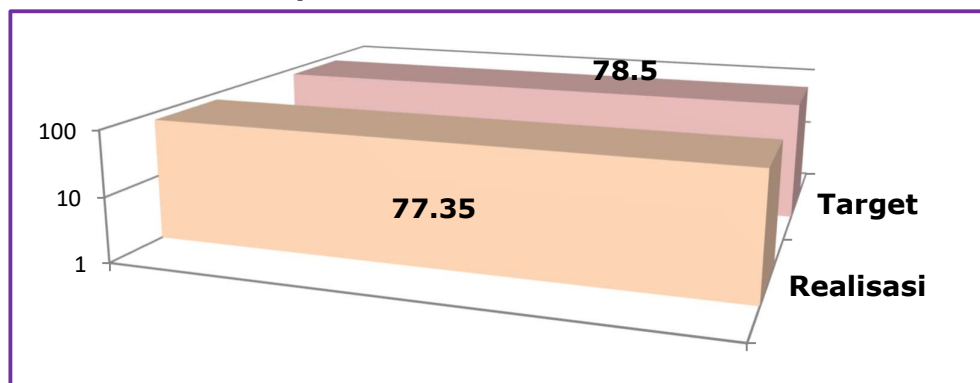
Tabel 3.35.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	poin	78,50
2	Realisasi Kinerja	poin	77,35
3	Capaian kinerja	Persen	98,54

Sumber : Badan Pangan Nasional.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun realisasi yang dicapai masih sedikit berada di bawah target yang ditetapkan, namun tingkat capaian yang mendekati target tersebut mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, serta memperkuat sistem cadangan dan distribusi pangan telah dilaksanakan secara cukup efektif.

Gambar 3.20.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Ketahanan Pangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2021 nilai indeks tercatat sebesar 71,24 poin

kemudian meningkat menjadi 73,55 poin pada tahun 2022 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 74,70 poin pada tahun 2023. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 75,77 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan daerah dari tahun ke tahun.

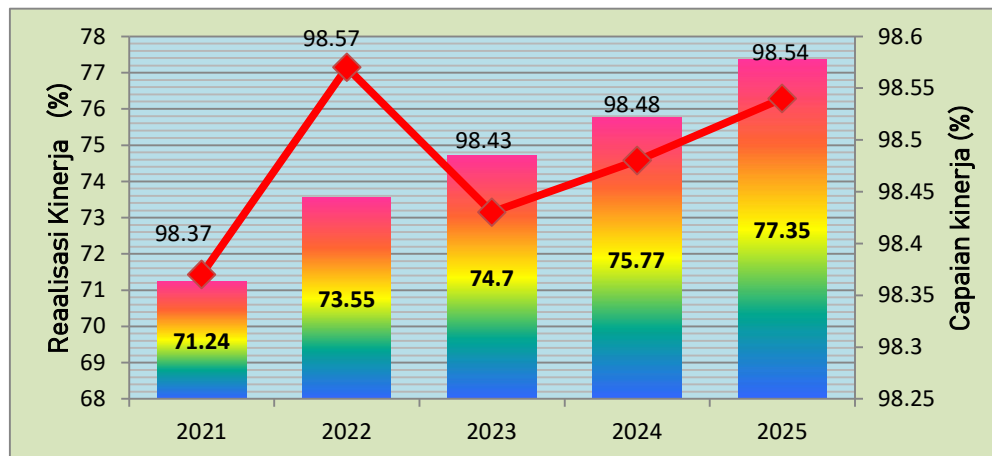
Tabel 3.36.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Pangan (poin)	71,24	73,55	74,70	75,77	78,50	77,35	98,54

Sumber : Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2025 ditetapkan target kinerja sebesar 78,50 poin sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 77,35 poin. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai 98,54 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi tersebut sedikit berada di bawah target namun secara substansial masih menunjukkan performa yang sangat baik serta tetap mempertahankan tren peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Gambar 3.21.
Trend Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Secara keseluruhan perkembangan nilai Indeks Ketahanan Pangan selama periode 2021-2025 mengindikasikan adanya upaya

yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketahanan pangan daerah meskipun masih diperlukan langkah-langkah penguatan agar capaian pada tahun-tahun mendatang dapat melampaui target yang telah ditetapkan

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu berhasil direalisasikan sebesar 77,35 poin sementara target akhir yang ditetapkan dalam periode jangka menengah hingga tahun 2029 adalah sebesar 79,70 poin.

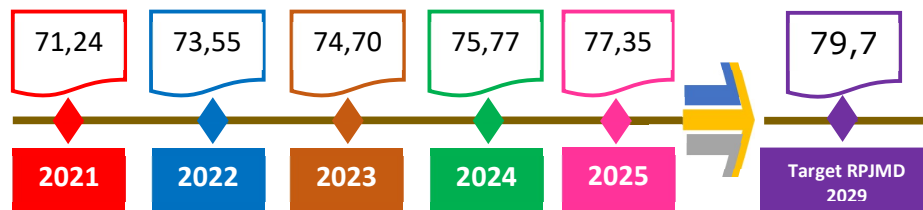
Tabel 3.37.
Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Labuhanbatu
Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Ketahanan Pangan (poin)	77,35	79,70	97,05

Sumber : Badan Pangan Nasional.

Jika dibandingkan dengan target akhir tersebut maka tingkat kemajuan capaian kinerja hingga tahun 2025 telah mencapai 97,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan pangan daerah telah berjalan pada jalur yang cukup optimal dan mendekati sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan yang didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan sekaligus menjadi landasan yang kuat untuk mendorong pencapaian target secara penuh pada periode berikutnya melalui penguatan intervensi yang lebih terarah dan adaptif.

Gambar 3.22.
Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

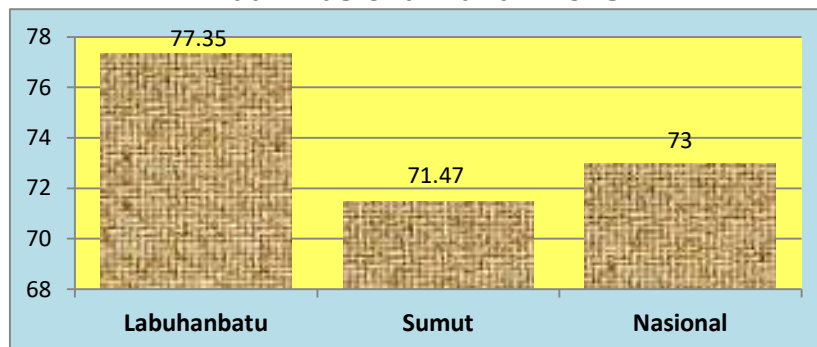


Capaian ini juga mengindikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan masyarakat telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan nilai Indeks Ketahanan Pangan. Dengan tingkat kemajuan yang telah mendekati target akhir diperlukan konsistensi dan penguatan strategi agar pada akhir periode jangka menengah tahun 2029 capaian kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional memberikan gambaran mengenai posisi kinerja daerah dalam konteks yang lebih luas. Pada tahun 2025 realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu tercatat sebesar 77,35 poin. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan pada tingkat provinsi dan nasional menunjukkan hasil yang relatif lebih tinggi.

Gambar 3.23.
Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2025



Berdasarkan data Badan Pangan Nasional Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,47 poin sedangkan Indeks Ketahanan Pangan nasional berada pada angka 73,00 poin. Dengan demikian capaian Kabupaten Labuhanbatu berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 yang mencapai 77,35 poin menunjukkan kinerja yang relatif baik meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Secara umum peningkatan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pertanian strategis, semakin membaiknya distribusi dan aksesibilitas pangan di masyarakat, serta dukungan berbagai program pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan daerah.

Selain faktor keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target secara optimal. Beberapa di antaranya adalah fluktuasi produksi pangan yang dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca, keterbatasan infrastruktur pendukung distribusi pangan, serta masih adanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses ekonomi terhadap pangan yang bergizi dan beragam.

Sebagai langkah alternatif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya antara lain melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian ketahanan pangan, peningkatan program diversifikasi pangan lokal, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produksi dan pemanfaatan pangan lokal. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong peningkatan capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun-tahun mendatang.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Indeks Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, salah satu indikator untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah atau negara menggunakan sumber daya (lahan, air, anggaran, tenaga kerja) untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan.

Efisiensi penggunaan sumber daya sangat mempengaruhi empat pilar utama Indeks Ketahanan Pangan yaitu :

- a. Ketersediaan pangan (*availability*) efisiensi penggunaan lahan pertanian, teknologi irigasi dan input pertanian (benih/pupuk) menentukan jumlah produksi bersih.
 - b. Keterjangkauan pangan (*accessability*) efisiensi rantai pasok, infrastruktur distribusi, dan alokasi anggaran mempengaruhi harga dan akses fisik.
 - c. Pemanfaatan pangan (*utilization*) efisiensi pengguna sumber daya lokal (diverifikasi pangan) dan akses air bersih memengaruhi gizi dan keamanan pangan.
 - d. Stabilitas pangan (*stability*) manajemen efisien atas stok pangan pemerintah (cadangan pangan) dan pengurangan susut.
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Keberhasilan capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penguatan ketahanan pangan daerah. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Tabel 3.38.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2	Program Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan

No	Program Pembangunan Daerah
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Pelaksanaan MBG di Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan pemenuhan kualitas gizi dan ketahanan pangan

3.2.7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas

Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas infrastruktur dasar di suatu wilayah (misalnya jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan). Nilai indeks ini biasanya digunakan untuk menilai tingkat pembangunan wilayah serta efektivitas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Secara umum, Indeks Infrastruktur merupakan nilai rata-rata dari beberapa indikator infrastruktur yang menggambarkan kondisi dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik kondisi infrastruktur suatu daerah.

Hasil pengukuran terhadap sasaran strategis meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif optimal. Hal ini tercermin dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Infrastruktur yang mencapai 84,78% sehingga termasuk dalam kategori atau predikat "baik". Dengan capaian sebesar 84,78% dapat diindikasikan bahwa sebagian besar target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah telah berhasil direalisasikan dengan baik meskipun masih terdapat ruang

untuk peningkatan pada beberapa aspek infrastruktur agar aksesibilitas dan kualitas layanan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pada periode pembangunan berikutnya diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan guna memastikan bahwa penyediaan infrastruktur tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas, pemerataan, serta keberlanjutannya.

Indeks Infrastruktur merupakan indikator kinerja yang untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai IKU dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat ketersediaan, kualitas, serta aksesibilitas infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi di daerah.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Indeks Infrastruktur menunjukkan bahwa pada tahun 2025 target kinerja yang ditetapkan sebesar 67,09 poin sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 56,88 poin. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 84,78 persen dengan kategori “baik”. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur bagi masyarakat telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun realisasi yang dicapai masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya pembangunan, proses pelaksanaan program infrastruktur yang memerlukan waktu yang relatif panjang, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dasar.

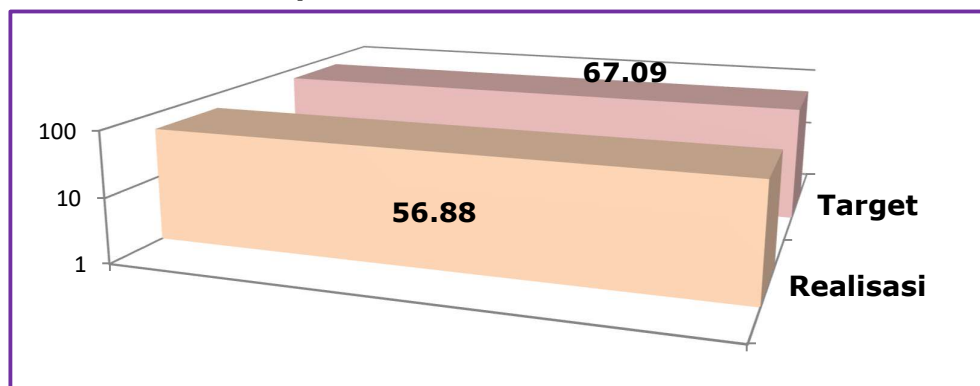
Tabel 3.39.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Infrastruktur

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	poin	67,09
2	Realisasi Kinerja	Opini	56,88
3	Capaian kinerja	Persen	84,78

Sumber : Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu.

Meskipun demikian capaian sebesar 84,78 persen tetap menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur telah berjalan dengan cukup efektif. Oleh karena itu pada periode selanjutnya diperlukan upaya yang lebih optimal melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah guna mendorong peningkatan nilai Indeks Infrastruktur agar dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.24.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Infrastruktur
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja IKU Indeks Infrastruktur antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan menunjukkan adanya dinamika dalam pencapaian indikator tersebut. Pada tahun sebelumnya realisasi Indeks Infrastruktur tercatat sebesar 74,30 poin sedangkan pada tahun berjalan ditetapkan target kinerja sebesar 67,09 poin dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 56,88 poin. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi pada tahun berjalan tersebut diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 84,78 persen.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya capaian Indeks Infrastruktur pada tahun berjalan menunjukkan adanya penurunan nilai indeks. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain penyesuaian metodologi pengukuran indikator, perubahan komponen penilaian dalam indeks, maupun

dinamika pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di daerah. Meskipun demikian dari sisi capaian terhadap target yang telah ditetapkan kinerja pada indikator ini masih berada dalam kategori baik yang menunjukkan bahwa sebagian besar upaya pembangunan infrastruktur yang direncanakan masih dapat direalisasikan secara relatif optimal.

Tabel 3.40.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Infrastruktur (poin)	74,30	67,09	56,88	84,78

Sumber : Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu.

Dengan demikian, hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur secara lebih terarah sehingga pada tahun-tahun berikutnya nilai Indeks Infrastruktur dapat kembali meningkat serta memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target kinerja jangka menengah menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup signifikan dalam pencapaian IKU Indeks Infrastruktur. Pada tahun 2025 realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Labuhanbatu tercatat sebesar 56,88 poin sementara target akhir yang ditetapkan dalam periode RPJMD Tahun 2025–2029 adalah sebesar 72,67 poin.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah tersebut diperoleh tingkat kemajuan sebesar 78,27 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa dalam tahap awal pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah daerah, upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur telah

berjalan dengan cukup baik serta berada pada jalur yang relatif sesuai dengan arah pencapaian target yang telah direncanakan.

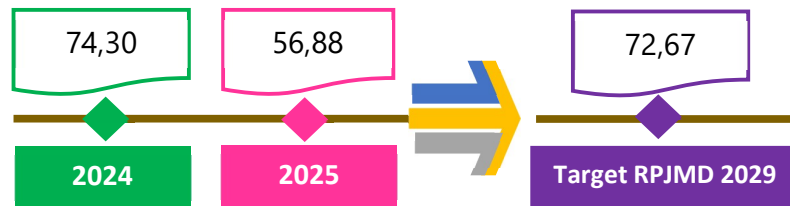
Tabel 3.41.
Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Labuhanbatu Tahun 2025
dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Infrastruktur (poin)	56,88	72,67	78,27

Sumber : Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu.

Tingkat kemajuan tersebut juga mengindikasikan bahwa sebagian besar fondasi pembangunan infrastruktur yang direncanakan dalam RPJMD telah mulai terealisasi melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Meskipun demikian masih diperlukan upaya yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, serta memperluas pemerataan infrastruktur agar target akhir Indeks Infrastruktur sebesar 72,67 poin pada tahun 2029 dapat dicapai secara maksimal.

Gambar 3.25.
Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024-2025



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian IKU Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 56,88 poin atau 84,78 persen dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan dengan cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat capaian indikator tersebut.

Dari sisi faktor keberhasilan, peningkatan nilai Indeks Infrastruktur didukung oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar melalui berbagai program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat. Selain itu sinergi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur juga turut mendorong peningkatan kualitas layanan infrastruktur di berbagai wilayah.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian indikator ini. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas anggaran daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur kondisi geografis dan sebaran wilayah yang memerlukan biaya pembangunan relatif besar serta masih adanya infrastruktur yang membutuhkan peningkatan kualitas maupun rehabilitasi secara bertahap. Di samping itu proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan waktu relatif panjang juga mempengaruhi kecepatan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah strategis antara lain dengan memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan teknis dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar hasil pembangunan infrastruktur dapat lebih optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya pemanfaatan sumber daya secara relatif efisien. Hal ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan dan peningkatan

kualitas infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana pendukung.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari upaya optimalisasi alokasi anggaran pembangunan yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu sinergi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan juga turut berkontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan saling mendukung.

Di samping itu penerapan prinsip perencanaan berbasis kinerja dan penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan turut mendorong penggunaan sumber daya yang lebih terukur dan akuntabel. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi pemborosan anggaran serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur.

Meskipun demikian upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya tetap perlu terus diperkuat melalui perbaikan kualitas perencanaan program, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penggunaan sumber daya yang tersedia dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Pencapaian IKU Indeks Infrastruktur tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, serta aksesibilitas infrastruktur bagi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur daerah. Beberapa program yang berkontribusi dalam mendukung

pencapaian kinerja Indeks Infrastruktur antara lain program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan sumber daya air, program pengembangan sistem penyediaan air minum, serta program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dan sanitasi. Melalui program-program tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kondisi kemandirian jalan, memperluas akses layanan air bersih, memperbaiki sistem sanitasi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar lainnya yang secara langsung mempengaruhi nilai Indeks Infrastruktur.

Tabel 3.42.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Penyelenggaraan Jalan

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Infrastruktur Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.2.8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Tangguh Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator nasional yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Indikator ini digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya sub urusan kebencanaan.

Secara analitis nilai IRB memberikan gambaran mengenai potensi ancaman bencana serta tingkat kesiapsiagaan suatu daerah dalam menghadapi risiko tersebut. Semakin tinggi nilai IRB suatu wilayah maka semakin besar pula tingkat risiko bencana yang dihadapi baik akibat faktor alam, kondisi kerentanan masyarakat maupun keterbatasan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu IRB menjadi salah satu acuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan Masyarakat. Selain itu pemanfaatan IRB juga sangat penting dalam perumusan kebijakan, penentuan prioritas program, serta pengalokasian sumber daya dalam penanggulangan bencana di daerah. Dengan memahami tingkat risiko bencana secara lebih komprehensif pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun strategi penanggulangan bencana yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu meminimalkan dampak bencana terhadap keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi yang mungkin timbul.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan mitigasi risiko. Dalam konteks tersebut pengurangan risiko bencana menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan ketangguhan daerah terhadap berbagai ancaman bencana.

Tabel 3.43.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Resiko Bencana (poin)	151,20	151,20	151,20	151,20	175,17

Sumber : BNPB RI.

Berdasarkan data IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021–2025, terlihat bahwa nilai IRB pada periode 2021 hingga 2024 relatif stagnan pada angka 151,20 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada periode tersebut berada pada kondisi yang relatif sama tanpa adanya perubahan yang signifikan. Namun demikian pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai IRB menjadi 175,17 poin yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain meningkatnya potensi ancaman bencana, perubahan kondisi lingkungan, tingkat kerentanan masyarakat, maupun adanya pembaruan metode atau data dalam pengukuran indeks oleh lembaga terkait.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 diketahui bahwa target kinerja yang ditetapkan sebesar 121,05 poin sedangkan realisasi kinerja mencapai 175,17 poin sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 69,10 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi nilai indeks masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yang berarti tingkat risiko bencana di Kabupaten Labuhanbatu masih relatif tinggi dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan, baik melalui penguatan sistem mitigasi bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, maupun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

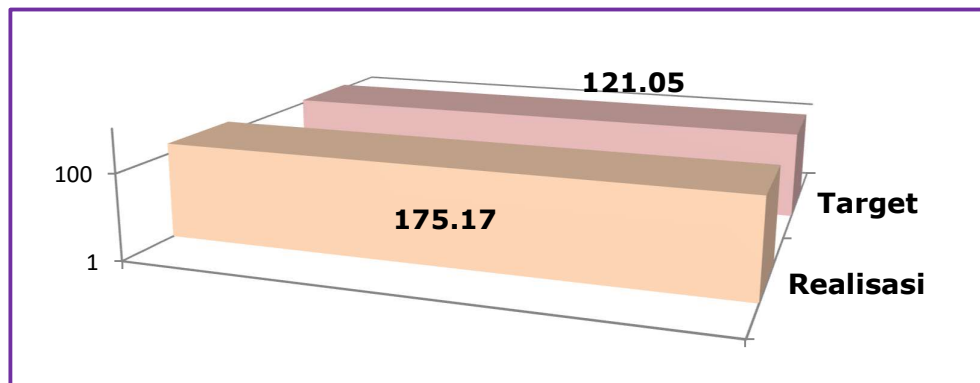
Tabel 3.44.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	poin	121,05
2	Realisasi Kinerja	poin	175,17
3	Capaian kinerja	Persen	69,10

Sumber : BNPB RI.

Dengan demikian diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif dan terintegrasi termasuk penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan program pengurangan risiko bencana sehingga diharapkan pada periode berikutnya nilai IRB dapat ditekan dan capaian kinerja dapat lebih mendekati target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.26.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021–2025 terlihat bahwa nilai realisasi indeks pada periode 2021 hingga 2024 relatif stabil pada angka 151,20 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Labuhanbatu dalam beberapa tahun tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun demikian, pada tahun 2025 realisasi indeks mengalami peningkatan menjadi 175,17 poin yang berarti tingkat risiko bencana pada tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

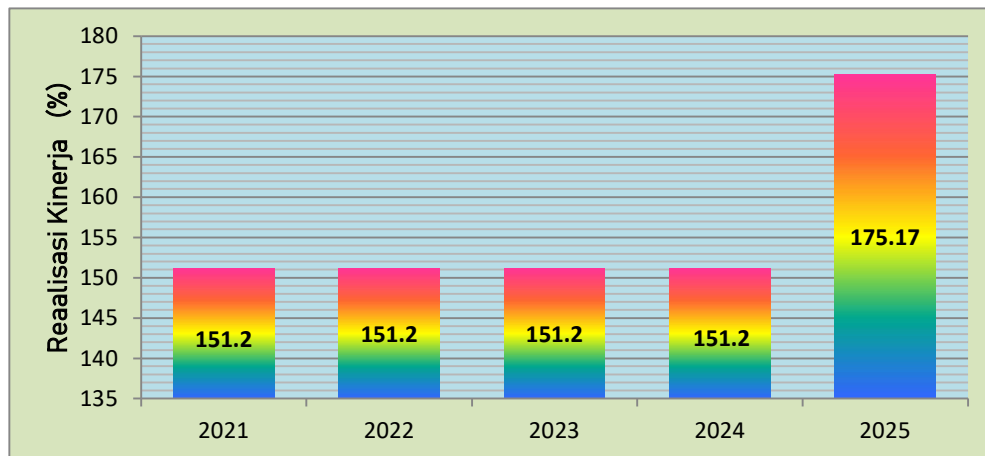
Tabel 3.45.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Resiko Bencana (poin)	151,20	151,20	151,20	151,20	121,05	175,17	69,10

Sumber : BNPB RI.

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 121,05 poin maka realisasi yang dicapai masih berada di atas target yang diharapkan, sehingga persentase capaian kinerja tercatat sebesar 69,10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan masih perlu ditingkatkan agar nilai indeks dapat ditekan mendekati target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.27.
Trend Realisasi Indeks Resiko Bencana
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah tahun 2029 pada kinerja IRB Kabupaten Labuhanbatu, diketahui bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 175,17 poin sedangkan target akhir jangka menengah tahun 2029 ditetapkan sebesar 112,77 poin. Berdasarkan perhitungan tersebut tingkat kemajuan yang dicapai hingga tahun 2025 adalah sebesar 64,38 persen.

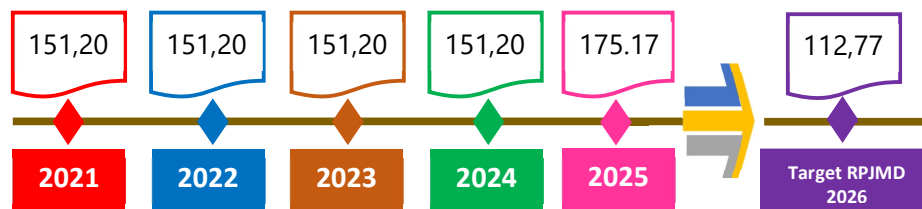
Tabel 3.46.
Realisasi Kinerja Indeks Resiko Bencana Labuhanbatu Tahun 2025
dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Resiko Bencana (poin)	175,17	112,77	64,38

Sumber : BNPB RI.

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dalam upaya menurunkan tingkat risiko bencana masih belum sepenuhnya sejalan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan mengingat nilai indeks yang direalisasikan masih relatif lebih tinggi dari target yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Labuhanbatu masih perlu terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 3.28.
Realisasi Kinerja Indeks Resiko Bencana
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Dengan demikian, diperlukan komitmen dan sinergi yang lebih kuat dari berbagai pemangku kepentingan agar target penurunan IRB pada akhir periode jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi nilai IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 175,17 poin tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 162,25 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Labuhanbatu masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kondisi di tingkat provinsi.

Perbedaan nilai tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya pengurangan risiko bencana baik yang berkaitan dengan potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat, maupun kapasitas penanggulangan bencana yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memperkuat langkah-langkah mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta

penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana agar tingkat risiko bencana dapat ditekan dan mendekati capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 terlihat bahwa realisasi nilai indeks masih lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya potensi ancaman bencana di beberapa wilayah, tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana yang masih cukup tinggi, serta kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang masih perlu ditingkatkan. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target penurunan nilai IRB antara lain sebagai berikut :

- a. Perubahan dan pembaruan metodologi IRB oleh BNPB. BNPB secara berkala melakukan pembaruan data dan metodologi penghitungan IRB termasuk penyesuaian bobot komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan nilai IRB meskipun tidak selalu mencerminkan penurunan kinerja daerah secara langsung.
- b. Karakteristik wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana tinggi. Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem yang relatif tinggi. Kondisi geografis dan hidrologis ini meningkatkan komponen bahaya dalam perhitungan IRB.
- c. Tingginya tingkat kerentanan sosial dan lingkungan. Kepadatan penduduk pada wilayah tertentu, pemanfaatan lahan yang belum sepenuhnya berwawasan mitigasi bencana, serta keterbatasan infrastruktur pengendalian bencana berkontribusi terhadap tingginya nilai kerentanan.
- d. Keterbatasan kapasitas daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi peningkatan kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana secara signifikan.

Untuk mencapai keberhasilan dan peningkatan kinerja, maka alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi penanggulangan bencana.
 - b. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat termasuk pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana.
 - c. Peningkatan koordinasi lintas sektor baik dengan perangkat daerah terkait maupun instansi vertikal dan relawan kebencanaan.
 - d. Penyusunan dan pemutakhiran data kebencanaan sebagai bahan perencanaan berbasis risiko.
 - e. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja penanggulangan bencana khususnya terhadap indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia.

- a. Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana, penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang bersifat prioritas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat. Meskipun nilai IRB Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 masih berada pada kategori risiko tinggi, pemanfaatan anggaran telah difokuskan pada kegiatan-kegiatan strategis seperti peningkatan kesiapsiagaan, sosialisasi kebencanaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, perangkat daerah telah berupaya mengoptimalkan penggunaan dana melalui penentuan skala prioritas, integrasi kegiatan dengan perangkat daerah lain, serta pemanfaatan dukungan dari instansi vertikal dan pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara relatif efisien, meskipun dampaknya terhadap penurunan nilai IRB bersifat jangka menengah dan panjang.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui penguatan peran aparatur dan relawan kebencanaan. Aparatur BPBD dan unsur terkait melaksanakan tugas secara lintas fungsi, sehingga satu personel dapat menangani lebih dari satu kegiatan, khususnya dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Selain itu keterlibatan relawan, masyarakat, dan unsur non-pemerintah menjadi bagian dari strategi efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia. Pendekatan ini memungkinkan perluasan jangkauan pelayanan kebencanaan tanpa harus menambah jumlah aparatur secara signifikan

c. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal melalui sistem penggunaan bersama dan pemeliharaan secara berkala. Peralatan kebencanaan digunakan lintas kegiatan dan lintas wilayah sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi duplikasi pengadaan yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah dan instansi lain dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, dan koordinasi juga menjadi bentuk efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana pendukung.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja IRB, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan berbagai program pembangunan daerah yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi, kesiapsiagaan serta penanganan bencana secara lebih efektif dan terintegrasi. Adapun beberapa program pembangunan daerah yang menjadi penunjang dalam pencapaian target kinerja IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.47.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks
Resiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Penanganan Bencana
2	Program Penanggulangan Bencana
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program yang mendukung pencapaian target kinerja IRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Labuhanbatu terjun ke lokasi tanah longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi

3.2.9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 8 dalam meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada Tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,46 % dengan predikat kinerja "baik". Sasaran strategis ini diukur melalui IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menjadi parameter utama dalam menilai efektivitas kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja daerah.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Melansir laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pengangguran terbuka antara lain tidak tersedianya

lapangan kerja, penurunan kegiatan ekonomi dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan pelamar.

Tabel 3.48.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target (%)	n/a	5,47	5,20	4,94	5,50
2	Realisasi (%)	5,66	6,90	5,99	5,90	5,53
3	Capaian kinerja (%)	-	79,28	86,81	83,73	99,46

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi TPT Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,53 % berada sedikit di bawah target perencanaan tahunan sebesar 5,50%, sehingga belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan. kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pasca *recovery* dari tekanan pandemi COVID-19 yang belum optimal, khususnya pada sektor perdagangan serta pertanian/perkebunan sebagai sektor dominan sehingga kapasitas penyerapan tenaga kerja belum meningkat secara maksimal dan berdampak pada tertahannya penurunan tingkat pengangguran.

Tabel 3.49.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada
Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka

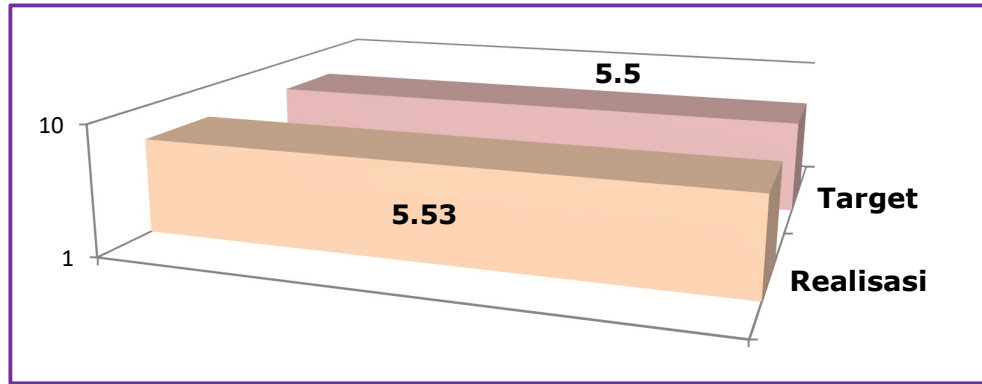
No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	Persen	5,50
2	Realisasi Kinerja	Persen	5,53
3	Capaian kinerja	Persen	99,46

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya kuat dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya pada sektor-sektor dominan seperti perdagangan dan pertanian/perkebunan yang cenderung mengalami perlambatan ekspansi, sehingga daya serap tenaga kerja tidak meningkat secara signifikan. Selain itu adanya tambahan angkatan kerja baru setiap tahun yang tidak sepenuhnya terserap pasar kerja turut memberikan tekanan terhadap tingkat

pengangguran, meskipun berbagai program pelatihan, fasilitasi penempatan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas pasar kerja daerah.

Gambar 3.29.
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan empat tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 sebesar 5,53 % menunjukkan kecenderungan perbaikan di mana dalam beberapa tahun terakhir TPT secara bertahap mengalami penurunan yang mencerminkan tren positif pemulihan pasar kerja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.50.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,66	6,90	5,99	5,90	5,50	5,53	99,46

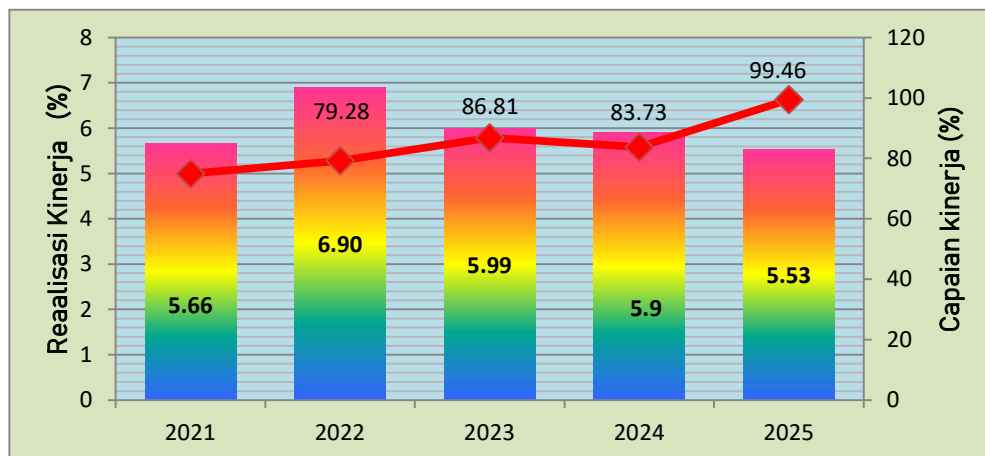
Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum tren perkembangan TPT ini disebabkan oleh :

- Pemulihan ekonomi pasca pandemi ditandainya dengan membaiknya aktivitas ekonomi secara bertahap meningkatkan kembali permintaan tenaga kerja.

- Pertumbuhan sektor unggulan sektor perdagangan dan pertanian/perkebunan yang mulai stabil turut mendorong penyerapan tenaga kerja, meskipun belum maksimal.
- Bertambahnya jumlah pencari kerja baru setiap tahun mempengaruhi tingkat pengangguran, terutama ketika penciptaan lapangan kerja tidak sebanding.
- Kegiatan peningkatan kompetensi, job fair, dan fasilitasi penempatan kerja membantu menekan laju peningkatan pengangguran.
- Meningkatnya aktivitas usaha mikro dan kecil memberikan alternatif kesempatan kerja di luar sektor formal.

Gambar 3.30.
Trend Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Realisasi kinerja TPT Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 5,53 % dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2029 sebesar 5,10 % menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 92,22 %, yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja telah mendekati sasaran akhir RPJMD dan berada pada jalur yang relatif terkendali. Selisih sebesar 0,43 poin persentase dari target jangka menengah mencerminkan bahwa upaya penurunan pengangguran telah berjalan efektif meskipun masih diperlukan penguatan intervensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar sisa kesenjangan tersebut dapat ditekan secara bertahap. Dengan mempertimbangkan tren penurunan TPT dalam beberapa tahun

terakhir, capaian ini memberikan sinyal positif bahwa target 5,10 % pada akhir periode perencanaan berpotensi tercapai apabila stabilitas pertumbuhan ekonomi dan program ketenagakerjaan terus dioptimalkan secara konsisten dan terarah.

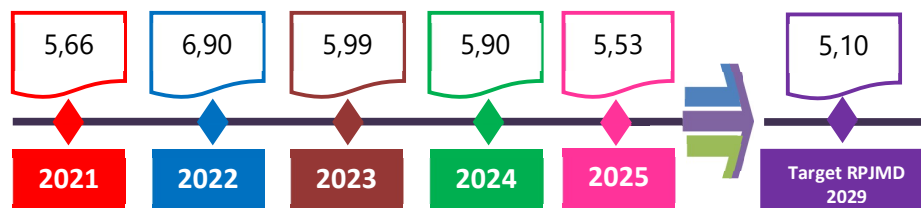
Tabel 3.51.
Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,53	5,10	92,22

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target kinerja TPT yang direncanakan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 5,10 % dan secara grafis tingkat pencapaiannya setiap tahun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut sebagai gambaran progres kumulatif menuju sasaran jangka menengah.

Gambar 3.31.
Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029

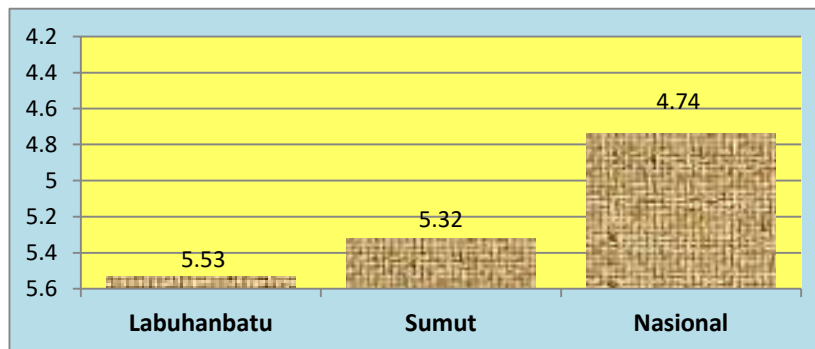


- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 5,32 % dan TPT nasional sebesar 4,74 %, capaian Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,53 % masih berada dibawah kedua indikator pembandingan tersebut, posisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan pengangguran daerah masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis dan terakselerasi. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai peluang bonus demografi untuk mendorong produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi, namun apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai justru berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi di masa mendatang. Kinerja masih perlu ditingkatkan agar mampu sejajar atau lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional melalui penguatan strategi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Gambar 3.32.
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2025



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian TPT tahun 2025 sebesar 5,53 % yang belum sepenuhnya mencapai target 5,50% menunjukkan bahwa meskipun tren penurunan pengangguran dalam beberapa tahun terakhir relatif terjaga, efektivitas penyerapan tenaga kerja masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural maupun kontekstual. Dari sisi struktural, komposisi perekonomian daerah yang masih didominasi sektor primer dan perdagangan dengan tingkat produktivitas serta elastisitas tenaga kerja yang terbatas menyebabkan penciptaan lapangan kerja baru tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja; sementara dari sisi kontekstual, dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi, fluktuasi harga komoditas, serta kehati-hatian dunia usaha dalam melakukan ekspansi turut mempengaruhi laju rekrutmen tenaga kerja. Di sisi lain meningkatnya jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi setiap tahun tanpa diimbangi dengan kesesuaian kompetensi terhadap kebutuhan pasar kerja (*mismatch*) juga memberikan tekanan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Namun demikian keberhasilan menjaga TPT tetap stabil dan mendekati target mencerminkan bahwa berbagai intervensi kebijakan telah memberikan dampak positif, antara lain melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja dan penyelenggaraan job fair, penguatan program kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM, serta dorongan terhadap investasi yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal. Alternatif solusi yang terus diupayakan ke depan meliputi peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri, perluasan sektor padat karya dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, serta optimalisasi kebijakan insentif investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, sehingga penurunan pengangguran dapat berlangsung lebih akseleratif, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka menengah maupun panjang

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam upaya penurunan TPT menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana telah diarahkan pada program-program yang memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja, seperti pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan kerja, serta pemberdayaan kewirausahaan dan UMKM. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian realisasi kegiatan secara berkala menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya menghasilkan output yang terukur dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Meskipun capaian TPT belum sepenuhnya memenuhi target, tingkat kemajuan yang mencapai 99,46 % mengindikasikan bahwa secara umum penggunaan sumber daya relatif efisien dalam menjaga stabilitas pasar kerja daerah. Namun demikian, untuk meningkatkan rasio efektivitas antara input dan outcome, masih diperlukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan pasar kerja, peningkatan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar setiap program ketenagakerjaan benar-benar memberikan daya ungkit yang lebih signifikan terhadap penurunan pengangguran secara berkelanjutan.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian target TPT Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025, beberapa program pembangunan daerah yang menjadi penunjang utama meliputi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan serta UMKM, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan sektor industri guna mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Tabel 3.52.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Program Penempatan Tenaga Kerja
3	Program Hubungan Industrial
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Diklat keterampilan pencari kerja serta pelatihan, pebekalan dan sertifikasi tenaga jasa konstruksi

3.2.10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia, berdasarkan tiga dimensi utama yaitu

ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM berfungsi sebagai dasar rekomendasi kebijakan, pemetaan tipologi desa, dan penentuan status desa. Adapun yang menjadi pilar utama IDM adalah sebagai berikut :

- a. Ketahanan Sosial : Mengukur kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman, dan fasilitas umum.
- b. Ketahanan Ekonomi : Mengukur keragaman produksi, akses pusat perdagangan, akses logistik, dan lembaga keuangan.
- c. Ketahanan Ekologi/Lingkungan : Mengukur kualitas lingkungan, potensi bencana, dan mitigasi bencana.

IDM merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa secara komprehensif. Adapun tujuan dan manfaat dari IDM adalah :

- a. Alat Ukur : mengevaluasi tingkat pembangunan desa yang dilakukan Kemendes PDTT sejak 2015.
- b. Dasar Kebijakan : informasi dasar untuk menetapkan status dan menentukan arah kebijakan, program, serta anggaran pembangunan desa.
- c. Pemberdayaan : mendorong kemandirian desa melalui pendekatan partisipatif.

Hingga saat ini data IDM tahun 2025 baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten masih belum dirilis secara resmi. Kondisi tersebut juga dapat dilihat pada laman resmi Kemendes PDTT yang belum menampilkan peringkat maupun nilai IDM untuk tahun tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan instrumen pengukuran, di mana pada tahun 2025 IDM tidak lagi digunakan dan digantikan dengan Indeks Desa sebagai metode pengukuran yang baru. Meskipun demikian perkembangan capaian IDM pada periode sebelumnya tetap dapat dijadikan sebagai gambaran untuk melihat dinamika pembangunan desa di daerah. Oleh karena itu analisis perkembangan nilai indeks selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024 masih relevan untuk menunjukkan arah kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 3.53.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Kinerja (poin)	0,6605	0,6748	0,6980	0,7072	Belum Rilis
Kategori	berkembang	berkembang	berkembang	berkembang	-

Sumber : Kemendes PDTT.

- *) Desa sangat tertinggal < 0,491
 Desa tertinggal nilai > 0,491 dan < 0,599
 Desa berkembang nilai > 0,599 dan < 0,707
 Desa maju nilai > 0,707 dan < 0,815
 Desa mandiri nilai > 0,815

Capaian realisasi kinerja IDM Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi nilai IDM pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,6605 poin dengan kategori desa berkembang. Pada tahun 2022 nilai tersebut mengalami peningkatan menjadi 0,6748 poin, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,6980 poin. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi nilai indeks sebesar 0,7072 poin, yang tetap menempatkan status desa pada kategori berkembang. Kenaikan nilai indeks dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan pada berbagai indikator yang menjadi komponen penilaian IDM, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan desa. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah desa dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 pada Indikator Kinerja Utama IDM Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa hingga saat ini capaian kinerja belum dapat dihitung secara komprehensif. Pada tahun 2025 target kinerja Indeks Desa Membangun ditetapkan sebesar 0,7188 poin. Namun demikian data realisasi kinerja untuk tahun tersebut masih belum dirilis secara resmi oleh Kemendes PDTT.

Tabel 3.54.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	poin	0.7188
2	Realisasi Kinerja	poin	Belum dirilis oleh Kemendes PDTT
3	Capaian kinerja	Persen	-

Sumber : Kemendes PDTT.

Belum tersedianya data realisasi tersebut mengakibatkan tingkat capaian kinerja pada indikator ini belum dapat dihitung ataupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perkembangan capaian IDM Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dimana realisasi indeks tercatat sebesar 0,6605 poin pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,6748 poin pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,6980 poin pada tahun 2023, dan mencapai 0,7072 poin pada tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 ditetapkan target kinerja sebesar 0,7188 poin, namun hingga saat ini realisasi capaian kinerja masih belum dirilis secara resmi oleh Kemendes PDTT sehingga tingkat capaian kinerja tahun berjalan belum dapat dihitung.

Tabel 3.55.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

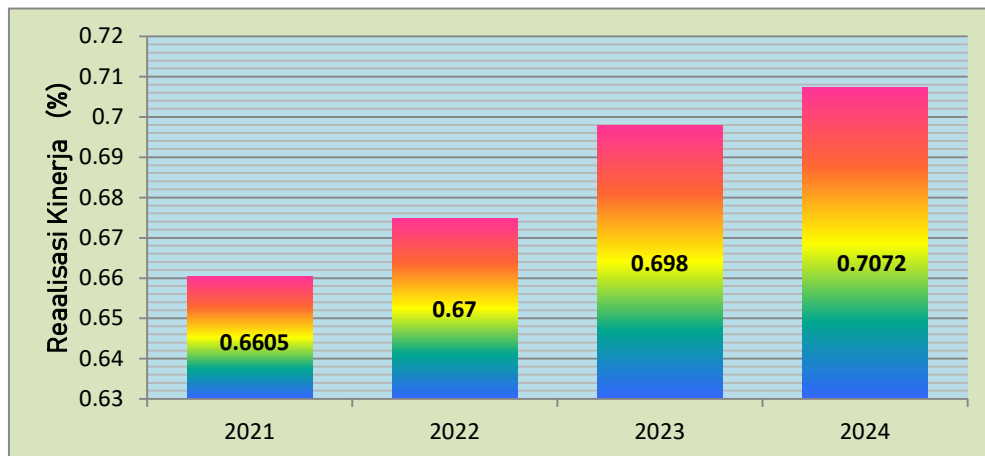
IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Desa Membangun (poin)	0,6605	0,6748	0,6980	0,7072	0,7188	Belum dirilis	-

Sumber : Kemendes PDTT.

Pada tahun 2025 IDM Kabupaten Labuhanbatu ditargetkan sebesar 0,7188 dengan kategori maju, upaya yang dilakukan akan berfokus pada transformasi desa menuju kemandirian dengan tiga fokus utama :

- a. Kenaikan status : mengentaskan desa "Sangat Tertinggal/Tertinggal" menjadi "Berkembang," lalu "Maju," hingga mencapai target puncak yaitu Desa Mandiri.
- b. Keseimbangan dimensi : memastikan pembangunan tidak hanya fisik, tapi seimbang antara ketahanan sosial (kesehatan/pendidikan), ekonomi (pasar/pendapatan), dan ekologi (lingkungan/bencana).
- c. Ketepatan intervensi : menjadikan data IDM sebagai acuan agar penyaluran Dana Desa dan program kementerian tepat sasaran sesuai kebutuhan spesifik tiap desa.

Gambar 3.33.
Trend Realisasi Indeks Desa Membangun
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa di Kabupaten Labuhanbatu mengalami perkembangan yang positif dari tahun ke tahun yang tercermin dari peningkatan nilai indeks secara bertahap. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan pada berbagai aspek yang menjadi indikator dalam penilaian IDM baik pada dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan desa.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target pertumbuhan IDM yang direncanakan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 0,7674 yang termasuk dalam kategori desa maju. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencapai target tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan capaian skor pada tiga dimensi utama penilaian IDM yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Ketiga dimensi tersebut merupakan indikator penting dalam menilai tingkat perkembangan desa serta kapasitas desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

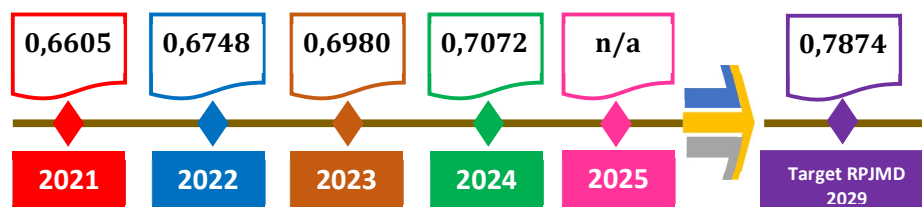
Tabel 3.56.
Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Desa Membangun (poin)	<i>Belum dirilis oleh Kemendes PDTT</i>	0,7874	-

Sumber : Kemendes PDTT.

Adapun langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dasar, seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta infrastruktur dasar desa. Selain itu diperlukan pula penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, antara lain melalui pengembangan dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Upaya lainnya adalah penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan desa di masa yang akan datang.

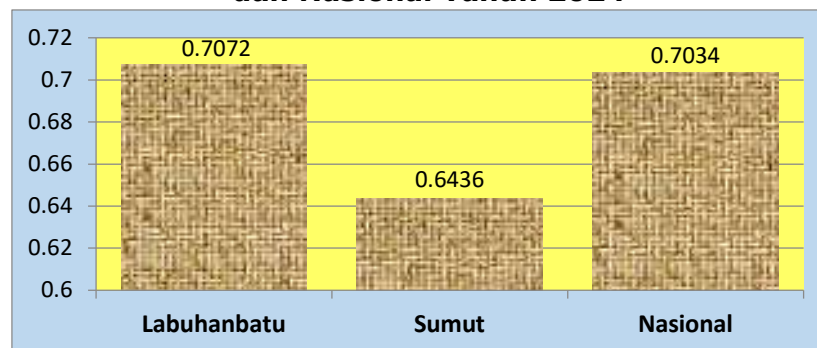
Gambar 3.34.
Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Pada tahun 2024 IDM nasional tercatat sebesar 0,7034 yang termasuk dalam kategori desa berkembang. Sementara itu IDM Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama mencapai 0,6436 dan juga berada pada kategori desa berkembang. Pencapaian tersebut antara lain didorong oleh adanya perbaikan pada beberapa dimensi penilaian IDM khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat. Di sisi lain IDM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,7072 yang juga berada dalam kategori desa berkembang. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Labuhanbatu mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

Gambar 3.35.
Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2024



Apabila dibandingkan secara langsung nilai IDM Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IDM Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa secara keseluruhan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan IDM pada dasarnya dipengaruhi oleh perbaikan pada tiga pilar utama penilaian yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung antara lain optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar desa, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan BUMDes, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Sejalan dengan hal tersebut berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai IDM di Kabupaten Labuhanbatu. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan status desa menuju kategori desa maju dan mandiri. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan indeks desa membangun di Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

a. Program Ketahanan Sosial.

- Peningkatan layanan kesehatan: pengaktifan posyandu, program BPJS Desa, dan penurunan angka stunting.
- Pendidikan dan kebudayaan : pengembangan pusat pembelajaran masyarakat, PAUD, dan sanggar budaya.
- Modal sosial : penguatan gotong royong, peningkatan keamanan desa, dan optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa.

b. Program Ketahanan Ekonomi.

- Pengembangan BUMDes dan UKM : penyertaan modal BUMDes, pelatihan usaha, dan bantuan alat produksi untuk industri rumah tangga.
- Infrastruktur ekonomi : pembangunan pasar desa, perbaikan jalan usaha tani, dan jembatan penghubung ekonomi.
- Konektivitas : peningkatan sarana prasarana internet desa untuk mendukung pemasaran digital.

c. Program Ketahanan Ekologi/Lingkungan

- Konservasi lingkungan : penanaman pohon.
- Infrastruktur ramah lingkungan.
- Mitigasi bencana : pelatihan tanggap bencana.

d. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- Perencanaan berbasis data.

- Optimalisasi peran pendamping desa : Pelatihan teknis bagi perangkat desa dan peran aktif pendamping dalam pemutakhiran data.
- Digitalisasi desa : maintenance *website* desa dan transparansi anggaran.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka peningkatan IDM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup positif dengan capaian nilai indeks sebesar 0,7072 yang berada pada kategori berkembang. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa pemanfaatan berbagai sumber daya pembangunan desa telah diarahkan secara optimal untuk memperkuat tiga dimensi utama penilaian IDM yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi, dengan menggunakan pendekatan berbasis data terpadu dari Kemendes PDTT.

Peningkatan nilai indeks tersebut juga didorong oleh optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, pengembangan potensi lokal desa, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik di tingkat desa. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Meskipun dalam pelaksanaannya tetap dilakukan langkah-langkah efisiensi anggaran namun kegiatan-kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan berdampak bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya yang tersedia tetap dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan desa serta mendorong peningkatan nilai IDM di Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja IDM beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target IDM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.57.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Desa
Membangun Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Makanan Minuman
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
9	Program Pengelolaan sumber daya manusia
10	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan
11	Program Pengelolaan Sumber Daya air
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum
13	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
14	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
15	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
16	Program pemberdayaan sosial
17	Program perlindungan dan jaminan sosial

Program yang mendukung pencapaian target kinerja IDM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Optimalisasi dana desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa

3.2.11. Sasaran Strategis 11 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Hasil pengukuran sasaran strategis 11 dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pada tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,36 % dengan predikat kinerja “istimewa”, yang mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan relatif efektif. Sasaran strategis ini diukur melalui IKU PDRB Perkapita sebagai parameter utama untuk menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan rata-rata penduduk, daya beli, serta kualitas distribusi hasil pembangunan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan.

PDRB Perkapita bukan sekadar angka statistik yang menggambarkan besaran nilai tambah ekonomi dibagi jumlah penduduk melainkan cerminan rata-rata kemampuan ekonomi setiap individu dalam suatu daerah untuk menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Didalamnya tersirat ukuran daya beli, tingkat pendapatan, serta kualitas aktivitas ekonomi yang berlangsung; semakin tinggi PDRB Perkapita semakin besar pula indikasi bahwa produktivitas masyarakat meningkat dan hasil pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara lebih luas. Dengan demikian, PDRB Perkapita menjadi barometer penting untuk membaca sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya pada ekspansi angka-angka makro semata.

Pada periode RPJMD ini, PDRB Perkapita ditetapkan sebagai salah satu IKU karena dipandang representatif dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi masyarakat; dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, capaian PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan dinamika perkembangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.58.
Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Perkapita (juta rupiah)	75,22	82,30	89,06	97,59	104,03

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan data tersebut PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 sebesar 75,22 juta rupiah menjadi 104,03 juta rupiah pada tahun 2025. Kenaikan ini merefleksikan adanya pertumbuhan nilai tambah ekonomi daerah yang relatif stabil serta meningkatnya rata-rata pendapatan yang dihasilkan per penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan kata lain pertumbuhan PDRB Perkapita tersebut menjadi sinyal bahwa rata-rata kemampuan ekonomi penduduk dalam menghasilkan pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekaligus menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah berjalan dalam koridor yang relatif stabil dan berkesinambungan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,65 juta rupiah sedangkan realisasinya mencapai 104,03 juta rupiah. Artinya terdapat selisih positif sebesar 3,38 juta rupiah dari target yang telah direncanakan. Jika dihitung dalam persentase capaian kinerja mencapai 103,36 % yang berarti realisasi melampaui target sebesar 3,36 %. Secara matematis angka ini menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi per penduduk yang dihasilkan selama tahun berjalan lebih tinggi dari proyeksi awal perencanaan.

Tabel 3.59.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada
Indikator Kinerja Utama PDRB Perkapita

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	juta rupiah	100,65
2	Realisasi Kinerja	juta rupiah	104,03
3	Capaian kinerja	Persen	103,36

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

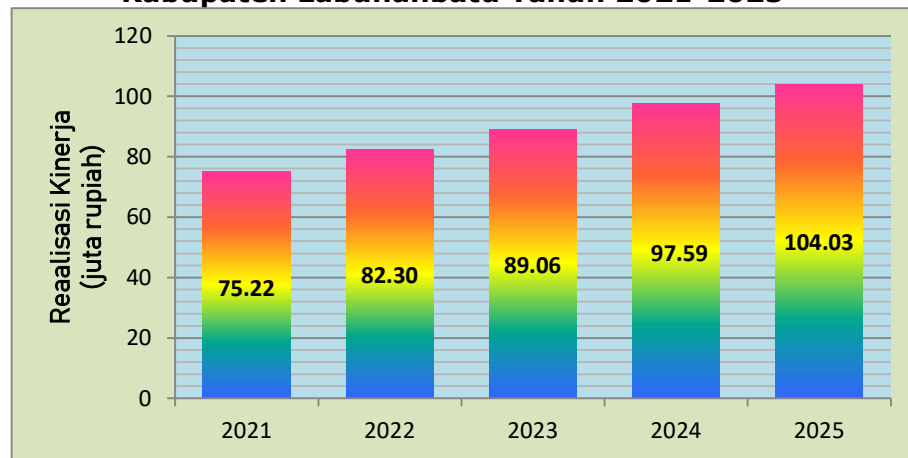
Melampauinya target tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi pada berbagai sektor unggulan mampu tumbuh secara relatif stabil dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan rata-rata pendapatan per penduduk. Selain itu kondisi ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah terutama dalam mendorong produktivitas sektor-sektor strategis serta

menjaga stabilitas pertumbuhan pasca dinamika ekonomi beberapa tahun terakhir.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 104,03 juta rupiah menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 97,59 juta rupiah. Dengan demikian terjadi kenaikan nominal sebesar 6,44 juta rupiah atau tumbuh sekitar 6,60 % secara tahunan (*year-on-year*).

Gambar 3.36.
Trend Realisasi PDRB Perkapita
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Dari sisi capaian kinerja terhadap target tahunan, tahun 2025 mencatatkan tingkat capaian sebesar 103,36 %, yang berarti melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Realisasi PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan Tahun 2025 sebesar 104,03 juta rupiah perlu dianalisis dalam kerangka target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029.

Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan (*progress rate*) capaian indikator terhadap sasaran akhir periode perencanaan.

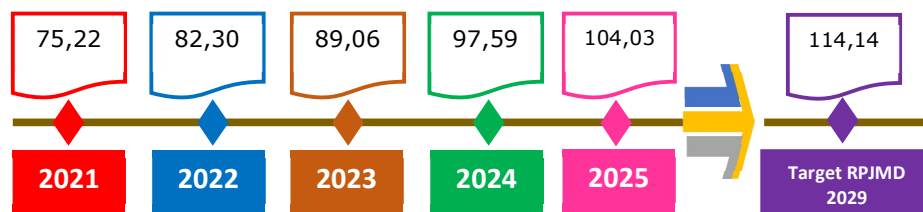
Tabel 3.60.
Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
PDRB Perkapita (juta rupiah)	104,03	114,14	91,14

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Jika ditarik dalam perspektif lima tahun terakhir (2021–2025), tren pertumbuhan terlihat konsisten dan progresif yakni dari 75,22 juta rupiah (2021), meningkat menjadi 82,30 juta rupiah (2022) kemudian 89,06 juta rupiah (2023) naik lagi menjadi 97,59 juta rupiah (2024) hingga mencapai 104,03 juta rupiah (2025). Pola ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah bergerak dalam lintasan pertumbuhan yang relatif stabil tanpa mengalami kontraksi dalam periode tersebut.

Gambar 3.37.
Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan dengan capaian PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,31 juta rupiah dan PDRB Perkapita nasional sebesar 83,7 juta rupiah, maka realisasi PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 104,03 juta rupiah berada pada posisi yang lebih tinggi secara signifikan.

Secara komparatif capaian Kabupaten Labuhanbatu melampaui rata-rata provinsi sebesar 25,72 juta rupiah dan melampaui rata-rata nasional sebesar 20,33 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas dan nilai tambah ekonomi per penduduk di Kabupaten

Labuhanbatu relatif lebih kuat dibandingkan dengan agregasi wilayah yang lebih luas.

Keunggulan tersebut mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah khususnya kontribusi sektor industri pengolahan dan komoditas unggulan— mampu menghasilkan output ekonomi yang tinggi per penduduk. Namun demikian capaian ini tetap perlu dicermati secara proporsional karena tingginya PDRB Perkapita belum secara otomatis menggambarkan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu penguatan aspek inklusivitas pertumbuhan tetap menjadi agenda penting agar keunggulan komparatif tersebut benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 yang melampaui target (103,36%) menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung yang secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah. Keberhasilan tersebut antara lain dipengaruhi oleh tumbuhnya sektor-sektor unggulan khususnya industri pengolahan, pertanian/ perkebunan, serta perdagangan yang secara struktural menjadi penopang utama pembentukan PDRB. Stabilitas harga komoditas strategis dan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa turut memperkuat nilai tambah regional.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara bertahap memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan membaiknya mobilitas ekonomi pasca tekanan perlambatan beberapa tahun sebelumnya juga menjadi faktor determinan yang mempercepat pertumbuhan nilai tambah per kapita.

Namun demikian, dinamika ekonomi tetap menyimpan potensi risiko. Ketergantungan pada sektor primer dan komoditas tertentu dapat menyebabkan fluktuasi apabila terjadi gejolak harga pasar atau penurunan produksi. Di sisi lain, kesenjangan produktivitas antar sektor dan wilayah juga berpotensi menahan laju peningkatan

kesejahteraan secara merata. Sebagai langkah antisipatif dan penguatan keberlanjutan kinerja, pemerintah daerah telah dan terus melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain :

- a. Diversifikasi struktur ekonomi melalui pengembangan hilirisasi produk pertanian dan industri pengolahan.
- b. Peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pelatihan manajerial, dan digitalisasi usaha.
- c. Penguatan konektivitas infrastruktur untuk memperlancar arus barang dan jasa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasional dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan pasar kerja.
- e. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU PDRB Perkapita tahun 2025 dapat dianalisis melalui keterkaitan antara input pembangunan—baik anggaran, sumber daya manusia, maupun aset/infrastruktur daerah—dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan berupa peningkatan nilai tambah ekonomi per kapita. Dengan realisasi PDRB Perkapita sebesar 104,03 juta rupiah atau mencapai 103,36 % dari target dapat diindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya pembangunan relatif efektif dan berada pada tingkat efisiensi yang memadai.

Dari sisi anggaran, capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa belanja daerah, khususnya yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dan penunjang pertumbuhan ekonomi, mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi awal. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan nilai tambah. Program pelatihan, pemberdayaan UMKM, serta fasilitasi investasi yang dilakukan pemerintah daerah berkontribusi terhadap optimalisasi kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.

Sementara itu pemanfaatan infrastruktur dan aset daerah yang semakin optimal —terutama dalam mendukung konektivitas distribusi barang dan jasa— turut meningkatkan efisiensi biaya produksi dan transaksi ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan PDRB Perkapita tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh optimalisasi sumber daya internal daerah. Secara keseluruhan capaian kinerja yang melampaui target dengan dukungan alokasi sumber daya yang terukur menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori baik. Namun demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja pembangunan memberikan nilai tambah ekonomi yang semakin besar dan berkelanjutan.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Keberhasilan capaian IKU PDRB Perkapita tahun 2025 yang melampaui target tidak terlepas dari implementasi berbagai program dan kegiatan strategis yang diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Tabel 3.61.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian PDRB
Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Program Pengendalian Hama Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
8	Program Penyelenggaraan Jalan
9	Program Penyelenggaraan Jembatan
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
11	Program Penempatan Tenaga Kerja
12	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
13	Program Promosi Penanaman Modal
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Aktivitas ekonomi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat

3.2.12. Sasaran Strategis 12 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk mengukur dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagai parameter komprehensif dalam menilai kualitas layanan, pemenuhan standar pelayanan, profesionalisme aparatur, efektivitas sistem pengelolaan pengaduan, ketersediaan sarana prasarana, hingga inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilaksanakan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan secara sistematis dan periodik melalui penilaian dokumen dan data dukung standar pelayanan, observasi lapangan untuk memastikan kesesuaian implementasi, wawancara dan klarifikasi dengan penyelenggara maupun pengguna layanan, serta evaluasi terhadap aspek kebijakan pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Hasil dari seluruh tahapan tersebut kemudian dikonversi menjadi nilai indeks yang dikategorikan sebagai dasar penetapan tingkat kinerja pelayanan publik sekaligus pijakan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil pengukuran sasaran strategis 12 dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih pada tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,68 % dengan predikat kinerja “baik”, yang

mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan relatif efektif dan sesuai dengan arah perencanaan. Sasaran strategis ini diukur melalui IKU Indeks Pelayanan Publik sebagai parameter utama untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas sistem birokrasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses pelayanan.

Tabel 3.62.
Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik (poin)	2,89 (C)	3,2 (B-)	3,29 (B-)	3,88 (B)	3,79 (B)

Sumber : KemenPAN dan RB.

Berdasarkan data tersebut capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 nilai IPP tercatat sebesar 2,89 poin dengan kategori C yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik masih memerlukan banyak perbaikan. Pada tahun 2022 nilai IPP meningkat menjadi 3,20 poin dengan kategori B- dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 3,29 poin (B-) menunjukkan adanya penguatan dalam pemenuhan standar pelayanan, perbaikan sistem, serta peningkatan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan layanan publik.

Lonjakan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 3,88 poin dan kategori B, yang mencerminkan adanya percepatan reformasi pelayanan publik, baik dari sisi kebijakan, sarana prasarana, maupun inovasi pelayanan. Sementara itu, pada tahun 2025 nilai IPP tercatat sebesar 3,79 poin dengan kategori B. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, posisi ini tetap berada dalam kategori baik dan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kabupaten Labuhanbatu relatif terjaga pada level yang positif.

Secara keseluruhan, perkembangan IPP tersebut menggambarkan adanya proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam

tata kelola pelayanan publik, sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi di daerah berjalan secara progresif dan semakin terarah.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Berdasarkan data yang disajikan, target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,92 poin sedangkan realisasinya mencapai 3,79 poin, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada 96,68%. Secara kuantitatif terdapat selisih sebesar 0,13 poin dari target yang direncanakan.

Dari sisi pencapaian nilai 96,68 % menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah terlaksana secara optimal dan mendekati target yang ditetapkan serta tetap berada dalam kategori B (baik). Artinya sebagian besar komponen penilaian dalam mekanisme evaluasi pelayanan publik —meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan inovasi pelayanan— telah dipenuhi dengan baik.

Tabel 3.63.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
pada Indikator Kinerja Utama Indeks Pelayanan Publik

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	poin	3,92 (B)
2	Realisasi Kinerja	poin	3,79 (B)
3	Capaian kinerja	Persen	96,68

Sumber : KemenPAN dan RB.

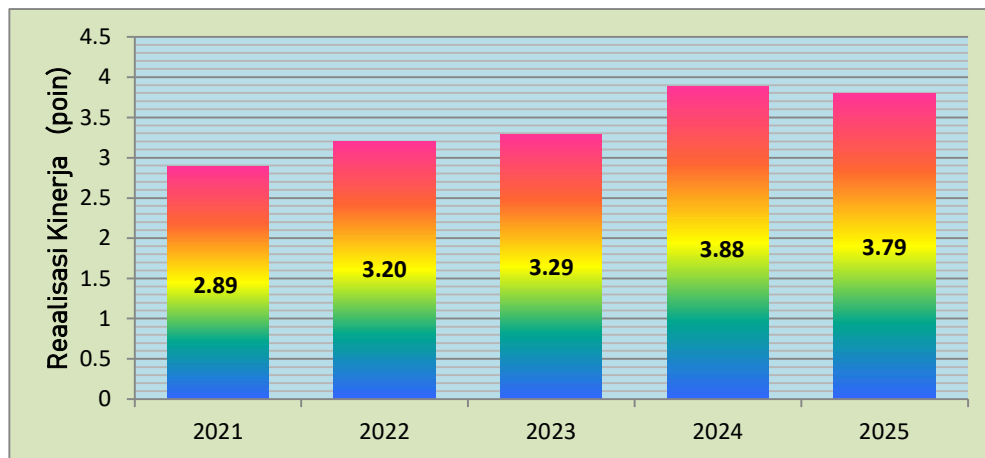
Secara keseluruhan capaian ini dapat dikategorikan baik dan stabil, karena tetap mempertahankan klasifikasi mutu pelayanan pada level B, meskipun belum menyentuh target yang lebih tinggi. Kedepan diperlukan langkah akseleratif dan pembinaan yang lebih terfokus pada unit layanan dengan nilai rendah agar target peningkatan indeks dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara tren dalam lima tahun terakhir nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 nilai indeks berada pada 2,89 poin

(kategori C), kemudian meningkat menjadi 3,2 poin (B-) pada tahun 2022 sebesar 3,29 poin (B-) pada tahun 2023, dan mencapai 3,88 poin (B) pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pelayanan publik, yang antara lain didorong oleh penguatan implementasi standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi inovasi pelayanan publik.

Gambar 3.38.
Trend Realisasi Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



Namun demikian pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan nilai meskipun masih berada pada kategori baik (B). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum masih relatif stabil tetapi diperlukan upaya penguatan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan agar dapat kembali meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.64.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Publik (poin)	2,89 (C)	3,2 (B-)	3,29 (B-)	3,88 (B)	3,92 (B)	3,79 (B)	96,68

Sumber : KemenPAN dan RB.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Pelayanan Publik selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Pada tahun 2025 realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu mencapai 3,79 poin dengan kategori B (Baik). Sementara itu, target akhir kinerja jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2029 adalah sebesar 4,08 poin dengan kategori A- (Sangat Baik). Dengan demikian tingkat kemajuan capaian terhadap target akhir jangka menengah telah mencapai 92,89 %.

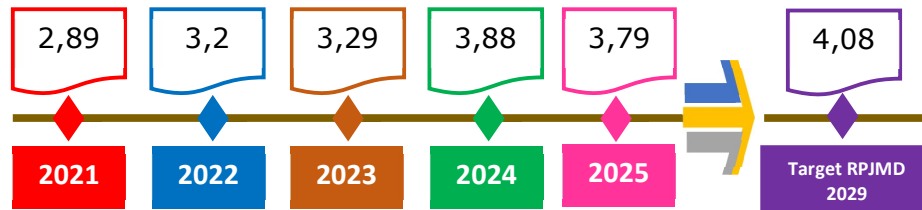
Tabel 3.65.
Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pelayanan Publik (poin)	3,79 (B)	4,08 (A-)	92,89

Sumber : KemenPAN dan RB.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu telah berada pada jalur yang cukup baik menuju target yang telah ditetapkan dalam periode perencanaan jangka menengah. Nilai indeks yang telah mendekati target akhir mengindikasikan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Secara umum capaian ini menunjukkan bahwa progres peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan cukup baik namun tetap memerlukan konsistensi dan penguatan berbagai aspek pelayanan agar target kategori A- pada tahun 2029 dapat tercapai secara optimal.

Gambar 3.39.
Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025



4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,27 poin maka realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 yang sebesar 3,79 poin berada pada tingkat yang masih lebih rendah dari capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendekati bahkan melampaui rata-rata capaian di tingkat provinsi. Meskipun demikian, nilai 3,79 poin masih berada pada kategori Baik (B) yang menandakan bahwa secara umum penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan cukup baik namun masih memerlukan berbagai upaya penguatan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 3,79 poin (B) menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 3,88 poin, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,09 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya perbaikan kinerja ke depan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain masih adanya relatif ketidakkonsistenan dalam penerapan standar pelayanan pada beberapa unit pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem

pelayanan berbasis digital yang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal di seluruh perangkat daerah penyelenggara pelayanan. Selain itu faktor kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima juga turut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di sisi lain capaian yang masih berada pada kategori baik (B) juga menunjukkan adanya faktor keberhasilan antara lain komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penerapan standar pelayanan, serta upaya peningkatan inovasi pelayanan yang terus dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara layanan. Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan beberapa langkah strategis antara lain penguatan implementasi standar pelayanan publik, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik pada perangkat daerah. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga target Indeks Pelayanan Publik kategori A- pada akhir periode jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 3,79 poin (B) menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan secara cukup efisien. Hal ini terlihat dari kemampuan perangkat daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik pada kategori baik, meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari upaya optimalisasi berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain melalui penerapan standar pelayanan, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan. Melalui pendekatan tersebut, perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa harus melakukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Selain itu koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga berbagai program peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan yang telah tersedia juga turut berkontribusi dalam menjaga efisiensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian untuk mendukung pencapaian target Indeks Pelayanan Publik pada kategori A- di akhir periode perencanaan masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi melalui penguatan digitalisasi pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan secara lebih optimal. Dengan demikian penggunaan sumber daya yang tersedia dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Keberhasilan capaian IKU Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 yang menunjukkan kinerja yang baik tidak terlepas dari implementasi berbagai program dan kegiatan strategis yang secara konsisten diarahkan pada penguatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan dan penguatan standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara layanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.66.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program Pembangunan Daerah
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
10	Program Penataan Bangunan Gedung
11	Program Penyelenggaraan Jalan
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
13	Program Pengembangan Perumahan
14	Program Kawasan Permukiman
15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
16	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
18	Program Penanggulangan Bencana
19	Program Pemberdayaan Sosial
20	Program Rehabilitasi Sosial
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
22	Program Penanganan Bencana
23	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
24	Program Penempatan Tenaga Kerja
25	Program Hubungan Industrial
26	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
27	Program Perlindungan Perempuan
28	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
29	Program Perlindungan Khusus Anak
30	Program Penanganan Kerawanan Pangan
31	Program Pengawasan Keamanan Pangan
32	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
33	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
35	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
36	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
37	Program Pengelolaan Persampahan
38	Program Pendaftaran Penduduk
39	Program Pencatatan Sipil
40	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Program Pembangunan Daerah
41	Program Administrasi Pemerintahan Desa
42	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
43	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
44	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
46	Program Pengelolaan Pelayaran
47	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
48	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
49	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
50	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
51	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
52	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
53	Program Promosi Penanaman Modal
54	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
55	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
56	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
57	Program Pengembangan Kebudayaan
58	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
59	Program Pembinaan Perpustakaan
60	Program Pengelolaan Arsip
61	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
63	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
64	Program Penyuluhan Pertanian
65	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
66	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
67	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
68	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
69	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
70	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
71	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
74	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
75	Program Kepegawaian Daerah
76	Program Penyelenggaraan Pengawasan
77	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Program Pembangunan Daerah
78	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
79	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
80	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Kegiatan pelayanan masyarakat di beberapa fasilitas layanan publik

3.2.13. Sasaran Strategis 13 : Meningkatkan Kualitas Keluarga yang Harmonis dan Berbudaya

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan instrumen pengukuran sistematis yang menggambarkan kualitas interaksi, toleransi, dan harmoni antar umat beragama dalam suatu wilayah. Indikator ini tidak sekadar menghitung frekuensi interaksi, melainkan mengukur kedalaman pemahaman, sikap saling menghormati, dan kapasitas dialog konstruktif di antara berbagai kelompok keagamaan. Kerukunan Umat Beragama merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan dan pertumbuhan bangsa Indonesia.

Melalui pengukuran tersebut, Indeks Kerukunan Umat Beragama memberikan gambaran mengenai kondisi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama, yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat yang majemuk. Dengan demikian indeks ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai keberhasilan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Kerukunan umat beragama sendiri merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung kemajuan dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat yang rukun, saling menghormati, dan mampu hidup berdampingan secara damai akan

menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, penguatan persatuan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.67.
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun		
	2023	2024	2025
Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	78,34	82,21	82,21

Sumber : Kementerian Agama.

Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Agama, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2023–2025 menunjukkan kondisi kerukunan yang relatif baik dan stabil. Pada tahun 2023 indeks tercatat sebesar 78,34 poin kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 82,21 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas hubungan sosial antar umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu, yang tercermin dari semakin kuatnya sikap toleransi, saling menghormati, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis.

Selanjutnya pada tahun 2025 Indeks Kerukunan Umat Beragama tercatat 82,21 poin, atau relatif stabil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu dapat dipertahankan pada kategori yang baik sehingga mampu mendukung terciptanya stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Hasil pengukuran sasaran strategis 13 dalam meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya dengan IKU Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat kinerja “baik”, yang mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan relatif efektif dan sesuai dengan arah perencanaan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Berdasarkan data yang disajikan, capaian IKU Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal. Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 82,21 poin dan realisasi kinerja yang dicapai juga sebesar 82,21 poin.

Dengan demikian tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut mencapai 100 persen yang menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan dapat tercapai secara penuh. Capaian ini mencerminkan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu tetap terjaga dengan baik melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

Tabel 3.68.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini pada Indikator Kinerja Utama
Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Target Kinerja	poin	82,21
2	Realisasi Kinerja	poin	82,21
3	Capaian kinerja	Persen	100

Sumber : Kementerian Agama.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak antara lain Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah dalam menjaga dan memperkuat sikap toleransi, saling menghormati, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data capaian kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu 2023–2025 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat kerukunan antar umat beragama pada kategori yang baik. Pada tahun 2023 realisasi

Indeks Kerukunan Umat Beragama tercatat sebesar 78,34 poin. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 82,21 poin yang menunjukkan semakin kuatnya kondisi toleransi, saling menghormati, serta keharmonisan hubungan antar umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada tahun 2025 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 82,21 poin, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 82,21 poin sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, sekaligus menjaga stabilitas kondisi kerukunan umat beragama di daerah.

Tabel 3.69.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	78,34	82,21	82,21	82,21	100,00

Sumber : Kementerian Agama.

Ke depan upaya penguatan dialog antar umat beragama, peningkatan peran lembaga keagamaan, serta penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat perlu terus dilakukan agar kondisi kerukunan yang telah terjaga dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 tercatat sebesar 82,21 poin. Sementara itu target akhir kinerja jangka menengah yang ditetapkan hingga tahun 2029 adalah sebesar 83,71 poin. Dengan capaian tersebut tingkat kemajuan terhadap target akhir jangka menengah telah mencapai 98,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu telah berada pada tingkat

yang sangat baik dan mendekati target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

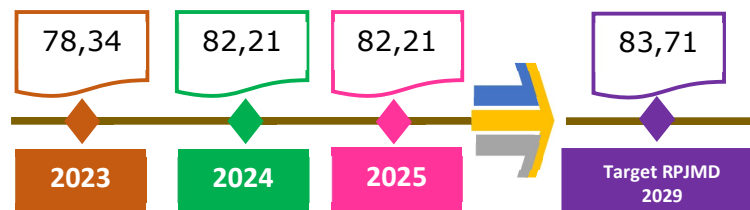
Tabel 3.70.
Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Labuhanbatu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

IKU	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Jangka Menengah (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	82,21	83,71	98,21

Sumber : Kementerian Agama.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga serta memperkuat toleransi, keharmonisan, dan kerja sama antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Gambar 3.40.
Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

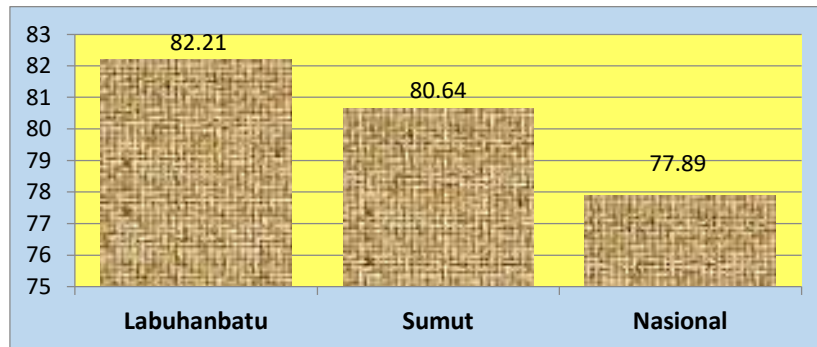


- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 tercatat sebesar 82,21 poin. Jika dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 77,89 poin serta capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 80,64 poin, maka nilai indeks Kabupaten Labuhanbatu berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama di daerah berada pada kategori yang baik dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil setelah pada tahun 2024

terjadi peningkatan dari 78,34 poin pada tahun 2023 menjadi 82,21 poin pada tahun 2024.

Gambar 3.41.
Perbandingan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2025



Keberhasilan mempertahankan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, peran aktif Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memfasilitasi dialog dan komunikasi antar umat beragama, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun sikap toleransi dan saling menghormati di tengah masyarakat. Selain itu berbagai kegiatan pembinaan kehidupan beragama, sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama serta forum dialog lintas agama juga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas hubungan antar umat beragama.

Di sisi lain tantangan yang masih perlu diantisipasi antara lain potensi munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat, penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial, serta dinamika sosial yang dapat mempengaruhi hubungan antar umat beragama. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan langkah antisipatif agar tidak berkembang menjadi potensi konflik sosial di masyarakat

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 82,21 poin yang mampu mencapai target kinerja menunjukkan bahwa kondisi kerukunan antar umat

beragama di daerah relatif terjaga dengan baik. Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi kehidupan beragama yang harmonis, peran aktif Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun komunikasi dan dialog antar umat beragama, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar kelompok masyarakat. Selain itu, berbagai kegiatan pembinaan kehidupan beragama, sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama, serta forum dialog lintas agama juga turut memberikan kontribusi dalam memperkuat hubungan yang harmonis antar umat beragama.

Di sisi lain, tantangan yang masih perlu diantisipasi antara lain dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang, potensi kesalahpahaman antar kelompok, serta pengaruh informasi yang tidak terverifikasi yang dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas kerukunan yang telah terbangun. Sebagai alternatif solusi pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Agama dan FKUB, peningkatan kegiatan dialog dan silaturahmi antar umat beragama, pembinaan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta sosialisasi nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 82,21 poin yang berhasil mencapai target kinerja menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam

mendukung upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama telah dilaksanakan secara cukup efisien. Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait dalam menjaga stabilitas hubungan antar umat beragama tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi peran berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan toleransi dan keharmonisan kehidupan beragama. Melalui koordinasi dan sinergi yang baik, berbagai program pembinaan, dialog lintas agama, serta kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Dengan adanya kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan, berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat kerukunan umat beragama dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun demikian untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, perlu terus dilakukan upaya peningkatan efisiensi melalui penguatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta pengembangan kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain pelaksanaan forum dialog dan silaturahmi antar umat beragama, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, serta sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sikap toleransi, saling

menghormati, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Tabel 3.71.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Program Pembangunan Daerah
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait.



Aktivitas FKUB sebagai wadah dialog dan koordinasi antarumat beragama dalam rangka memperkuat toleransi, mencegah konflik, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan rukun

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh IKU yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 maka selanjutnya dapat diuraikan tingkat pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator tersebut sebagai gambaran atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.72.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	63,79	Belum dirilis	-
2	Indeks Pembangunan Manusia	poin	75,28	75,79	100,68
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,00	7,37	81,41
4	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,50	3,47	99,14
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.46	4,18	76,56
6	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78,50	77,35	98,54
7	Indeks Infrastruktur	poin	67,09	56,88	84,78
8	Indeks Resiko Bencana	poin	121,05	175,17	69,10
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5.50	5,53	99,46
10	Indeks Desa Membangun	poin	0,7188	Belum dirilis	-
11	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	100,65	104,03	103,36
12	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,92	3,79	96,68
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	82,21	82,21	100,00

Secara keseluruhan, untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Labuhanbatu dengan tetap memperhatikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Perencanaan dan pengalokasian anggaran tersebut dilakukan secara terarah dan proporsional dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja yang ingin dicapai.

Melalui pendekatan tersebut, penggunaan anggaran diupayakan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap pencapaian target kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya yang tersedia dapat

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi penerimaan daerah melalui upaya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan dukungan serta partisipasi masyarakat. Mengingat struktur perekonomian Kabupaten Labuhanbatu yang masih didominasi oleh sektor primer maka diperlukan berbagai langkah strategis untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada potensi sektor tersebut.

Upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah perlu dilakukan secara lebih inovatif dan terarah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Hal ini penting agar peningkatan pendapatan daerah dapat dicapai melalui optimalisasi potensi yang ada, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian struktur pendapatan daerah diharapkan menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja sehingga risiko ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu dapat diminimalkan dan ketahanan fiskal daerah dapat semakin diperkuat.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.492.387.120.109,00. Dari target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp 1.379.353.090.829,16 atau 92,42 %. Rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah untuk setiap kelompok dan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.73.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2025 (berdasarkan LRA Per 31 Desember 2025, *Unaudited*)

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	286.636.141.323,00	246.559.999.775,16	86,01
	a Pajak Daerah	138.679.503.507,00	101.792.589.272,00	73,40
	b Retribusi Daerah	120.278.978.000,00	111.737.761.272,00	92,79
	c Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.023.127.316,00	13.023.127.316,00	100,00
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	14.654.532.500,00	20.006.521.915,16	136,52
2	Pendapatan Transfer	1.187.750.978.786,00	1.113.558.241.956,00	93,75
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.248.775.000,00	1.004.387.330.345,00	95,00
	a Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	71.680.666.000,00	61.827.719.700,00	86,25
	b Dana Alokasi Umum	709.843.629.000,00	708.539.112.807,00	99,81
	c DAK Fisik	9.655.761.000,00	8.103.161.420,00	83,92
	d DAK Non Fisik	188.558.584.000,00	167.174.623.174,00	88,65
	e Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
	f Dana Desa	77.510.135.000,00	58.742.713.244,00	75,78
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.502.203.786,00	109.170.911.611,00	83,65
	a Pendapatan Bagi Hasil	130.502.203.786,00	109.170.911.611,00	83,65
	b Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	18.000.000.000,00	15.925.938.395,00	88,48
	a Pendapatan Hibah/Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
	b Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Pendapatan Kapitasi JKN	18.000.000.000,00	19.234.849.098,00	106,86
Jumlah Pendapatan Daerah		1.492.387.120.109,00	1.379.353.090.829,16	92,42

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

B. Pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan alokasi belanja yang lebih memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan azas kepatutan,

kewajaran dan rasionalitas dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditargetkan sebesar Rp 1.524.517.156.583,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.204.561.076.891,55, Belanja Modal sebesar Rp 148.343.426.820,45, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.419.200.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp 170.193.452.871,00.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember TA 2025 realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.345.357.510.245,56 atau 88,24 % yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.091.790.129.973,56 atau 90,63 %, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 104.641.467.761,00 atau 70,54 %, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 425.861.000,00 atau 30,00 % serta realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 148.500.051.511,00 atau 87,25 %. Rekapitulasi target dan realisasi belanja daerah untuk setiap kelompok dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.74.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2025 (berdasarkan LRA Per 31 Desember 2025, Unaudited)

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	1.204.561.076.891,55	1.091.790.129.973,56	90,63
a	Belanja pegawai	748.462.141.704,20	681.326.752.476,00	91,03
b	Belanja Barang & Jasa	445.459.079.187,35	399.924.392.897,56	89,77
c	Belanja Hibah	10.639.856.000,00	10.538.984.600,00	99,05
d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	148.343.426.820,45	104.641.467.761,00	70,54
a	Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	92.250.000,00	20,50

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.192.223.646,00	30.873.553.327,00	90,29
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.805.907.845,45	23.143.921.067,00	41,47
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.378.170.439,00	50.041.886.659,00	87,21
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	457.124.890,00	434.104.708,00	94,96
f	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	55.752.000,00	92,92
3	Belanja Tidak terduga	1.419.200.000,00	425.861.000,00	30,00
4	Belanja Transfer	170.193.452.871,00	148.500.051.511,00	87,25
a	Belanja Bagi Hasil	14.580.450.351,00	11.849.198.944,00	81,26
b	Belanja Bantuan Keuangan	155.613.002.520,00	136.650.852.567,00	87,81
Jumlah Belanja Daerah		1.524.517.156.583,00	1.345.357.510.245,56	88,24

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut pembiayaan netto dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2025, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 32.130.036.474,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya berdasarkan posisi kas per 31 Desember 2024 terdapat SiLPA sebesar Rp32.130.036.474,00 (*audited*) sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan pada TA2025 tidak direncanakan. Secara rinci uraian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.75.
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
(berdasarkan LRA Per 31 Desember 2025, *Unaudited*)

No	Jenis Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	32.130.036.474,00	32.153.320.574,80	100,07
a	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.130.036.474,00	32.153.320.574,80	100,07
b	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00
c	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
d	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
e	Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
a	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	-	-	-
b	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
c	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Pembiayaan Netto		32.130.036.474,00	32.153.320.574,80	100,07

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

3.3.2. Anggaran pada Perjanjian Kinerja

Pada dokumen Perjanjian Kinerja telah dialokasikan sejumlah anggaran yang ditujukan untuk mendukung pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencapaian sasaran strategis serta meningkatkan kinerja indikator-indikator yang telah diperjanjikan. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam dokumen penganggaran pada setiap Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penghematan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan anggaran yang lebih cermat, terukur, dan berorientasi pada hasil setiap

program dan kegiatan diupayakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di antaranya sebagai berikut :

- Mengupayakan penyerapan anggaran secara lebih optimal serta memastikan penyampaian laporan keuangan dan kinerja secara tepat waktu guna menjamin ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan hingga akhir tahun anggaran.
- Melakukan persiapan penyusunan APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur khususnya dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mendorong Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
- Melakukan percepatan pelaksanaan belanja daerah khususnya pada belanja modal serta belanja barang dan jasa yang berkaitan dengan proses dan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3.3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selama tahun 2025 pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah merealisasikan sebanyak 1.095 paket pekerjaan dengan total efisiensi anggaran sebesar Rp 74.741.265.328,11 atau sebesar 36,24 %. Berdasarkan jenis pekerjaannya kegiatan pengadaan barang/jasa pada tahun 2025 didominasi oleh paket pengadaan barang sebanyak 860 paket sementara sisanya terdiri dari paket pekerjaan lainnya sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Adapun rekapitulasi pengadaan barang/jasa pemerintah selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.76.
Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang Dikelola Unit Layanan Pengadaan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Penawaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Penghematan (%)
1	Konstruksi	185	59.476.726.930	57.720.335.590,38	1.756.391.339,62	2,95
2	Pengadaan barang	860	137.294.998.026	65.624.304.207,48	71.670.693.818,52	52,20
3	Jasa konsultasi	26	4.122.183.652	3.480.429.516,36	641.754.135,64	15,57
4	Lainnya	24	5.350.929.600	4.678.503.565,67	672.426.034,33	12,57
Total		1.095	206.244.838.208	131.503.572.879,89	74.741.265.328,11	36,24

Sumber : Bagian PBJ Setdakab Labuhanbatu.

Capaian efisiensi tersebut mencerminkan adanya upaya optimalisasi dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara lebih terencana, transparan, dan kompetitif sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan.

3.4. *Benchmark* Sasaran Capaian Kinerja

Benchmarking capaian sasaran kinerja adalah suatu proses mengidentifikasi "sasaran dan indikator kinerja" terhadap proses dan target sebagai tolok ukur kinerja Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan utama dari *Benchmarking* adalah untuk memahami dan mengevaluasi sasaran indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu lembaga/institusi.

Benchmarking kinerja Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan mengacu pada capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui pendekatan ini evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga dibandingkan dengan capaian daerah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan tingkat daya saing pembangunan daerah.

Adapun aspek kinerja yang dijadikan sebagai tolok ukur *benchmarking* meliputi kinerja sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial/kemiskinan, serta kinerja ekonomi. Capaian pada

sektor-sektor tersebut kemudian dikomparasikan dengan capaian kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Tabel 3.77.
Benchmark Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2025

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Kinerja Kesehatan	1 Balita Gizi Buruk Yang Ditemukan	anak	26	14	7	7	4
		2 Jumlah Kematian Bayi	kasus	14	20	7	7	44
		3 Jumlah Kematian Ibu	kasus	12	10	3	3	6
		4 Penggunaan Alat KB	orang	60.183	27.555	41.706	41.706	28.295 *
		5 Jumlah Kasus AIDS	kasus	33	23	22	22	37
		6 Kasus Positif Malaria	kasus	209	274	230	230	144
		7 Jumlah Pasien TB (semua tipe) yang dilaporkan	kasus	667	895	1.155	1.155	1.331
		8 Angka Harapan Hidup	tahun	72,21	72,55	73,13	73,13	73,45
2	Kinerja Pendidikan	1 Angka Melek Huruf 15-24 tahun	%	73,16	73,96	74,70	99,91	
		2 Angka Partisipasi Kasar SD	%	107,75	109,21	108,60	103,49	107,22
		3 Angka Partisipasi Kasar SMP	%	92,28	86,55	98,69	94,28	104,61
		4 Angka Partisipasi Kasar SMA	%	99,79	98,12	94,46	87,17	90,05
		5 Angka Melanjutkan SMP, SMA dan PT	%	80,79	83,00			
3	Kinerja Ketenagakerjaan	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,66	6,90	5,99	5,90	5,53
		2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,84	63,51	64,84	65,46	66,21
4	Kinerja Sosial / Kemiskinan	1 Persentase Penduduk Miskin	%	8,74	8,26	7,99	7,84	7,37
		2 Indeks Kedalaman Kemiskinan	indeks	1,32	0,69	1,40	0,83	0,66

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	2025
		3 Indeks keparahan kemiskinan	indeks	0,29	0,11	0,37	0,13	0,11
5	Kinerja Ekonomi	1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku	Rp juta	37.606.880,00	41.809.008,33	45.762.600,00	50.801,782	54.832,77
		2 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku	%	8,52	11,17	9,46	11,01	7,93
		3 PDRB atas Dasar Harga Konstan	Rp juta	24.147.560,00	25.305.985,43	26.579.280,00	27.924,86	29.092,77
		4 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan	%	3,85	4,80	5,03	5,06	4,18

Ket : *) draf profil Kesehatan 2025.

3.5. Pencapaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja utama yang telah diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga mencatat berbagai pencapaian kinerja lainnya yang turut mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Pencapaian tersebut mencerminkan adanya sinergi antar perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesejahteraan masyarakat.

Berbagai capaian tersebut antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan implementasi reformasi birokrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta keberhasilan dalam memperoleh penghargaan atau pengakuan dari pemerintah pusat maupun lembaga independen. Selain itu, terdapat pula inovasi daerah yang dikembangkan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran Pembangunan.

3.5.1. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan

pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi.

1. Upaya Pencegahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 dengan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 700/200/Itkab/2018 (salinan SK terlampir). Tim Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari

- a. Tim Pengendali yang bertugas untuk mengendalikan, mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Tim Inteligent yang bertugas untuk melaporkan, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemetaan kepada kelompok kerja pelaksanaan tugas sapu bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Tim Penindakan yang bertugas untuk melaporkan hasil kelompok kerja dan melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- d. Tim Yustisi yang bertugas melaporkan dan memberikan masukan dan saran baik secara administrasi atau secara pidana.

Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi yang digagas KPK adalah pelaporan *online* pada Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada laman <https://korsupgah.kpk.go.id/mcp> secara periodik setiap triwulan telah dilaporkan selama tahun 2024. Pelaporan ini mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

2. Upaya Penindakan.

Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibantu oleh sebuah lembaga pemberantasan korupsi yaitu Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan Kepolisian Resor Labuhanbatu. Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Kepolisian Resor Labuhanbatu. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi : tukar menukar data/informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan dilakukan kerjasama ini adalah memperkuat sinergitas dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara Pemerintah Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

3. Upaya Edukasi.

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3.5.2. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

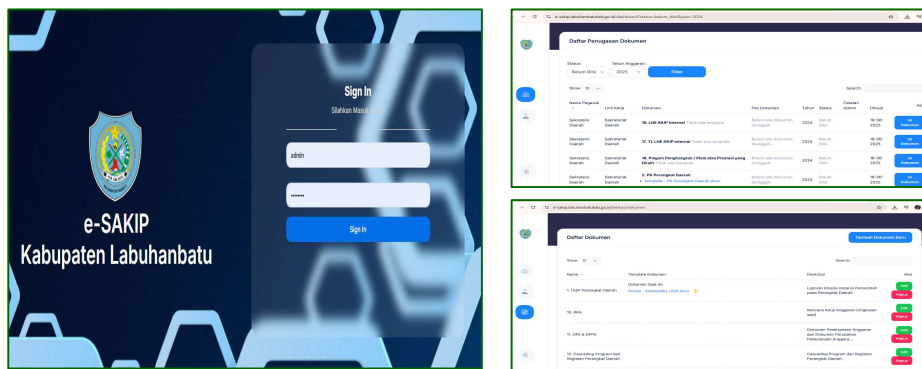
1. Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam era transformasi digital yang kian berkembang, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil menjadi semakin tidak terelakkan. Setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya mampu merencanakan program secara sistematis tetapi juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menjawab tantangan tersebut pada awal tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menghadirkan aplikasi e-SAKIP sebagai instrumen strategis dalam memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Melalui e-SAKIP proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan tersinergi dalam satu sistem yang mendorong efektivitas,

efisiensi, serta peningkatan kualitas kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Penerapan e-SAKIP ditetapkan melalui Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 061/27/Org/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Aplikasi e-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupateri Labuhanbatu merupakan manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administratif tetapi juga memperkuat budaya kerja berbasis kinerja di mana setiap capaian dapat diukur secara objektif dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan demikian e-SAKIP menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan, sekaligus sebagai alat kendali yang efektif bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis.

Gambar 3.42.
Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Labuhanbatu
<https://e-sakip.labuhanbatukab.go.id/>



Sebagai upaya memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan kegiatan Workshop Internalisasi Aplikasi e-SAKIP. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun pemahaman yang komprehensif dan keseragaman persepsi di kalangan perangkat daerah terhadap penggunaan aplikasi e-SAKIP sebagai instrumen utama.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu mengoperasikan aplikasi e-SAKIP secara optimal, sehingga proses monitoring dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan

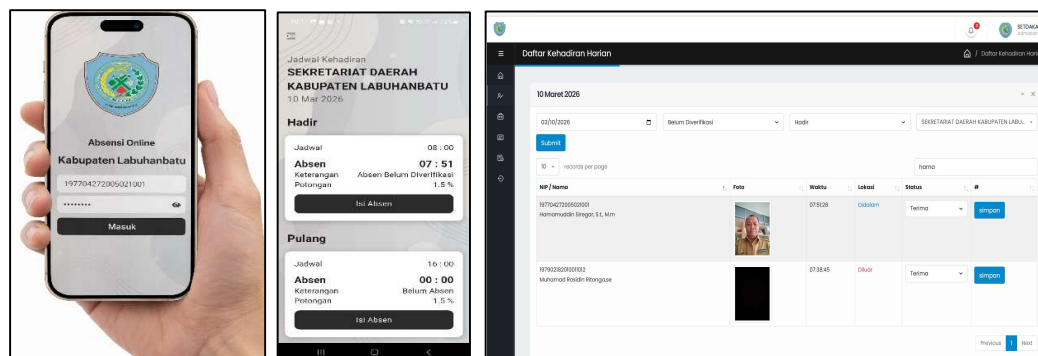
Gambar 3.43.
Workshop Internalisasi Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Labuhanbatu



2. Aplikasi Absensi Online Labuhanbatu (OLA).

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengembangkan aplikasi OLA. Aplikasi OLA untuk melakukan presensi kehadiran ASN dengan menggunakan telepon mobile berbasis android. Sistem kerja aplikasi ini adalah melakukan pencatatan kehadiran ASN berbasis GPS pada titik koordinat tempat bekerja yang telah ditetapkan. Hasil presensi akan diverifikasi oleh pejabat perangkat daerah yang ditunjuk dan secara sistem dapat menghitung jumlah jam bekerja, kehadiran, dan keterlambatan dalam periode tertentu. Hasilnya akan menjadi komponen beban kerja dan disiplin kerja ASN untuk menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN setiap bulannya.

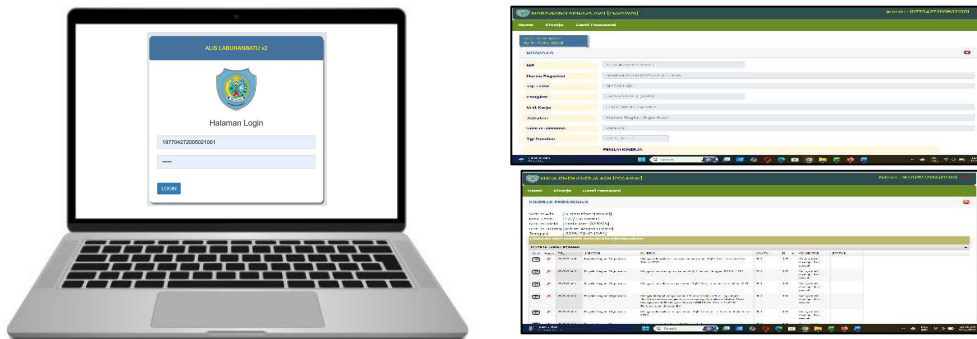
Gambar 3.44.
Aplikasi Absensi Online Kabupaten Labuhanbatu



2. Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System (ALIS).

Dalam pelaporan kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengembangkan aplikasi ALIS. Aplikasi ALIS merupakan bab besar yang didalamnya terdiri dari pelaporan kinerja ASN (SKP tahunan dan pelaporan kinerja harian), penilaian kinerja bawahan, database kepegawaian, dan usulan mutasi data kepegawaian. Setiap ASN harus melaporkan kinerjanya setiap hari kerja dan dinilai oleh atasannya. Hasil penilaian atasan merupakan komponen prestasi kerja ASN untuk menghitung TPP ASN setiap bulannya. Secara riil time setiap ASN bisa melihat progress TPP-nya karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi OLA.

Gambar 3.45.
Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System
Kabupaten Labuhanbatu



Aplikasi OLA dan ALIS ini telah digunakan sebagai dasar untuk membayar TPP ASN selama tahun 2025. Selama kurun waktu tahun tersebut, proses digitalisasi khususnya pelaporan kinerja ASN sudah berjalan salah satu manfaatnya adalah perhitungan TPP ASN dihitung secara otomatis. Hal ini juga telah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh KPK melalui MCP-KPK yang dievaluasi setiap triwulan.

3.5.3. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Penghargaan dapat didefinisikan sebagai bentuk ganjaran atau pengakuan yang diberikan untuk memotivasi individu maupun instansi agar meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, baik sebagai pengakuan atas prestasi yang dicapai oleh masing-masing

perangkat daerah maupun atas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

3.6. SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Pelayanan Publik Award

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 memberikan SAKIP Award yang diberikan kepada 5 (lima) Perangkat Daerah yang terbaik dalam mengimplementasikan SAKIP. Metode dan tahapan penilaian SAKIP Award mengacu pada PermenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan komponen penilaian yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penganugerahan SAKIP AWARD ini diberikan bertepatan dengan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ke-79 pada tanggal 17 Oktober 2024.

Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 sehingga memperoleh SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 adalah :

1. Peringkat I Predikat A : Dinas Kesehatan
2. Peringkat II Predikat BB : Dinas Kelautan dan Perikanan
3. Peringkat III Predikat BB : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4. Peringkat IV Predikat BB : Inspektorat Daerah
5. Peringkat V Predikat BB : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar 3.46.
Penganugerahan SAKIP Award
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu



Disamping itu juga pada kesempatan yang sama diberikan penghargaan kepada Puskesmas Janji sebagai Nilai Unit Layanan Tertinggi pada Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Ombudsman RI dengan nilai 90,73. Diinformasikan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Labuhanbatu untuk pertama sekali mendapatkan predikat Zona Hijau (nilai 81,71, kategori B, opini kualitas tinggi) pada ajang Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah oleh Ombudsman RI.

Gambar 3.47.
Penganugerahan Pelayanan Publik Award
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu



3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPan dan RB

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Labuhanbatu memperoleh nilai 60,65 dengan predikat "B". Pencapaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 60,09 dengan predikat yang sama. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut, proses tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh KemenPAN-RB dapat dipantau melalui matriks yang disajikan berikut ini.

Tabel 3.78.
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Perencanaan Kinerja								
a	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result-oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) serta cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan tugas/mandat organisasinya	Melakukan reviu dokumen perencanaan tahunan di tingkat Pemda dan PD untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (result-oriented)	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan dokumen perencanaan untuk memastikan implementasi sesuai rencana	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
b	Menyempurnakan rencana aksi pada level PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Melakukan identifikasi dan pemetaan keselarasan antara PK dengan rencana aksi yang telah disusun pada masing-masing PD	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Menyusun rencana aksi yang memuat tahapan kegiatan, target waktu, output, dan penanggung jawab secara jelas	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi guna memastikan ketercapaian kinerja	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
c	Melakukan revidi dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	Melakukan revidi penjenjangan kinerja dari level pimpinan (Kepala Daerah) hingga level operasional dengan memastikan keterkaitan antar level (<i>cascading</i> kinerja)	Seluruh PD					Bappeda dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Menyelaraskan indikator kinerja pada setiap level jabatan agar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang	Seluruh PD					Bappeda dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi penjenjangan kinerja secara berkala	Seluruh PD					Bappeda dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
d	Menyusun identifikasi dan pemetaan pada <i>cascading</i> kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Melakukan identifikasi keterkaitan antar sasaran dan indikator kinerja lintas PD untuk menemukan potensi <i>crosscutting</i>	Seluruh PD					Bappeda dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Menyelaraskan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK) PD agar mencerminkan keterkaitan <i>crosscutting</i> dan tidak terjadi duplikasi program/kegiatan	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja lintas PD secara berkala	Seluruh PD					Bappeda dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
2	Pengukuran Kinerja								
a	Menyempurnakan IKU dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja	Melakukan revidi terhadap kesesuaian IKU dengan tujuan dan sasaran strategis serta memastikan orientasi hasil (<i>outcome</i>)	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Menyusun dan menyempurnakan definisi operasional, formulasi	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		penghitungan, dan sumber data yang valid untuk setiap IKU agar jelas, tidak multitafsir, dan mudah diukur							
		Menetapkan IKU hasil penyempurnaan melalui dokumen resmi	Seluruh PD					Bapppeda	Proses penyelesaian
	b	Menyempurnakan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja yang bisa mengukur kinerja dari organisasi sampai individu, serta melakukan pemantauan kinerja secara <i>real time</i>	Melakukan evaluasi terhadap aplikasi monitoring kinerja yang saat ini digunakan, termasuk fitur, kelemahan, dan kebutuhan pengembangan	Seluruh PD				Diskominfo dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Mengembangkan/menyempurnakan aplikasi dengan fitur utama: input IKU, rencana aksi, realisasi kinerja, serta dashboard monitoring berbasis data	Seluruh PD					Diskominfo dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan aplikasi serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan	Seluruh PD					Diskominfo dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
	c	Melakukan monev atas rencana aksi serta mengidentifikasi terkait aksi-aksi yang dilakukan dan melaporkannya secara berkala untuk memastikan ketercapaian kinerjanya	Mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan rencana aksi, termasuk deviasi antara target dan realisasi	Seluruh PD				Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan target waktu dan output yang telah ditetapkan	Seluruh PD					Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	d	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Menghimpun dan memvalidasi data hasil pengukuran kinerja pada tingkat Pemda, PD, hingga individu	Seluruh PD				Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Melakukan analisis capaian kinerja untuk mengidentifikasi tren, gap kinerja, dan faktor penyebab keberhasilan/kegagalan	Seluruh PD					Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil kinerja dalam kebijakan strategis dan manajemen SDM	Seluruh PD					Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
3		Pelaporan Kinerja							
	a	Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan secara umum kepada masyarakat melalui website resmi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik	Menyiapkan dokumen LKjIP yang telah final, termasuk versi ringkasan (executive summary) yang mudah dipahami publik.	Seluruh PD				Diskominfo dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Mengunggah (<i>upload</i>) dokumen LKjIP secara lengkap dan tepat waktu pada website resmi Pemda	Seluruh PD					Diskominfo	Proses penyelesaian
		Memastikan aksesibilitas dokumen (format PDF yang ringan, link aktif, dan mudah diunduh)	Seluruh PD					Diskominfo	Proses penyelesaian
	b	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam atas ketercapaian kinerja	Melakukan verifikasi dan validasi data kinerja dari seluruh PD untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data	Seluruh PD				Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
			Menyusun narasi analisis kinerja yang lebih mendalam, tidak hanya deskriptif tetapi juga menjelaskan sebab-akibat dan rekomendasi perbaikan.	Seluruh PD				Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Melakukan evaluasi pasca penyusunan laporan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan	Seluruh PD					Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
	c	Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya	Melakukan analisis terhadap capaian kinerja, termasuk identifikasi gap antara target dan realisasi serta faktor penyebabnya	Seluruh PD				Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Mengintegrasikan hasil analisis kinerja ke dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renja, RKPD, dan Perjanjian Kinerja)	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
		Menetapkan target kinerja tahun berikutnya secara lebih realistis dan menantang berdasarkan capaian sebelumnya	Seluruh PD					Bappeda	Proses penyelesaian
4		Evaluasi Internal							
	a	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD	Melakukan revidi terhadap laporan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penyajian temuan dan rekomendasi	Seluruh PD				Inspektorat	Proses penyelesaian
		Menyusun rekomendasi yang lebih operasional, spesifik, dan solutif untuk setiap temuan pada seluruh aspek SAKIP	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian
		Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian
	b	Menyusun matriks rencana tindak lanjut yang memuat aksi,	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilakukan PD dan memastikan ketepatannya	penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian							
		Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut serta memberikan asistensi/ pendampingan kepada PD	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian
		Menyusun laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi AKIP dan menyampaikannya kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian
	c	Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level Perangkat Daerah	Menetapkan indikator dan kriteria penilaian kinerja SAKIP (nilai, predikat, dan tren peningkatan)	Seluruh PD				Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
		Mengimplementasikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP internal tahunan	Seluruh PD					Bagian Organisasi Setdakab	Proses penyelesaian
	d	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi evaluator AKIP, termasuk pemahaman instrumen evaluasi dan teknik <i>professional judgement</i>	Seluruh PD				Inspektorat	Proses penyelesaian
		Melakukan pendampingan (coaching/mentoring) dalam pelaksanaan evaluasi internal untuk meningkatkan ketepatan <i>professional judgement</i>	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian
		Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja evaluator dalam pelaksanaan evaluasi internal.	Seluruh PD					Inspektorat	Proses penyelesaian

Meskipun demikian, hasil evaluasi tersebut juga mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas implementasi SAKIP dapat lebih optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa area perbaikan yang menjadi perhatian antara lain penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan indikator kinerja yang lebih berorientasi hasil (*outcome*), peningkatan kualitas analisis dalam laporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut LHE yang diterima menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun langkah-langkah strategis perbaikan melalui rencana aksi tindak lanjut yang terarah dan terukur. Tindak lanjut tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan yang lebih substantif dalam tata kelola kinerja, sehingga implementasi SAKIP benar-benar menjadi instrumen manajemen kinerja yang efektif.

Dengan demikian proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 oleh KemenPAN-RB selanjutnya dipantau secara sistematis melalui matriks rencana aksi yang disajikan pada halaman berikut, yang memuat langkah-langkah perbaikan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan sebagai tolok ukur capaian yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 secara umum merefleksikan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Indikator kinerja dimaknai sebagai instrumen ukur yang spesifik, terukur, dan representatif—baik secara kuantitatif maupun kualitatif—yang digunakan untuk menilai aspek masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak sehingga mampu menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan secara objektif dan akuntabel.

LKjIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya cukup berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029. Secara umum Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan daerah merupakan tahapan strategis yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Misi berisi penjabaran bagaimana visi dapat dicapai. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022 yang terdiri dari 7 (tujuh) misi telah dilakukan analisa terkait pencapaian kelima misi dimaksud. Misi diperoleh setelah secara bertahap menganalisa sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk setiap misi pembangunan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 pada setiap sasaran strategis pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Pencapaian Sasaran Kinerja Strategis
Kabupaten Labuhanbatu 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	1	Belum dirilis	Belum terukur
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1	101,68	Istimewa
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	1	81,41	Baik
4	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	1	99,14	Baik
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	76,56	Butuh perbaikan
6	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1	98,54	Baik
7	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1	84,78	Baik
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	1	69,10	Butuh perbaikan
9	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1	99,46	Baik

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian
10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	1	Belum dirilis	Belum terukur
11	Meningkatkan pendapatan masyarakat	1	103,36	Istimewa
12	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	1	96,68	Baik
13	<i>Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya</i>	1	100,00	Baik

Keterangan : ● > 100 % (istimewa), ● 80 % < X ≤ 100 % (baik),
● 60 % < X ≤ 80 (butuh perbaikan), ● 20 % < X ≤ 60 (kurang),
● 0 % < X ≤ 20 (sangat kurang), ● belum dirilis

Mengacu pada tabel tersebut, dari 13 (tiga belas) sasaran strategis pembangunan daerah yang diukur terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori capaian istimewa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan kategori capaian baik, meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial, mewujudkan iklim investasi yang kompetitif, meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya.

Adapun 2 (dua) sasaran strategis masih dalam kategori butuh perbaikan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana, yang menunjukkan perlunya penguatan intervensi kebijakan dan optimalisasi program pembangunan pada sektor terkait. Sementara itu terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang belum dapat diukur, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa, dikarenakan IKU-nya belum dirilis oleh evaluator terkait.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian kinerja pada setiap IKU pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama tahun berjalan. Adapun capaian kinerja pada masing-masing IKU pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Labuhanbatu 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum dirilis	●	Belum terukur	●
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					
2	Indeks Pembangunan Manusia	101,68	●	Istimewa	●
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial					
3	Persentase Penduduk Miskin	81,41	●	Baik	●
Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif					
4	Indeks Daya Saing Daerah	99,14	●	Baik	●
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah					
5	Pertumbuhan Ekonomi	76,56	●	Butuh perbaikan	●
Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau					
6	Indeks Ketahanan Pangan	98,54	●	Baik	●
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas					
7	Indeks Infrastruktur	84,78	●	Baik	●
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana					
8	Indeks Resiko Bencana	69,10	●	Butuh perbaikan	●
Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja					
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	99,46	●	Baik	●
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa					

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian
10	Indeks Desa Membangun	Belum dirilis	Belum terukur
Meningkatkan pendapatan masyarakat			
11	PDRB Perkapita	103,36	Istimewa
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih			
12	Indeks Pelayanan Publik	96,68	Baik
Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya			
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	100,00	Baik

Keterangan : ● > 100 % (istimewa), ● 80 % < X ≤ 100 % (baik),
● 60 % < X ≤ 80 (butuh perbaikan), ● 20 % < X ≤ 60 (kurang),
● 0 % < X ≤ 20 (sangat kurang), ● belum dirilis

Berdasarkan tabel tersebut, dari 13 (tiga belas) IKU yang diperjanjikan pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) IKU dengan kategori capaian istimewa, yaitu *Indeks Pembangunan Manusia* dan *PDRB Perkapita*, yang menunjukkan kinerja pembangunan pada aspek kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya terdapat 7 (tujuh) IKU dengan kategori capaian baik, meliputi *Persentase Penduduk Miskin*, *Indeks Daya Saing Daerah*, *Indeks Ketahanan Pangan*, *Indeks Infrastruktur*, *Tingkat Pengangguran Terbuka*, *Indeks Pelayanan Publik*, serta *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, yang secara umum mencerminkan capaian kinerja yang sesuai dengan target dan menunjukkan stabilitas pembangunan di berbagai sektor strategis.

Adapun 2 (dua) IKU masih dalam kategori butuh perbaikan, yaitu *Pertumbuhan Ekonomi* dan *Indeks Risiko Bencana*, yang mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan, optimalisasi program, serta peningkatan sinergi lintas sektor guna mendorong pencapaian target yang lebih optimal. Sementara itu terdapat 2 (dua) IKU yang belum dapat diukur yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi* dan *Indeks Desa Membangun*, dikarenakan hasil penilaian belum dirilis oleh instansi evaluator terkait, sehingga capaian kinerjanya belum dapat disajikan pada periode pelaporan ini

Selanjutnya beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target kinerja pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang telah berjalan dengan baik serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah selesai dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
2. Memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh komunitas berbasis masyarakat, kalangan akademisi, institusi pendidikan, serta dunia usaha, sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Melakukan reorientasi kebijakan dan program pembangunan melalui penyusunan program-program baru yang bersifat inovatif dan terobosan, dengan menyesuaikan terhadap dinamika perkembangan serta tuntutan pembangunan yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyadari bahwa hal tersebut tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, setiap kekurangan yang ada hendaknya menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Berkaitan dengan capaian target yang belum optimal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan terus berupaya mengambil langkah-langkah konstruktif dan konkret melalui penguatan kerja yang sinergis, inovatif, dan kolaboratif antar perangkat daerah serta dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga berbagai kendala yang dihadapi maupun potensi risiko yang mungkin timbul dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan ditangani sedini mungkin.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program dan

kegiatan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Melalui kerja sama, komitmen, serta upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan pada periode mendatang seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara lebih optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Rantauprapat, Maret 2026

Kepati Labuhanbatu,





BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup IKU dalam Peraturan ini adalah :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Penetapan IKU;
- c. Penggunaan IKU; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*).
- (4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PENGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI LABUHANBATU,

MAYA HASMITA

Diundangkan di Rantauprapat
Pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
 NOMOR : 8 TAHUN 2026
 TANGGAL : 12 MARET 2026
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KABUPATEN LABUHANBATU

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target					Penanggung Jawab
	Tujuan	Sasaran						2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital		Indeks Reformasi Birokrasi	Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah Indonesia.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) = Nilai RB General + Nilai RB Tematik (dengan bobot tertentu).	Kemenpan RB	Poin	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	Kemenpan RB
2		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Cakupan Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan	1/3 (Indeks Harapan Hidup + Indeks Pendidikan + Indeks Standar Hidup Layak)	BPS	Poin	75,28	75,34	75,48	75,63	75,77	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial		Persentase Penduduk Miskin	Persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan	100% (penduduk dibawah garis kemiskinan/jumlah penduduk).	BPS	Persen	6	5,79	5,58	5,38	5,19	Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perukim, Dinas PMD dan OPD terkait
4		Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah	Dipublikasi oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	BRIN	Poin	3,50	3,65	3,90	4,05	4,09	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Kenaikan Produk Domestik Bruto yang menunjukkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu.	100% $\{ \frac{PDB}{t-PDB} \}$	BPS	Persen	5,46	5,89	6,36	6,87	7,41	BPS
6		Meningkatnya	Indeks	Mengukur kondisi pangan	Rumus Sederhana	Dinas	Poin	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	Dinas Pangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target					Penanggung Jawab
	Tujuan	Sasaran						2025	2026	2027	2028	2029	
		ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Ketahanan Pangan	suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi: Ketersediaan (cukup, aman), Keterjangkauan/Akses (ekonomi, fisik, sosial), dan Pemanfaatan (nutrisi, kebersihan, kesehatan)	(Konseptual) = sum (Skor Standar Indikator x Bobot Indikator)\).	Pangan BPS							
7		Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Ukuran kuantitatif yang terukur untuk menilai kualitas, kinerja, atau kepuasan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur (fisik seperti jalan, air, energi, telekomunikasi, dll.)	Indeks Infrastruktur = (Bobot Transportasi * Nilai Indeks Transportasi) + (Bobot Air Bersih * Nilai Indeks Air Bersih) + ..	Dinas PUPR	Persen	67,09	68,44	69,82	71,23	72,67	Dinas PUPR
8		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Resiko Bencana	Alat ukur kuantitatif yang mengintegrasikan Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity) suatu wilayah untuk menghasilkan angka tunggal yang menggambarkan tingkat risiko kerugian akibat bencana, bertujuan memberi informasi bagi perencanaan mitigasi dan manajemen risiko bencana di level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota	Risiko (R) = (H x V) / C H = Bahaya V = Kerentanan C = Kapasitas	BPBD	Poin	121,05	118,92	116,84	114,79	112,77	BPBD
9	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	100% (Jumlah Pengangguran /Jumlah Angkatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja	Persen	5,50	5,40	5,29	5,19	5,10	Dinas Tenaga Kerja
10		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Ukuran komposit yang mengukur status kemajuan dan kemandirian desa melalui tiga dimensi utama	1/3 (Indeks Sosial + Indeks Ekonomi + Indeks Lingkungan)	Dinas PMD	Persen	0,7188	0,7303	0,7424	0,7549	0,7874	Dinas PMD

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definis Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target					Penanggung Jawab
	Tujuan	Sasaran						2025	2026	2027	2028	2029	
				(sosial, ekonomi, ekologi/lingkungan) dan diklasifikasikan menjadi lima status (sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, mandiri), digunakan sebagai instrumen dasar untuk perencanaan pembangunan desa, penyaluran Dana Desa, dan koordinasi antar lembaga									
11		Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	Nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut, yang berfungsi sebagai indikator rata-rata kemakmuran penduduk dan diukur dalam satuan rupiah per jiwa	PDRB/Jumlah Penduduk.	BPS	Juta Rupiah	100,65	108,78	110,80	112,82	114,14	BPS
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih		Indeks Pelayanan Publik	Instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pengukuran ini dilakukan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang pada awal tahun 2026 diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.	$IPP = \sum (\sum (Xi/n) \times \text{Bobot}) \times 25$ Xi adalah skor jawaban responden untuk unsur ke-i. n adalah jumlah responden. Bobot adalah nilai penimbang untuk setiap unsur (misal 0.11). Σ atau Sigma menunjukkan penjumlahan.	Kemenpan RB	Poin	4,10	4,35	4,85	5,20	3,48	Kemenpan RB

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target					Penanggung Jawab
	Tujuan	Sasaran						2025	2026	2027	2028	2029	
13		Meningkatnya kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Instrumen pengukuran untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama berdasarkan persepsi masyarakat mengenai kondisi hubungan antarumat beragama yang harmonis, saling menghargai, dan bekerja sama.	Diukur melalui survei berdasarkan indikator-indikator kunci seperti toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Seringkali menggunakan metode statistik seperti Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengukur variabel laten dari jawaban responden melalui kuesioner. Hasilnya berupa skor indeks yang menunjukkan tingkat kerukunan (misalnya, sangat rendah hingga sangat tinggi	Badan Perlindungan Masyarakat	Poin	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	Badan Perlindungan Masyarakat

Rantauprapat, 12 Maret 2026

Bupati Labuhanbatu

Maya Hasmita



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Hj. MAYA HASMITA, Sp. OG, MKM

Jabatan : BUPATI LABUHANBATU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahun 2026 yang sesuai dengan lampiran kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Rantauprapat.

2026



BUPATI LABUHANBATU

dr. Hj. MAYA HASMITA, Sp. OG, MKM

No	Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,35	4,85	5,20	3,48	3,50
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	67,80
12	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,00	5,79	5,58	5,38	5,19	5,00
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	84,22

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029, maka target kinerja utama tahun 2026 ditetapkan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,80
2	Indeks Infrastruktur	Poin	68,44
3	Indeks Risiko Bencana	Poin	118,92
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,34
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,40
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,89
7	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,65
8	Indeks Desa Membangun	Persen	0,7303
9	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	108,78
10	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,35
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Poin	64,63
12	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	5,79
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	Poin	82,21

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pagu anggaran sesuai dengan urusan dan perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Bidang Urusan dan Anggaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026

KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	ANGGARAN
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	409,005,605,734
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	396,651,942,541
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30,223,271,761
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,256,370,398
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13,725,368,171
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7,036,645,325
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3,886,287,550
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,077,851,029
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2,886,700,720
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2,161,127,587
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10,245,438,560
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,018,207,210
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,121,533,077

KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	ANGGARAN
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,171,220,779
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21,648,275,339
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,621,121,893
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	27,312,800
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	17,988,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3,257,994,720
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3,237,634,915
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6,692,984,096
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	173,596,901
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	50,689,884
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2,770,109,886
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	174,930,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,765,015,767
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13,245,102,599
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15,819,816,345
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	260,498,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	36,928,286,380
4.02	SEKRETARIAT DPRD	65,280,367,943
5.01	PERENCANAAN	5,492,974,649
5.02	KEUANGAN	182,109,708,203
5.03	KEPEGAWAIAN	4,800,340,589
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	652,859,800
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,970,789,543

KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	ANGGARAN
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13,435,150,771
7.01	KECAMATAN	43,662,991,262
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,790,304,943
	TOTAL APBD	1,337,354,415,670

Selanjutnya Pelaksanaan program dan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Program dan Anggaran Pembangunan Daerah
Per Program Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	105,086,000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28,218,065,000
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	931,573,800
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	699,750,000
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	654,304,777
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	280,614,300
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109,600,000
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	200,000,000
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3,812,000
10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	9,500,000
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	22,440,000
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	521,699,900

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,896,052,000
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	124,078,000
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,200,000,781
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,442,395,400
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9,902,250,500
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	194,290,000
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	63,452,800
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,300,000
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	32,587,500
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	328,562,000
23	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,791,334,480
24	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	213,393,680
25	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35,000,000
26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	88,871,427,051
27	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8,096,314,200
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	40,543,550
29	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	28,035,500
30	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	33,416,000
31	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	43,087,500
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5,220,000,000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
33	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	43,970,800
34	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	57,400,000
35	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	48,461,400
36	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,107,732,000
37	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	399,999,910
38	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	41,083,426
39	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	89,853,064
40	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	65,377,400
41	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	17,089,500
42	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	33,447,600
43	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	154,222,000
44	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19,191,000
45	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,800,000
46	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	394,548,000
47	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	138,417,600
48	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	160,928,200
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	270,000,000
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1,200,000,000
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,900,000,000
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	37,226,400
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
	PUBLIK	528,778,795
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	127,948,700
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	156,800,729,889
56	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	43,614,000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,972,550,677
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	83,090,517,590
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	75,069,000
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	38,430,000
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	755,392,000
62	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	500,000,000
63	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	10,500,000
64	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	271,016,000
65	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118,500,000
66	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2,007,922,964
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	499,720,645
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300,000,000
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	173,596,901
70	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	51,750,000
71	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	652,859,800
72	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7,646,000
73	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50,000,000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
74	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	63,220,210
75	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	6,440,000
76	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	299,832,512
77	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	51,412,500
78	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	13,796,000
79	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	23,810,000
80	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	550,813,875
81	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25,678,000
82	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	28,249,884
83	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	87,754,000
84	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4,341,619,000
85	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,822,715,600
86	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	150,191,200
87	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25,000,000
88	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10,230,500
89	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2,992,844,000
90	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	102,000,000
91	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	10,170,072,400
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	865,736,494,608

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
93	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	83,752,000
94	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	656,782,205
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11,183,544,000
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16,491,683,341
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	227,043,000
98	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	230,273,000
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,027,002,200
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	17,988,000
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	27,312,800
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,171,861,608
103	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	31,045,237
104	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	175,920,000
105	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	222,106,000
106	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	260,498,000
107	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	239,354,400
108	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20,233,000
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	337,153,700
110	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3,522,650,000
111	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	36,512,400
112	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	250,801,000
113	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	207,268,000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP)
114	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	325,229,300
115	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	12,620,000
116	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	12,710,700
117	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	38,288,660
118	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	414,364,000
119	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	14,960,000
120	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	25,026,850
	TOTAL APBD	1,337,354,415,670

Rantauprapat.

2026



dr. Hj. MAYA HASMITA, Sp. OG, MKM

BAB III

PENUTUP

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bersih dan terukur dan penyesuaian dengan kondisi, perjanjian kinerja perubahan merupakan bentuk komitmen seluruh pelaksana urusan pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja ini memuat target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 yang harus dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya. Target kinerja dimaksud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.

Demikian dokumen perjanjian kinerja perubahan ini disusun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

Lampiran 3**FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**

KABUPATEN : LABUHANBATU
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	63.79	Belum dirilis	-
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	poin	75.28	75.79	100.68
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin	persen	6.00	7.37	81.41
4	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3.50	3.47	99.14
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.46	4.18	76.56
6	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78.50	77.35	98.54
7	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur	poin	67.09	56.88	84.78
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	poin	121.05	175.17	69.10
9	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5.50	5.53	99.46
10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	poin	0.7188	Belum dirilis	-
11	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	100.65	104.03	103.36
12	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Pelayanan Publik	poin	3.92	3.79	96.68
13	Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	82.21	82.21	100.00

Lampiran 4
**KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SASARAN STRATEGIS TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**

KABUPATEN : LABUHANBATU
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Indikator Kinerja				Kategori Capaian ^)					
			Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Istimewa	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang	Tidak Terukur
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	63.79	Belum dirilis	-						✓
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	poin	75.28	75.79	100.68	✓					
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin	persen	6	7.37	81.41		✓				
4	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3.5	3.47	99.14		✓				
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.46	4.18	76.56			✓			
6	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78.5	77.35	98.54		✓				
7	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur	poin	67.09	56.88	84.78		✓				
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	poin	121.05	175.17	69.10			✓			
9	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5.5	5.53	99.46		✓				
10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	poin	0.7188	Belum dirilis	-						✓
11	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	uta Rupia	100.65	104.03	103.36	✓					
12	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Pelayanan Publik	poin	3.92	3.79	96.68		✓				
13	Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	82.21	82.21	100.00		✓				

*) Kategori capaian :

- > 100 %
- 80 % < X ≤ 100 %
- 60 % < X ≤ 80 %
- 20 % < X ≤ 60 %
- 0 % < X ≤ 20 %

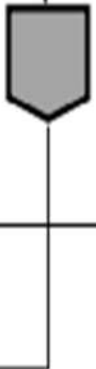
- = Istimewa
- = Baik
- = Butuh perbaikan
- = Kurang
- = Sangat Kurang

 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB LABUHANBATU	Nomor SOP	061/843 / SOP-AP / Org / 2022
	Tgl Pembuatan	6 Januari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	Januari 2022
	Disahkan oleh	 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU I. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, M. MA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650417 199103 1 004
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 2021.
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	- S-1 Sederajat; - Mampu mengoperasikan program komputer (MS. Word, Excel dan Internet dll); - Memiliki tingkat ketelitian yang baik; - Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan; - Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; - Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
- SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.	- Jaringan Internet; - Komputer ; - ATK; - Printer; - Flash Disc.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
- Penyusunan LKIP paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Dibuat tim schedule terkait proses penyusunan LKIP.	- Data – data dari OPD diolah dan hasilnya untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021

NO	Uraian Kegiatan	Penyusunan LKjIP Kabupaten	Kasubbag Tataaksana Akuntabilitas	Kabag Organisasi	Inspektorat	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Out Put
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Membuat surat kepada OPD perihal permintaan data capaian kinerja dan penyusunan dokumen LKjIP								- Surat Dinas.	2 Hari	- Surat Dinas
2	Mengirim surat kepada OPD perihal permintaan data capaian kinerja dan penyusunan dokumen LKjIP								- Surat Dinas dikirim ke OPD.	2 Hari	- Tersampainya Surat Tepat Waktu
3	Menerima, mengumpulkan dan mengolah data capaian kinerja dari OPD.								- Data - data dari OPD diolah.	5 Hari	- Draft Dokumen Laporan Kinerja
4	Melaksanakan proses penyusunan LKjIP, antara lain: - Menganalisa data capaian kinerja OPD - Melaksanakan pembahasan bersama Tim SAKIP Kabupaten terkait data capaian kinerja OPD, penyusunan schedule rencana kerja Tim SAKIP. - Mempelajari / mencocokkan data capaian indikator kinerja dan capaian RPJMD / Renstra - Melakukan perbandingan kinerja actual dengan rencana target dan capaian pada tahun sebelumnya								- Data - data dari OPD diolah.	25 Hari	
5	Menyediakan draft dokumen LKjIP Kabupaten Labuhanbatu kepada Pimpinan untuk dikoreksi								- Draft Dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	4 hari	- Draft Dokumen Laporan Kinerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Melakukan perbaikan sesuai hasil koreksi Tim Penyusun LkjlP Kabupaten.								- Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	5 Hari	
7	Penyampaian Draf LKjlP ke Inspektorat untuk dilakukan Reviu								- Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	5 Hari	Pernyataan telah di reviu dari Inspektorat
8	Menyediakan kembali draf dokumen LKjlP Kabupaten yang sudah diperbaiki kepada Pimpinan untuk dimintakan paraf / persetujuan.								- Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	3 Hari	
9	Menyediakan draf dokumen LKjlP Kabupaten yang sudah di paraf kepada Sekretaris Daerah.								- Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	2 Hari	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Menyediakan draf dokumen LkjiP Kabupaten kepada Bupati untuk ditandatangani.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	1 Hari	
11	Setelah mendapat persetujuan dan di tandatangani oleh Bupati, dokumen LKjiP Kabupaten Labuhanbatu dikirimkan ke MenPANRB, Mendagri, Bappenas, BPKP dan Gubernur Sumatera Utara.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	2 Hari	
12	Melakukan Upload LKjiP Kabupaten melalui e-SAKIP (<i>esr.menpan.go.id</i>) dan Penyampaian Hardcopy LKjiP Kabupaten ke Mendagri Bappenas RI Gubernur Sumatera Utara dan BPKP Prov Sumatera Utara								- Jaringan Internet - Laptop - Plasdisk - Buku LkjiP Kabupaten	4 Hari	Tersampaikannya LKjiP tepat waktu

Lampiran 6

Daftar Penghargaan yang Diterima selama Tahun 2025

1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2025 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Badan Publik Informatif

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan diberikan pada tanggal 18 Desember 2025 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.



2. Penghargaan Widya Dharma Pratama pada puncak Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025

Widya Dharma Pratama adalah kategori/tingkatan penghargaan bagi Bunda PAUD yang berhasil menunjukkan kinerja dan kontribusi nyata dalam memajukan pendidikan anak usia dini di wilayahnya. Kegiatan itu dihadiri istri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed pada tanggal 13 November 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.



3. Pemda TERCEPAT dalam penyaluran Dana Desa Tahap I TA. 2025 secara TUNTAS dan Pemda TERCEPAT Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2024 secara TUNTAS

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat memberikan penghargaan tanggal 29 Juli 2026 di Aula Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu.



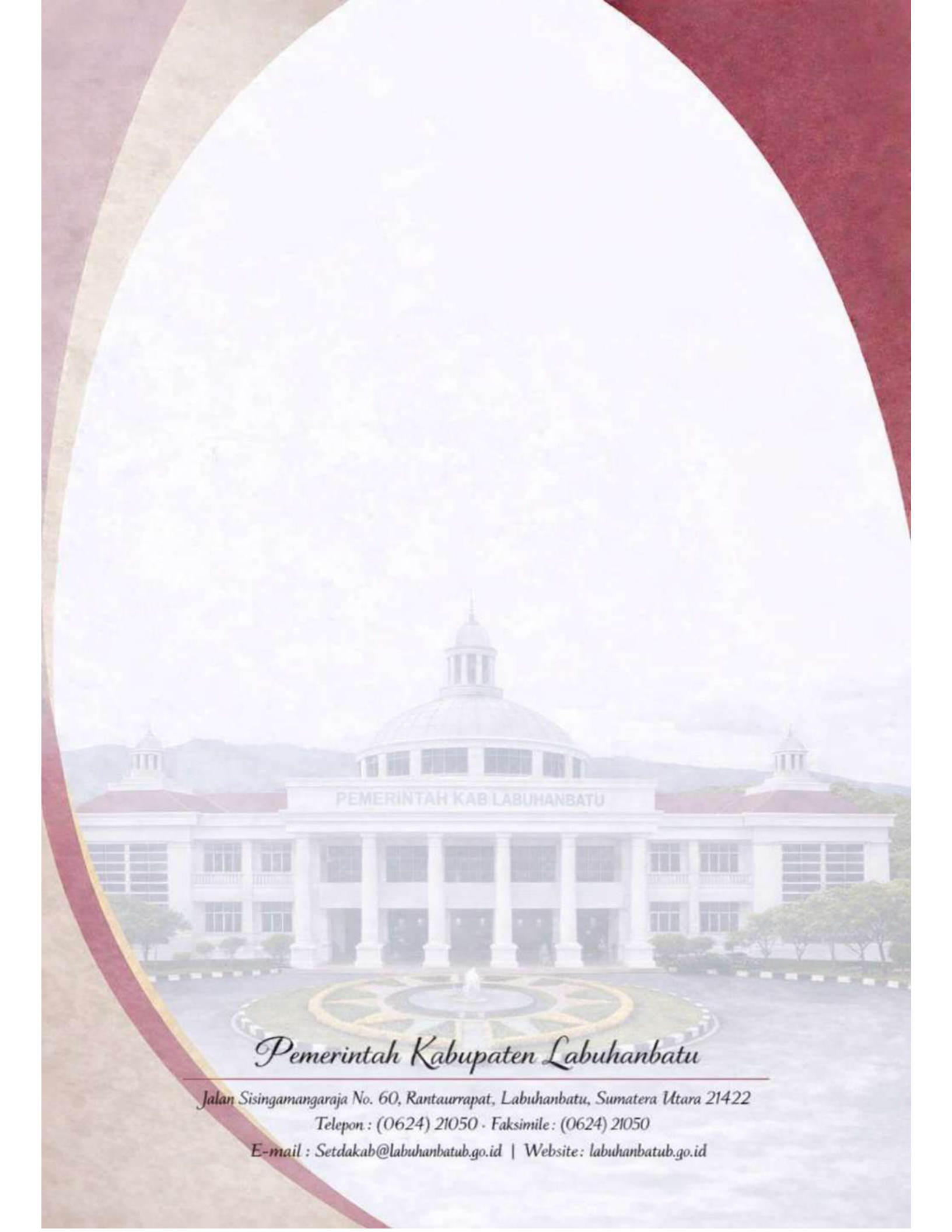
Lampiran 7
Penandatanganan Bersama Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah Tahun 2026



Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026



Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2026



PEMERINTAH KAB LABUHANBATU

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422

Telepon : (0624) 21050 · Faksimile : (0624) 21050

E-mail : Setdakab@labuhanbatub.go.id | Website : labuhanbatub.go.id